

**Catatan Atas Laporan
Keuangan
(CALK)**



BAB I PENDAHULUAN

Sebagai entitas akuntansi Pemerintah Daerah Kota Malang wajib menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Pada dasarnya LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik (APBD). Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP).

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kepala Daerah menyampaikan harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang

- a. Maksud dari disusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Walikota Malang atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Malang.
- b. Tujuan laporan keuangan disusun adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan beserta semua informasi transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan juga menyajikan perbandingan antara anggaran dan realisasi sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menilai efektifitas dan efisiensi Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang

Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: *Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- o. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- r. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan dan Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- s. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014;
- t. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- u. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;



- v. Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi;
- w. Peraturan Walikota Malang Nomor 143 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- x. Peraturan Walikota Malang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; dan
- y. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang
 - 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang
 - 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang
- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD Kota Malang
 - 2.1 Ekonomi Makro
 - 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Malang
 - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Malang
 - 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Malang
 - 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang
 - 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang
 - 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Kota Malang.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang
- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
 - 5.3. Neraca
 - 5.4. Laporan Operasional (LO)
 - 5.5. Laporan Arus Kas (LAK)
 - 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - 5.7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
- Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Keuangan dan Non Keuangan
Pemerintah Kota Malang Lainnya
- Bab VII Penutup



BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD KOTA MALANG

2.1. Ekonomi Makro

Kondisi perekonomian makro secara langsung maupun tidak langsung turut mempengaruhi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi perkembangan kondisi perekonomian di Kota Malang yang berjalan pada periode sebelumnya. Kondisi makro ekonomi Kota Malang dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Atas Dasar Harga Konstan untuk Tahun 2018 sebesar 49.502,48 miliar rupiah sedangkan untuk Tahun 2019 sebesar 52.341,30 miliar rupiah sehingga PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 2.838,82 miliar rupiah (5,73 persen) dibandingkan PDRB Tahun 2018.

Pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konstan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2017	12%	9%
2	2018	13%	9%
3	2019	-	7%

Sumber : BPS Kota Malang dan Bappeda Kota Malang

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Malang tahun 2019 menunjukkan kondisi yang kondusif. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi Kota Malang pada tahun 2019 sebesar 5,73 persen masih berada diatas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,52 persen dan Nasional sebesar 5 persen. Sedangkan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi Kota Malang juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 5,72 persen.

PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA MALANG

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2017	7,57%	5,69 %
2	2018	7,57%	5,72 %
3	2019	5,75%	5,73%

Sumber : BPS Kota Malang dan Bappeda Kota Malang

c. Inflasi

Berdasarkan data BPS Kota Malang, inflasi Kota Malang Tahun 2019 tercatat sebesar 1,93%. Jika dibandingkan dengan inflasi Kota Malang tahun 2018 sebesar 2,98%



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

maka inflasi Kota Malang mengalami penurunan sebesar 1,05%. Sepuluh komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terhadap terjadinya inflasi sepanjang tahun 2019 adalah sepuluh komoditas penyumbang inflasi tahun 2019 yaitu angkutan udara, tukang bukan mandor, cabai merah, mi, bawang putih, emas perhiasan, sekolah dasar, cabai rawit, semen, dan sekolah menengah pertama. Sedangkan sepuluh komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terhadap terjadinya deflasi sepanjang tahun 2019 adalah sekolah menengah atas, bensin, daging ayam, besi beton, tongkol pindang, tarif listrik, udang basah, bahan bakar rumah tangga, apel, dan telur ayam ras. Secara rinci angka Inflasi Kota Malang selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

ANGKA INFLASI KOTA MALANG (YoY)

NO.	TAHUN	TARGET (YoY)	REALISASI (YoY)
1	2017	4,50%	3,75%
2	2018	4,00%	2,98%
3	2019	-	1,93%

Sumber : BPS Kota Malang dan Bappeda Kota Malang ,

d. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan dalam suatu daerah akan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah tersebut. Jumlah penduduk miskin di Kota Malang pada tahun 2018 sebesar 35.490 jiwa (4,10%) sedangkan pada tahun 2019 penduduk miskin di Kota Malang menurun menjadi 35.390 jiwa (4,07%). Hal itu menunjukkan bahwa program pembangunan di Kota Malang mampu menurunkan tingkat kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Secara rinci perbandingan data kemiskinan di Kota Malang adalah sebagai berikut:

DATA KEMISKINAN KOTA MALANG

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2017	4,05%	4,71%
2	2018	3,89%	4,10%
3	2019	3,91%	4,07%

Sumber : BPS Kota Malang dan Bappeda Kota Malang,

e. Angka Pengangguran

Berdasarkan Data BPS Kota Malang, jumlah angkatan kerja di Kota Malang pada tahun 2019 sejumlah 458.216 orang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 sejumlah 454.849 orang. Peningkatan jumlah angkatan kerja tidak cukup untuk mengangkat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), karena terjadi sedikit penurunan TPAK pada tahun 2019 menjadi 65,89 persen dibanding tahun 2018 yang mencapai 65,94 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Malang pada tahun 2019 turun menjadi 6,04 persen dibandingkan tahun 2018 sebesar 6,79 persen. Hal ini menjadi salah satu indikator keberhasilan Pemerintah Kota Malang dalam menekan angka pengangguran di Kota Malang.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Secara rinci perbandingan data pengangguran di Kota Malang adalah sebagai berikut:

DATA PENGANGGURAN TERBUKA KOTA MALANG

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2017	7,35%	7,22%
2	2018	7,25%	6,79%
3	2019	6,73%	6,04%

Sumber : BPS Kota Malang dan Bappeda Kota Malang

f. Rasio Gini

Rasio Gini digunakan untuk mengukur ketimpangan dan ketidakmerataan kesejahteraan ekonomi. Indeks Gini Kota Malang selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

RASIO GINI KOTA MALANG

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2017	-	0,42
2	2018	-	0,43
3	2019	0,38	0,44

Sumber : BPS Kota Malang dan Bappeda Kota Malang

g. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

IPM adalah indeks komposit yang mengukur keberhasilan pembangunan manusia dari tiga dimensi, yaitu dimensi kesehatan, dimensi pengetahuan dan dimensi standar kehidupan yang layak. Dimensi kesehatan diukur dari angka harapan hidup. Dimensi pengetahuan diukur dari angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah. Dimensi standar kehidupan yang layak diukur dengan kemampuan daya beli.

Angka IPM ini mencerminkan bahwa Pembangunan Manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang baik melalui program nasional maupun program daerah menunjukkan peningkatan yang signifikan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Berdasarkan klasifikasi yang ada sesuai besaran nilai IPM, maka kondisi IPM Kota Malang dengan nilai 81,32 berkategori IPM Sangat Tinggi. IPM Kota Malang menduduki peringkat kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. IPM Kota Malang 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut :

IPM KOTA MALANG

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2017	79,58	80,65
2	2018	79,78	80,89
3	2019	81,43	81,32

Sumber : BPS Kota Malang dan Bappeda Kota Malang



2.2. Kebijakan Keuangan

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas salah satunya adalah kewenangan Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Kebijakan Umum APBD Kota Malang Tahun 2019 disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2019. RKPD Kota Malang Tahun 2019 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas bawah dan bawah-atas (*top-down/bottom up*) melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Pemerintah Kota Malang berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
10. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019;
16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2010-2030;
18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang;
20. Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama.
21. Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2019.

KUA 2019 disusun dengan memperhatikan kinerja pelaksanaan APBD tahun 2018 pada sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dimana kinerja pelaksanaan pada sisi belanja langsung yakni belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2019 memiliki prioritas pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan.
2. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan.
3. Peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat.
4. Peningkatan pertumbuhan investasi daerah.
5. Peningkatan produktivitas daerah melalui kemandirian usaha mikro, kecil dan menengah.
6. Peningkatan kualitas infrastruktur sarana dan prasarana wilayah.
7. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
8. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.
9. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Sesuai dengan kondisi perekonomian tahun 2017 dan perkiraan tahun 2018 serta tantangan dan prospek tahun 2019, kebijakan ekonomi makro daerah Kota Malang tahun 2019 dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui pengurangan angka pengangguran, peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat serta peningkatan daya saing daerah, diarahkan pada upaya:

1. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian usaha;
2. Peningkatan kemudahan berusaha dan kondusivitas daerah dalam rangka meningkatkan iklim usaha dan investasi;



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui optimalisasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta upaya peningkatan daya beli masyarakat;
4. Peningkatan ketersediaan infrastruktur, optimalisasi daya dukung kota, dan konektivitas antar wilayah;
5. Peningkatan kualitas prasarana dan sarana perdagangan, khususnya pasar rakyat/tradisional;
6. Peningkatan iklim yang kondusif bagi pengembangan industri kreatif dalam rangka mencapai ekonomi kreatif yang mandiri untuk mendukung daya saing daerah.

Pemilihan prioritas Pembangunan Kota tersebut didasarkan pada pertimbangan antara lain bahwa : prioritas-prioritas tersebut bersifat mendesak/penting dan perlu segera penanganannya. Disamping itu prioritas dimaksud merupakan kewajiban pemerintah kota untuk menanganinya, dan memiliki dampak jangka panjang bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Kota Malang.

Berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dapat dirumuskan prioritas pembangunan sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan	Prioritas Pembangunan Daerah
1	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none">a. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana kegiatan belajar mengajar pada satuan pendidikan dasarb. Peningkatan aksesibilitas masyarakat dalam memperoleh pelayanan pendidikan dasar dan pelayanan kesetaraan
2	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">a. Peningkatan aksesibilitas masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar yang diselenggarakan seluruh Puskesmas di Kota Malangb. Peningkatan layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin melalui mekanisme Surat Pernyataan Miskin (SPM) dan pembayaran premi kepesertaan JKN bagi masyarakat miskinc. Optimalisasi manajemen dan pelayanan RSUD
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none">a. Pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan jalan, drainase dan pedestrianb. Pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan sarana air dan prasarana air bersih (non jaringan PDAM)c. Peningkatan pemahaman masyarakat dalam pengolahan air limbah domestikd. Pengembangan gedung daerah beserta kelengkapan fasilitasnya, diantaranya lanjutan pembangunan Islamic Center
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none">a. Penataan RTH publik, khususnya pada kawasan pinggirb. Penataan kawasan kumuhc. Rehabilitasi rumah yang layak huni, terutama bagi korban bencana, yang memenuhi aspek legalitas
5	Ketentraman, Ketertiban Umum,	<ol style="list-style-type: none">a. Peningkatan kapasitas penegakan Perdab. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

No	Urusan Pemerintahan	Prioritas Pembangunan Daerah
	dan Perlindungan Masyarakat	penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran melalui pelatihan-pelatihan c. Penguatan kapasitas dan kesiapsiagaan satuan linmas dalam rangka pelaksanaan Pemilukada
6	Sosial	a. Pengentasan permasalahan PMKS melalui pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan keterampilan dan kemandirian b. Peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi c. Pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam
7	Tenaga Kerja	a. Peningkatan kompetensi dan keterampilan bagi angkatan kerja, baik yang belum/tidak bekerja maupun pekerja yang menghadapi pemutusan hubungan kerja, melalui pelatihan-pelatihan b. Penyebarluasan informasi kerja
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Peningkatan keberdayaan perempuan melalui penyebaran informasi atau pelatihan-pelatihan dalam rangka peningkatan keterampilan dan kemandirian perempuan b. Peningkatan upaya perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak
9	Pangan	a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan
10	Lingkungan Hidup	a. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan kebersihan dan penanganan permasalahan persampahan b. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup, melalui penyebaran informasi atau pelatihan-pelatihan c. Peningkatan pelayanan penanganan limbah B3
11	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	a. Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di kelurahan b. Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil melalui pelayanan keliling/jemput bola
12	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	a. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan percepatan program keluarga berencana melalui penyebaran informasi atau kegiatan lainnya yang relevan
13	Perhubungan	a. Optimalisasi manajemen rekayasa lalu lintas b. Peningkatan infrastruktur transportasi, konektivitas dan kelengkapan sarana lalu lintas termasuk rambu-rambu lalu lintas c. Peningkatan kapasitas aparaturnya pengatur lalu lintas



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

No	Urusan Pemerintahan	Prioritas Pembangunan Daerah
14	Komunikasi dan Informatika	a. Peningkatan pemahaman dan penguasaan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika melalui kegiatan pelatihan-pelatihan b. Perluasan jaringan/konektivitas komunikasi dan informatika melalui penambahan/penguatan area terkoneksi/ <i>hot spot</i> pada ruang atau fasilitas public
15	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	a. Pembinaan kelembagaan koperasi b. Peningkatan daya saing usaha koperasi dan usaha mikro melalui pelatihan-pelatihan dalam rangka peningkatan keterampilan dan kemandirian
16	Penanaman Modal	a. Peningkatan pelayanan perizinan dan penanaman modal melalui pelayanan jemput bola/ <i>mobile</i> b. Peningkatan pemahaman masyarakat melalui penyebaran informasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan di bidang perizinan
17	Kepemudaan dan Olahraga	a. Peningkatan kapasitas dan peranserta lembaga/organisasi kepemudaan melalui kegiatan penyebaran informasi, pelatihan dan kegiatan lainnya yang relevan dan berkorelasi dengan upaya meningkatkan semangat kepemudaan b. Peningkatan kualitas, kecukupan dan aksesibilitas prasarana dan sarana olahraga
18	Kebudayaan	a. Peningkatan perlindungan dan pengembangan seni tradisional dan budaya daerah melalui penyelenggaraan atau kepesertaan dalam even-even seni tradisional dan budaya daerah
19	Perpustakaan	a. Penambahan koleksi perpustakaan umum daerah, baik bahan pustaka maupun bahan bacaan b. Peningkatan kelengkapan dan kualitas sarana prasarana perpustakaan umum daerah c. Peningkatan pelayanan perpustakaan umum melalui pelayanan perpustakaan keliling
20	Pariwisata	a. Identifikasi destinasi wisata baru, dan pembinaan/penguatan destinasi wisata eksisting yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan sumberdaya lokal b. penyelenggaraan atau kepesertaan dalam even-even pariwisata dalam rangka promosi wisata daerah
21	Pertanian	a. Peningkatan upaya dalam rangka mempertahankan luasan LP2B b. Pembinaan terhadap petani, khususnya dalam hal penanganan hasil produksi paska panen
22	Perdagangan	a. Pemeliharaan atau revitalisasi pasar rakyat/tradisional
23	Perindustrian	a. Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

No	Urusan Pemerintahan	Prioritas Pembangunan Daerah
		melalui pelatihan-pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas produk, pemasaran dan kemandirian b. Pembinaan sektor industri kreatif
24	Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	a. Pelaksanaan reformasi birokrasi b. Peningkatan tatakelola administrasi pemerintahan

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/234/35.73.402/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019 - 2023. Adapun IKU Pemerintah Kota Malang sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA MALANG

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,43
	1. Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	0,78
	2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	0,814
	3. Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	0,845
Terwujudnya produktifitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan		Pertumbuhan Ekonomi	5,75%
		Gini Rasio	0,38
	4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6
	5. Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	3,90



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
	6. Meningkatkan kualitas pemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	82,92
Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender		Angka Kemiskinan	3,91
		Indeks Modal Sosial	81,36
	7. Meningkatkan kualitas perlindungan sosial	Persentase Penurunan PMKS	5%
	8. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,836
Terwujudnya Kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib Hukum, profesional dan Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	72
	9. Meningkatkan penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Persentase perda yang ditegakkan	25%
	10. Meningkatkan kualitas sistem kelembagaan yang efektif	a) Nilai Sakip;	75,65
		b) Opini BPK;	WTP
		c) Maturitas SPIP; dan	3,5
		d) Rasio PAD.	0,24
	11. Meningkatkan kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalisme ASN	71,46
12. Meningkatkan integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	3,8	



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Malang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Malang Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	ANGGARAN
1. Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	0,78	209.067.715.069,00
2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	0,814	148.267.897.166,00
3. Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	0,847	6.794.909.000,00
4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6%	41.628.060.738,00
5. Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	3,90	339.054.537.931,00
6. Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	82,92	54.709.095.490,00
7. Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Persentase Penurunan PMKS	5%	114.009.924.620,00
8. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,836	91.941.674.000,00
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,25	
9. Meningkatnya	Persentase perda yang	25%	12.151.616.000,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	ANGGARAN
penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	ditegakkan		
10. Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	a) Nilai Sakip; b) Opini BPK; c) Maturitas SPIP; dan d) Rasio PAD.	75,65 WTP 3,5 0,24	424.683.217.774,00
11. Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalisme ASN	71,46	12.403.006.000,00
12. Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	3,8	21.717.447.000,00

Dari target sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, capaian kinerja tahun 2019 sebagai berikut

TARGET DAN REALISASI KINERJA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019
Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	0,78	0,71	91%
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	0,81	0,81	100%
Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	0,85	0,85	100%
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6%	6,21%	104%
Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	3,90	4,06	104%
Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	82,92	65,27	78,71%
Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Persentase Penurunan PMKS	5%	6,81%	136,2%
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	83,60%	84,63%	101%
	Indeks pembangunan Gender (IPG)	96,80	94,71	98%
Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib	Persentase perda yang ditegakkan	25%	26,37%	105,48%



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019
hukum				
Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	Nilai Sakip	75,65	75	99%
	Opini BPK;	WTP	WTP	100%
	Maturitas SPIP	3,50	3,045	87%
	Rasio PAD.	0,24	0,30	125%
Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalisme ASN	71,46	66,61	93%
Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	3,8	2,85	75%

Faktor pendorong tercapainya tingkat keberhasilan pencapaian indikator pencapaian target kinerja:

- Tingkat partisipasi yang tinggi dari semua komponen yang ada dengan mengembangkan konsep pentahelix dimana semua sumberdaya yang ada saling bersinergi untuk memberikan kontribusi yang positif dalam pembangunan.
- Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang stabil disertai dengan tanggungjawab masyarakat untuk menjaga wilayahnya masing-masing menciptakan iklim pembangunan dan investasi yang baik sehingga dapat mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat.

Faktor penghambat tercapainya tingkat keberhasilan indikator pencapaian target kinerja:

- Adanya kegiatan yang tidak sinkron akibat kurang koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan provinsi sehingga dana pendampingan pelaksanaan program kegiatan dan bagi hasil dari pusat menjadi terlambat.
- Kebutuhan infrastruktur yang semakin meningkat akibat berkembangnya jumlah penduduk kota dan tingkat kebutuhan yang semakin kompleks dalam pelaksanaan pembangunan.
- Kurangnya kesadaran wajib pajak atau retribusi dalam memenuhi kewajibannya, sehingga potensi retribusi daerah belum optimal.
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia baik secara kualitas dan kuantitas untuk pemeriksa pajak, sehingga sumber dan potensi pajak tidak terpungut secara optimal.



BAB III
IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA MALANG

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Malang

Ikhtisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kota Malang ditunjukkan dalam tabel data realisasi APBD menurut urusan Pemerintah Daerah dimana pada Pemerintah Kota Malang terdiri dari 134 Organisasi Perangkat Daerah. Data yang disampaikan berupa gambaran dari data yang disajikan untuk menunjukkan ukuran secara kuantitatif penggunaan APBD Pemerintah Kota Malang pada periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang ditampilkan dalam Bab V Penjelasan Pos-Pos dalam Laporan Keuangan.

Anggaran pendapatan Pemerintah Kota Malang pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.189.478.934.214,69 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.613.052.028.554,00; Pendapatan Transfer sebesar Rp.1.508.604.705.660,69 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp67.822.200.000,00. Sedangkan realisasi pendapatan Pemerintah Kota Malang pada tahun 2019 adalah sebesar Rp2.187.985.479.986,01; yang terdiri dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp588.066.042.351,01; Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp1.532.844.037.635,00 dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp67.075.400.000,00.

Anggaran Belanja Pemerintah Kota Malang pada tahun 2019 sebesar Rp2.654.691.198.906,71 yang terdiri dari: Belanja Operasi sebesar Rp.1.879.833.045.970,00; Belanja Modal sebesar Rp385.923.298.820,51; dan belanja tak terduga sebesar Rp388.934.854.116,20. Sedangkan realisasi belanja Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.909.775.302.319,19 terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.1.669.892.391.899,53; realisasi Belanja Modal sebesar Rp.238.525.539.354,66; dan realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp1.357.371.065,00.

Dengan demikian terjadi surplus sebesar Rp.278.210.177.666,82 sedangkan Pembiayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang dalam penerimaan sebesar Rp489.359.571.730,35 dan pengeluaran sebesar Rp.24.805.327.859,00 sehingga Pembiayaan netto sebesar Rp464.554.243.871,35 dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp.742.764.421.538,17. Adapun secara rinci realisasi APBD Kota Malang tahun 2019 sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pendapatan Pajak Daerah	501.144.000.000,00	460.047.450.664,60	91,80
Pendapatan Retribusi Daerah	45.187.533.200,00	46.605.703.263,00	103,14
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.585.915.478,00	28.559.431.165,39	126,45
Lain-lain PAD yang Sah	44.134.579.876,00	52.853.457.258,02	119,76
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	613.052.028.554,00	588.066.042.351,01	95,92
PENDAPATAN TRANSFER			
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN			
Dana Bagi Hasil Pajak	61.050.664.000,00	41.088.807.989,00	67,30
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	86.541.460.188,00	89.771.535.806,00	103,73



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%
Dana Alokasi Umum	886.503.661.000,00	886.503.661.000,00	100,00
Dana Alokasi khusus	214.254.716.962,60	185.881.891.526,00	86,76
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1.248.350.502.150,60	1.203.245.896.321,00	96,39
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA			
Dana Penyesuaian	73.871.078.000,00	73.871.078.000,00	100,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	73.871.078.000,00	73.871.078.000,00	100,00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	182.924.766.510,09	252.268.704.314,00	137,91
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	3.458.359.000,00	3.458.359.000,00	100,00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	186.383.125.510,09	255.727.063.314,00	137,21
Total Pendapatan Transfer	1.508.604.705.660,69	1.532.844.037.635,00	101,61
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
Pendapatan Hibah	67.822.200.000,00	67.075.400.000,00	98,90
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	67.822.200.000,00	67.075.400.000,00	98,90
JUMLAH PENDAPATAN	2.189.478.934.214,69	2.187.985.479.986,01	99,93
BELANJA			
BELANJA OPERASI			
Belanja Pegawai	865.923.220.800,09	791.508.273.117,88	91,41
Belanja Barang	902.470.580.979,91	775.898.397.761,65	85,97
Bunga	-	-	-
Subsidi	-	-	-
Hibah	109.225.515.490,00	101.823.026.287,00	93,22
Bantuan Sosial	1.515.000.000,00	-	-
Bantuan Keuangan	698.728.700,00	662.694.733,00	94,84
Jumlah Belanja Operasi	1.879.833.045.970,00	1.669.892.391.899,53	88,83
BELANJA MODAL			
Belanja Tanah	6.888.056.200,00	1.052.056.200,00	15,27
Belanja Peralatan dan Mesin	113.536.515.725,18	92.686.829.412,80	81,64
Belanja Gedung dan Bangunan	168.114.713.459,87	65.234.558.282,86	38,80
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	94.806.169.733,46	77.371.112.829,00	81,61
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.550.721.918,00	1.493.032.570,00	96,28
Belanja Aset Lainnya	1.027.121.784,00	687.950.060,00	66,98
Jumlah Belanja Modal	385.923.298.820,51	238.525.539.354,66	61,81
BELANJA TAK TERDUGA			
Belanja Tak Terduga	388.934.854.116,20	1.357.371.065,00	0,35
Jumlah Belanja Tak Terduga	388.934.854.116,20	1.357.371.065,00	0,35
JUMLAH BELANJA	2.654.691.198.906,71	1.909.775.302.319,19	71,94
TRANSFER			
TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA			
Bagi Hasil Pajak	-	-	0,00
Bagi Hasil Retribusi	-	-	0,00
JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	-	-	0,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.654.691.198.906,71	1.909.775.302.319,19	71,94
SURPLUS/ (DEFISIT)	(465.212.264.692,02)	278.210.177.666,82	(59,80)
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
Penggunaan SILPA	490.019.264.692,02	489.359.571.730,35	99,87
Jumlah Penerimaan	490.019.264.692,02	489.359.571.730,35	99,87
PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	24.475.000.000,00	24.475.000.000,00	100,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	332.000.000,00	330.327.859,00	-
Jumlah Pengeluaran	24.807.000.000,00	24.805.327.859,00	99,99
PEMBIAYAAN NETTO	465.212.264.692,02	464.554.243.871,35	99,86
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	742.764.421.538,17	



3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pencapaian target kinerja keuangan tidak terlepas dari berbagai kendala dan hambatan yang harus terus diupayakan untuk dapat diatasi sesuai dengan kemampuan daerah. Adapun permasalahan utama dan solusinya secara deskriptif dapat diuraikan sebagai berikut:

A. PENDAPATAN DAERAH

1) Permasalahan :

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - Efektivitas penerapan prosedur dan mekanisme administrasi pengelolaan PAD perlu lebih dioptimalkan guna mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PAD
 - Perlu ditingkatkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber-sumber PAD
 - Perlu dioptimalkan lebih lanjut kualitas petugas pengelola administrasi PAD
 - Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak perlu ditingkatkan
 - Perlu dilakukan pengkajian kembali terhadap peraturan-peraturan daerah tentang pajak dan retribusi seiring dengan regulasi baru tentang pajak dan retribusi daerah
- b) Dana Transfer
 - Perhitungan dana perimbangan, belum sesuai dengan harapan daerah, oleh karena itu perlu ditingkatkan efektivitas pelaksanaannya
- c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - Penerimaan pendapatan dari sisi bantuan keuangan dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah daerah lainnya, dalam pendistribusian memerlukan alokasi waktu yang lebih banyak untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.

2) Solusi :

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemerintah Kota Malang berusaha meningkatkan kemampuan pendapatan daerah dengan mendorong peningkatan kapasitas fiskal di daerah. Ruang fiskal di daerah selama ini terserap untuk belanja pegawai dan operasional rutin lainnya sehingga ruang untuk belanja yang bertujuan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan terhadap masyarakat sangat terbatas. Salah satu upaya untuk memperbesar ruang fiskal adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena PAD merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang sebagai berikut:

1. Intensifikasi Pendapatan Daerah

Dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, upaya intensifikasi pendapatan daerah yang dilakukan pada Tahun 2019 adalah:

- a. Regulasi berupa Peraturan Daerah Kota Malang dan Peraturan Walikota Malang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, yakni:



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

1) Peraturan Daerah Kota Malang

Peraturan Daerah Kota Malang yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut:

- a) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- b) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- c) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- d) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu;
- e) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- f) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum.

2) Peraturan Walikota Malang

Peraturan Walikota Malang yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut:

- a) Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- b) Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penelitian dan Pemeriksaan BPHTB;
- c) Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penagihan BPHTB;
- d) Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;
- e) Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerbitan, Pengisian dan Penyampaian OPD;
- f) Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang 83 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- g) Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pengembalian dan Pengelolaan Uang Jambong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembayaran, Pengembalian dan Pengelolaan Uang Jaminan Bongkar Reklame;



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

- h) Peraturan Walikota Nomor 104 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- i) Peraturan Walikota Nomor 105 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- j) Peraturan Walikota Nomor 106 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendataan dan Pelaporan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- k) Peraturan Walikota Nomor 107 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Penetapan Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- l) Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- m) Peraturan Walikota Nomor 111 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- n) Peraturan Walikota Nomor 113 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- o) Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- p) Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran/Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoraan, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah;
- q) Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Mutasi Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;
- r) Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah;
- s) Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pendaftaran, Penerbitan dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
- t) Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah;
- u) Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengurangan dan Kekeringan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

- v) Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan untuk Masa Pajak sampai dengan Tahun 2012;
 - w) Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2019 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah Dalam Rangka Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Malang
- b. Meningkatkan pengembangan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi dan transparansi.
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah melalui pengembangan konsep pelayanan berbasis IT.
 - d. Penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberi alternatif model pembayaran kepada masyarakat.
 - e. Mengkaji sistem administrasi dan pengelolaan data Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - f. Melaksanakan pembinaan dan mendorong peningkatan potensi dan kemampuan wajib pajak, melalui kegiatan pelaksanaan operasional dan pengawasan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
2. Ekstensifikasi
- Ekstensifikasi pajak ditujukan untuk menambah Penerimaan Asli Daerah yang identik dengan perluasan cakupan pengenaan pajak dengan menambah sumber penerimaan.
- b) Dana Transfer
 - Meningkatkan intensitas pelaksanaan sosialisasi peraturan PPh, penertiban dan penagihan aktif terhadap tunggakan dan melaksanakan upaya penegakan hukum secara konsisten serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat;
 - Konsultasi yang lebih intensif dengan pemerintah pusat melalui kementerian keuangan, kementerian dalam negeri, kementerian ESDM, kementerian kehutanan, anggota DPR-RI dan DPD asal Malang Raya;
 - DBH cukai hasil tembakau (DBHCHT) termasuk komponen dana transfer, maka dalam hal penggunaannya perlu dilakukan pengkajian kembali, sehingga alokasi DBHCHT bersifat blok grant yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi;
 - c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - Optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah daerah lainnya, agar lebih mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.

B. BELANJA DAERAH

1) Permasalahan :

- Pada dasarnya permasalahan umum yang dihadapi daerah saat ini terkait belanja daerah adalah pemerintah daerah seringkali dihadapkan akan tingginya tingkat



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

kebutuhan daerah yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah sehingga menimbulkan kesenjangan fiskal. Sementara disisi lain masyarakat menuntut adanya perbaikan kualitas pelayanan dimana hal ini tentunya memerlukan sumber daya yang cukup besar dalam merealisasikannya.

2) Solusi :

- a) Menetapkan skala prioritas belanja daerah dalam menghadapi begitu banyak kebutuhan yang memerlukan pembiayaan yang besar pula;
- b) Memilih aktivitas ataupun kegiatan yang dapat member umpan balik ataupun memberikan dampak positif bagi peningkatan sector pembangunan lain;
- c) Menetapkan standar analisa belanja yang pada saat ini masih dalam bentuk standar harga barang dan jasa yang menjadi acuan atau batas tertinggi dalam penganggaran belanja daerah;
- d) Pengendalian dan pengukuran untuk alokasi anggaran masing-masing kegiatan untuk menilai kewajaran pembebanan biaya dalam pelaksanaan kegiatan;
- e) Merealisasikan anggaran belanja sesuai kebutuhan riil sehingga terjadi penghematan anggaran karena tidak selamanya belanja yang telah dianggarkan harus dihabiskan.

Disamping permasalahan belanja tersebut diatas sebagai permasalahan utama belanja daerah yaitu terbatasnya anggaran pendapatan dan membengkaknya jumlah belanja yang harus dibiayai dalam rangka mencapai kinerja proyeksi belanja daerah dan untuk meningkatkan efisiensi belanja daerah, kebijakan pengelolaan belanja daerah antara lain :

- 1) Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, terutama bidang pendidikan, kesehatan, pangan dan infrastruktur;
- 2) Mengutamakan program-program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;
- 3) Memfasilitasi dan memberikan stimulant pada sector riil melalui bantuan modal, pembinaan dan pendampingan kepada UMKM;
- 4) Melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan mempunyai manfaat luas bagi masyarakat;
- 5) Memonitor pengelolaan dan pelaksanaan pengalokasian program-program yang dibiayai dari pusat maupun program tiga cluster, sehingga sehingga tidak terjadi tumpang tindih penggunaan alokasi anggaran, dengan demikian efisiensi dan efektivitas belanja dapat terkontrol.

C. PEMBIAYAAN DAERAH

Permasalahan utama pembiayaan daerah dapat meliputi permasalahan penerimaan dan permasalahan pengeluaran dimana dapat dijelaskan bahwa : sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu harus diuraikan sampai dengan obyek dan rincian obyek. Mengingat besarnya pendapatan daerah belum sepenuhnya memenuhi target belanja, maka diperlukan solusi sebagai berikut :

- 1) Kebijakan defisit anggaran yang sudah dilakukan harus dapat memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan secara cermat dan hati-hati dengan mempertimbangkan efisiensi biaya, kemampuan penyediaan dana dan dampaknya pada masa yang akan datang;



- 2) Setiap pembiayaan harus dilakukan secara cermat dan hati-hati agar sumber-sumber anggaran dapat digunakan secara optimal dan kesinambungan fiskal dapat terjaga.

PENCAPAIAN KINERJA

Pemerintah Kota Malang menyelenggarakan seluruh Urusan Wajib baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sedangkan urusan pilihan Pemerintah Kota Malang tidak menyelenggarakan urusan pilihan bidang: kehutanan; energi dan sumber daya mineral; dan transmigrasi. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan tersebut serta pelaksanaan fungsi penunjang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

a. Bidang Pendidikan

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, dengan program sebagai berikut:

- 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini
- 2) Program Pendidikan Non Formal
- 3) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 4) Program Pendidikan Sekolah Dasar
- 5) Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 6) Program Sarana dan Prasarana SKB
- 7) Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

b. Bidang Kesehatan

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) yang membidangi kesehatan, dengan program sebagai berikut:

Dinas Kesehatan

- 1) Program Pengawasan Obat dan Makanan
- 2) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
- 3) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- 4) Program pelayanan kesehatan dasar
- 5) Program Pelayanan Kesehatan Rujukan
- 6) Program Pelayanan Kesehatan Tradisional
- 7) Program Pencegahan dan Pengendalian penyakit
- 8) Program Kesehatan Kerja dan Olahraga
- 9) Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan
- 10) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga
- 11) Program Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan
- 12) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Alat Kesehatan
- 13) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
Penguatan puskesmas BLUD
- 14) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan Farmasi
- 15) Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan Gizi
Kegiatan pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/ preventif maupun kuratif/ rehabilitatif melalui pengadaan suplemen makanan tambahan (DBH CHT)
- 16) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Fasilitas Pelayanan Kesehatan



RSUD

- 1) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Kegiatan Pelayanan dan Pendukung pelayanan BLUD
- 2) Program Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah

Pukesmas Janti

- 1) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
- 2) Program pelayanan kesehatan dasar
- 3) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

Pukesmas Dinoyo

- 1) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
- 2) Program pelayanan kesehatan dasar Operasional Puskesmas Dinoyo
- 3) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD Puskesmas Dinoyo

c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan program sebagai berikut:

- 1) Program Perencanaan Pembangunan/Pengembangan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Pedestrian
- 2) Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Infrastruktur Jalan
- 3) Program Perencanaan, Pembangunan/Pengembangan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
- 4) Program Pengembangan/Rehabilitasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
- 5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum
- 6) Program Bina Jasa Kontruksi
- 7) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum di Kota Malang
- 8) Program Perencanaan, Pembangunan Pengembangan, Rehabilitasi Turap/Talud/Bronjong
- 9) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah di Kota Malang
- 10) Program Perencanaan Ruang
- 11) Program Pembangunan, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung/Bangunan Kantor dan Fasilitas Umum
- 12) Program Perencanaan, Pembangunan/Pengembangan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase
- 13) Program Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kota Malang
- 14) Program Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang
- 15) Program Pemanfaatan Tata Ruang
- 16) Program Penyelenggaraan Pengujian Mutu Bahan dan Alat Berat

d. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dengan program sebagai berikut:

- 1) Program Pengendalian dan Pengawasan Perumahan dan Permukiman
- 2) Program Penyelenggaraan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)



- 3) Program Pengelolaan Penerangan Jalan
- 4) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
- 5) Program Pengelolaan Areal Pemakaman

e. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dengan program sebagai berikut:

- 1) Program Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 2) Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah
- 3) Program Pembinaan Polisi Pamong Praja
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas
- 5) Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

f. Bidang Sosial

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, dengan program sebagai berikut:

- 1) Program Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial
- 2) Program Pembinaan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
- 3) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- 4) Program Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 5) Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH)

2. Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

a. Bidang Tenaga Kerja

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, dengan program sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
- 2) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- 3) Bimbingan Teknis Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- 4) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- 5) Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang ketenagakerjaan sektor Pelatihan dan Produktivitas
- 6) Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang Ketenagakerjaan Sektor Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan program sebagai berikut:

- 1) Program Pemberdayaan Perempuan
- 2) Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak
- 3) Program Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

- c Bidang Pangan
Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Pangan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dengan program sebagai berikut:
- 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan
 - 2) Program Pengembangan Panganekaragaman, Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan
- d Bidang Pertanian
Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan Program Penataan penggunaan dan pemanfaatan tanah Pengadaan Lahan Makam
- e Bidang Lingkungan Hidup
Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, dengan program sebagai berikut:
- 1) Program Pengembangan Tata Lingkungan Hidup
 - 2) Program Kemitraan dan Pengendalian Lingkungan Hidup
 - 3) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - 4) Program Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan
 - 5) Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
 - 6) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - 7) Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Lingkungan
 - 8) Program Peningkatan Kapasitas Pengolahan sampah
 - 9) Program Pengelolaan Sampah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
 - 10) Program Pengurangan dan Penanganan Sampah
 - 11) Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional Persampahan
- f Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan program sebagai berikut:
- 1) Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - 2) Program Pelayanan Pencatatan Sipil
 - 3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
- g Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan dan Kecamatan, dengan program sebagai berikut:
- 1) Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kecamatan
 - 2) Program Pemberdayaan Masyarakat
 - 3) Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik
- h Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan



Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan program sebagai berikut:

- 1) Program Keluarga Berencana
- 2) Biaya Operasional Pembinaan Program oleh Kader
- 3) Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
- 4) Program Ketahanan Keluarga Balita, Remaja dan Lanjut Usia
- 5) Pengembangan Kapasitas program Saka Kencana dan BKR

i Bidang Perhubungan

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, dengan program sebagai berikut:

- 1) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
- 2) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
- 3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- 4) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
- 5) Program Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 6) Program Pengendalian Penyelenggaraan Perparkiran

j Bidang Komunikasi dan Informatika

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan program sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik
- 2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- 3) Program Peningkatan Penyelenggaraan Komunikasi Publik

k Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dengan program sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Koperasi
- 2) Program Pengawasan Koperasi
- 3) Program pengembangan usaha mikro
- 4) Program pembinaan lingkungan sosial di bidang Usaha Mikro

l Bidang Penanaman Modal

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan program sebagai berikut:

- 1) Program Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal
- 2) Program Pengolahan Data dan Informasi
- 3) Program Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan
- 4) Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
- 5) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

m Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Kepemudaan dan Olah Raga dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, dengan program sebagai berikut:

- 1) Program peningkatan peran serta kepemudaan



- 2) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
- 3) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
- 4) Program Peningkatan Prestasi Olahraga
- 5) Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga

n Bidang Statistik

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan program Program Pengelolaan Data dan Informasi Statistik

o Bidang Persandian

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan program Program Pengelolaan Persandian dengan kegiatan Pengelolaan pengendalian dan pengamanan dokumen persandian

p Bidang Kebudayaan

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dengan Program Pengelolaan Keragaman dan Kekayaan Budaya

q Bidang Perpustakaan

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, dengan program sebagai berikut:

- 1) Program Pelestarian dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan
- 2) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

r Bidang Kearsipan

Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Bidang Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, dengan Program Pengelolaan Arsip Daerah

3. Urusan Pilihan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk melaksanakan urusan pilihan, meliputi:

a Bidang Kelautan dan Perikanan

Urusan Pilihan di Bidang Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dengan program Program Peningkatan Produksi Perikanan

b Bidang Pariwisata

Urusan Pilihan di Bidang Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dengan program sebagai berikut:

- 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
- 2) Program Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Pariwisata

c Bidang Pertanian

Urusan Pilihan di Bidang Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dengan program sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Produksi Peternakan



- 2) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 3) Program Peningkatan Produksi Tanaman

d Bidang Perdagangan

Urusan Pilihan di Bidang Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, dengan program sebagai berikut:

- 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- 2) Program Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Pasar
- 3) Program Pengembangan Usaha Perdagangan
- 4) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kemetrolgian
- 5) Peningkatan Kualitas pelayanan Pasar
- 6) Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (Cukai)

e Bidang Perindustrian

Urusan Pilihan di Bidang Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, dengan program sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronik, Telematika, Tekstil dan Aneka
- 2) Program Pengembangan Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman
- 3) Program Pengembangan Industri Kreatif Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka
- 4) Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Industri Logam, Mesi, Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, Tekstil dan Aneka (Cukai)
- 5) Program Pengembangan Industri Kreatif Agro, Kimia, Makanan dan Minuman
- 6) Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Industri Agro, Kimia, Makanan dan Minuman (Cukai)
- 7) Program Pembinaan Industri (Cukai)
- 8) Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai melalui forum tatap muka (Cukai)

4. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program yang dilaksanakan untuk melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan daerah meliputi:

a Perencanaan

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dengan program sebagai berikut:

- 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumberdaya Alam
- 3) Program Perencanaan Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya
- 4) Program perencanaan pembangunan infrastruktur, dan pengembangan wilayah

b Keuangan (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan program sebagai berikut:

- 1) Program Penyusunan Anggaran Daerah
- 2) Program Penyelenggaraan Perbendaharaan Daerah
- 3) Program Pelaporan Keuangan Daerah
- 4) Program Penatausahaan Aset Daerah
- 5) Program Pemanfaatan Aset Daerah



- c. Keuangan (Badan Pelayanan Pajak Daerah)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Keuangan dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah dengan program sebagai berikut:
- 1) Program Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah
 - 2) Program Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah
 - 3) Program Pengembangan Potensi Pajak Daerah
- d. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dengan program sebagai berikut:
- 1) Program Pengadaan, Penempatan dan Pembinaan Karir Kepegawaian
 - 2) Program Fasilitas Pemberhentian Pegawai
 - 3) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara
 - 4) Program Pembinaan Kepegawaian
 - 5) Program Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian
- e. Penelitian dan Pengembangan
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dengan Program Penguatan Inovasi, Riset dan Pengembangan
- f. Pengawasan
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat dengan program dan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah I
 - 2) Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah II
 - 3) Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah III
 - 4) Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah IV
- g. Penanggulangan Bencana
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan program sebagai berikut:
- 1) Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
 - 2) Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana
 - 3) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana
- h. Fungsi Penunjang Lainnya
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Fungsi penunjang lainnya dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah dan Kecamatan dengan program sebagai berikut:
- Sekretariat DPRD
- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - 3) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan
 - 4) Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Penganggaran bagi Pimpinan/Anggota DPRD
 - 5) Program Fasilitasi Penyelenggaraan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



6) Penyelenggaraan Fungsi Kehumasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Bagian Pemerintahan

- 1) Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kecamatan

Bagian Hukum

- 1) Program Penataan dan Penyelarasan Peraturan Perundang-undangan
- 2) Program Penerapan dan Penegakan Hukum

Bagian Organisasi

- 1) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
- 2) Program Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Bagian Layanan Pengadaan

- 1) Program Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Bagian Perekonomian

- 1) Program Pengembangan Kebijakan Bidang Perekonomian

Bagian Kesejahteraan Masyarakat

- 1) Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Bagian Hubungan Kemasyarakatan

- 1) Program Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Keprotokoleran dan Hubungan Antar Lembaga

Bagian Umum

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Bagian Keuangan dan Perlengkapan

- 1) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan
- 2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 3) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- 5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan
- 6) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Bagian SDA dan PI

- 1) Program Pengembangan Kebijakan SDA dan Infrastruktur

Kecamatan

- 1) Program Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum



5. Urusan Pemerintahan Umum

Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan program sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
- 2) Program Pendidikan Politik Masyarakat
- 3) Program Pemberdayaan Ormas dan LSM
- 4) Program Kewaspadaan Daerah



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Malang

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pada Pemerintah Kota Malang, entitas akuntansi adalah setiap SKPD, unit kerja, PPKD yang diberi wewenang sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pada Tahun Anggaran 2019 Entitas Pelaporan Pemerintah Kota Malang berada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang dengan alamat Jalan Tugu Nomor 1 Malang.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang

Basis Akuntansi

Basis Akuntansi yang digunakan pada transaksi dan kejadian dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang adalah Akuntansi berbasis Akrual. Basis akrual (*accrual basis*) adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang

Basis Pengukuran

Basis Pengukuran yang digunakan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini memberikan informasi yang diharapkan dapat menyajikan secara memadai dan dapat mengindikasikan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang.

a. Pendapatan

Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (Pendapatan – LRA) adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Laporan Operasional (Pendapatan – LO) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

1) Pengakuan

Pendapatan - LRA

- a) Pendapatan diakui pada saat kas telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
- b) Pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.



Pendapatan – LO

- a) Pendapatan diakui pada saat Pemerintah Daerah memiliki hak atas pendapatan (*earned*)
- b) Pendapatan diakui pada saat Pemerintah Daerah menerima kas yang berasal dari transaksi pendapatan (*realized*)

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke pemerintah daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan Laporan Keuangan Daerah.

Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah daerah, baik yang dicatat oleh SKPD maupun PPKD.

Pendapatan daerah dirinci menurut kelompok pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2) Pengukuran

- a) Pengukuran Pendapatan LRA dan LO menggunakan uang rupiah berdasarkan nilai wajar imbalan (kas atau setara kas), yang diterima atau yang dapat diterima;
- b) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dengan mata uang rupiah. Jumlah mata uang asing tersebut dijabarkan menurut kurs tengah diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;
- c) Pengukuran Pendapatan LRA dan Pendapatan LO berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran);
- d) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bruto dan Pendapatan LO bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses hukum belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.



b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

c. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

1) Pengakuan

Belanja - LRA

Belanja diakui pada saat :

- a) Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan;
- c) Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD.

Beban - LO

Beban diakui pada saat :

- a) Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
- b) Terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
- c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa
Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam Pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.

2) Pengukuran

Belanja - LRA

- a) Menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan;
- b) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dengan mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;
- c) Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah;



- d) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Beban - LO

- a) Menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan;
- b) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dengan mata uang rupiah. Jumlah mata uang asing tersebut dijabarkan menurut kurs tengah diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;
- c) Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan;
- d) Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga yang sebenarnya yang dibayarkan, sebesar aset yang digunakan, disusutkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

d. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan terdiri dari:

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

3) Pengakuan

- a) Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
- b) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah;
- c) Selisih lebih/kurang antara Penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pembiayaan netto.

4) Pengukuran

- a) Pengukuran pengeluaran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan;
- b) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dengan mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;
- c) Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).



e. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah; Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, misalnya tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

1) Pengakuan

Kas atau setara kas diakui pada saat diterima atau dibayarkan.

2) Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

f. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

1) Pengakuan

Suatu pengeluaran kas dapat diakui sebagai investasi jangka pendek berdasarkan kemungkinan manfaat ekonomik atau jasa potensial di masa yang akan datang atas investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah atau apabila nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.

2) Pengukuran

- a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar nilai perolehan;
- b) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehan yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut;
- c) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham misal deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut;
- d) Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal transaksi.

g. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

1) Pengakuan

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan, ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika :

- a) Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau



c) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

2) Pengukuran

Kriteria Pengukuran piutang sebagai berikut :

- a) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan adalah sebagai berikut :
- (1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan;
 - (2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak yang mengajukan banding atau;
 - (3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan yang belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- b) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan sebagai berikut:
- (1) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, comitment fee dan/atau biaya pinjaman lainnya, maka akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, comitment fee dan/atau biaya pinjaman lainnya pada periode berjalan yang terutang [belum dibayar] pada akhir periode pelaporan.
 - (2) Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang pada akhir periode pelaporan.
 - (3) Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan ketentuan yang dipersyaratkan
 - (4) Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang diterima.
- c) Pengukuran piutang transfer disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan keuangan apabila telah diperoleh dokumen sumber yang berisi keputusan yang pasti/definitif yang dapat dipertanggungjawabkan terkait pendapatan transfer dimaksud.
- d) Pengukuran piutang ganti rugi sebagai berikut :
- (1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - (2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.



- e) Pengakuan berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi dikurangi penyisihan piutang tak tertagih.

h. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

1) Pengakuan

Pengakuan persediaan terjadi pada saat :

- a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal
- b) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

2) Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar :

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
- b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

i. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

1) Pengakuan

Investasi Jangka Panjang diakui pada saat terdapat pengeluaran berupa kas dan/atau aset selain kas yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan.
- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

2) Pengukuran

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. Pengukuran investasi jangka panjang dilakukan sebagai berikut:

- a) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya.
- b) Investasi non permanen:
 - (1) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan
 - (2) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - (3) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya dinilai sebesar biaya pembangunan.
- c) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh adalah sebesar



biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

- d) Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar sesuai kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal transaksi.

j. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi dalam Pengerjaan.

1) Pengakuan

- a) Pengakuan aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya sebagai berikut:
 - (1) Masa manfaat > dari 12 bulan.
 - (2) Biaya perolehan dapat diukur secara andal terdiri dari harga beli dan setiap biaya yang diatribusikan secara langsung.
 - (3) Peruntukan dan penggunaan tidak untuk dijual dan untuk dipergunakan.
- b) Aset tetap diakui pada saat telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya atau pada saat penguasaannya berpindah;
- c) Klasifikasi aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya yang sudah tidak dipergunakan lagi untuk keperluan operasional pemerintah daerah, maka disajikan di pos "Aset Lainnya" sesuai dengan nilai tercatatnya.
- d) Klasifikasi aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat disajikan dalam aset tetap tersebut melainkan disajikan sebagai "Persediaan".
- e) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:
 - (1) adanya manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - (2) biaya perolehan tersebut dapat diukur dengan handal; dan
 - (3) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- f) Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.

2) Pengukuran

- a) Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Nilai aset tersebut dijumlahkan dengan biaya untuk memperolehnya, yaitu biaya administrasi, pengiriman, pemasangan sampai dengan aset tersebut dapat dipergunakan sesuai peruntukannya, tetapi bila



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

tidak memungkinkan maka dapat dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan;

- b) Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah dan biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap yang bersangkutan;
- c) Biaya perolehan gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:
 - (1) biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku;
 - (2) biaya tidak langsung
- d) peruntukannya, tetapi bila tidak memungkinkan maka dapat dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan;
- e) Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah dan biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap yang bersangkutan;
- f) Biaya perolehan gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:
 - (3) biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku;
 - (4) biaya tidak langsung
- g) Biaya perolehan gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya dalam pengerjaan yang dibangun melalui kontrak konstruksi meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan dan pajak (serta tambahan biaya pengosongan dan pembongkaran untuk aset tetap jalan irigasi dan jaringan)
- h) Nilai perolehan KDP melalui kontrak konstruksi meliputi termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan, kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan, dan pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- i) Dalam pengukuran Aset Tetap pemerintah daerah melaksanakan depresiasi atau penyusutan terhadap nilai aset yang ada, kecuali aset tetap tanah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dalam akun “akumulasi penyusutan” dan “beban penyusutan” dalam laporan operasional.

Aset Bersejarah (*heritage asset*) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa aset tetap ditetapkan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah.

k. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

1) Pengakuan

Dana cadangan diakui pada saat dilakukan penyesuaian uang dan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tentang ketentuan dana cadangan yang dimaksud.

2) Pengukuran



Dana cadangan dinilai sebesar nilai nominal dana cadangan yang dibentuk. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan akan menambah dana cadangan yang bersangkutan, dan biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan bersangkutan.

I. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya diklasifikasikan sebagai berikut: tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud, dan aset lain-lain menjadi kewenangan PPKD serta aset tak berwujud dan aset lain-lain yang menjadi kewenangan SKPD.

1) Pengakuan

- a) Tagihan jangka panjang terdiri dari tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti rugi keuangan daerah.
- b) Tagihan penjualan angsuran diakui ketika terjadinya transaksi penjualan aset daerah yang didukung dokumen berupa perjanjian penjualan secara angsuran atau berita acara penjualan.
- c) Tagihan tuntutan kerugian daerah diakui ketika putusan tentang kasus TGR telah terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian atau ketika adanya dokumen berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- d) Kemitraan dengan pihak ketiga terdiri dari Sewa, Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS), dan Bangun Serah Guna (BSG). Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan. Sedangkan Bangun Serah Guna (BGS) diakui pada saat pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap untuk digunakan/dioperasikan.
- e) Aset tak berwujud meliputi goodwill, lisensi dan frenchise, hak cipta, paten, aset tidak berwujud dalam pengerjaan, dan aset tidak berwujud lainnya berupa software yang diakui pada saat pembelian/perolehan ketika aset tersebut telah siap untuk digunakan/memberikan manfaat; hasil kajian atau penelitian diakui apabila telah siap untuk digunakan dengan cara memberikan manfaat jangka panjang.
- f) Aset lain-lain diakui pada saat aset tetap tersebut dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

2) Pengukuran

- a) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan.
- b) Tuntutan kerugian daerah dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian atau ketika adanya dokumen berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah.
- c) Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari perjanjian/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- d) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dinilai sebesar nilai nominal yang tercantum dalam perjanjian kerjasama pemanfaatan.



- e) Bangun Guna Serah (BGS) dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
- f) Bangun Serah Guna (BGS) dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
- g) Aset Tak Berwujud dinilai sebesar harga perolehan. Aset tak berwujud yang diperoleh dari sumbangan atau donasi dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- h) Salah satu yang termasuk dalam kategori aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke aset lain-lain sebesar nilai buku.

Amortisasi aset tak berwujud lainnya adalah penyusutan terhadap aset tak berwujud lainnya berupa *software* dan kajian/penelitian yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

m. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

1) Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.

2) Pengukuran

Utang pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila utang tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

Dalam penerapan Kebijakan Akuntansi pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. Pemerintah Kota Malang telah melaksanakan seluruh ketentuan yang terdapat dalam peraturan tersebut dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2019 untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Pendapatan	<u>Anggaran TA 2019</u>	<u>Realisasi TA 2019</u>
	2.189.478.934.214,69	2.187.985.479.986,01
Belanja	<u>Anggaran TA 2019</u>	<u>Realisasi TA 2019</u>
	2.654.691.198.906,71	1.909.775.302.319,19

Penjelasan masing-masing pos Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dijelaskan dalam penjabaran berikut.

5.1.1 PENDAPATAN LRA

<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
2.187.985.479.986,01	2.040.194.240.906,67

Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2019 setelah perubahan APBD 2019 (PAK) dianggarkan sebesar Rp2.189.478.934.214,69 dan terealisasi sebesar Rp2.187.985.479.986,01 atau 99,93%, sedangkan apabila dibanding dengan realisasi tahun 2018 meningkat sebesar Rp147.791.239.079,34 atau 7,24% yang terdiri dari:

5.1.1.a PENDAPATAN ASLI DAERAH

<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
588.066.042.351,01	556.888.383.143,67

Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp613.052.028.554,00 terealisasi sebesar Rp588.066.042.351,01 atau 95,92%, sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 terdapat kenaikan Rp31.177.659.207,34 atau sebesar 5,59% dengan rincian sebagai berikut.

1) Pendapatan Pajak Daerah

<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
460.047.450.664,60	434.678.309.679,54

Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 yang dianggarkan sebesar Rp501.144.000.000,00 yang terealisasi sebesar Rp460.047.450.664,60 atau 91,80% apabila dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi tahun 2019 meningkat sebesar Rp25.369.140.985,06 atau 5,83% dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel 5.1.1 Rincian Realisasi Pajak Daerah

dalam rupiah

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2019			Realisasi Tahun 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pajak Hotel	47.500.000.000,00	51.775.202.170,31	109,00	46.888.254.096,30
2	Pajak Restoran	72.744.000.000,00	84.625.288.847,46	116,33	64.714.941.841,28
3	Pajak Hiburan	12.800.000.000,00	14.376.051.768,81	112,31	11.032.068.309,20
4	Pajak Reklame	19.500.000.000,00	24.602.510.249,97	126,17	17.223.257.957,31
5	Pajak Penerangan Jalan	75.000.000.000,00	60.266.068.265,93	80,35	58.555.376.034,42
6	Pajak Parkir	8.500.000.000,00	6.876.031.498,00	80,89	5.702.455.562,00
7	Pajak Air Tanah	1.000.000.000,00	973.745.458,12	97,37	909.865.908,53
8	Pajak BPHTB	205.100.000.000,00	152.113.489.720,00	74,17	171.779.737.664,50
9	Pajak PBB	59.000.000.000,00	64.439.062.686,00	109,22	57.872.352.306,00
	Jumlah	501.144.000.000,00	460.047.450.664,60	91,80	434.678.309.679,54

2) Pendapatan Retribusi Daerah

31 Desember 2019

31 Desember 2018

46.605.703.263,00

50.505.712.055,51

Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 yang dianggarkan sebesar Rp45.187.533.200,00 dan terealisasi sebesar Rp46.605.703.263,00 atau 103,14% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp3.900.008.792,51 atau 7,72%. Terlampauinya target retribusi daerah dikarenakan meningkatnya efektifitas penagihan retribusi dengan pemanfaatan teknologi seperti yang digunakan dalam memungut retribusi pelayanan pasar dengan e-retribusinya dan meningkatnya jumlah wajib retribusi seperti retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Adapun rincian pendapatan retribusi daerah sebagai berikut.

Tabel 5.1.2. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah

dalam rupiah

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2019			Realisasi Tahun 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
I	Retribusi Jasa Umum	31.030.786.000,00	30.905.960.903,00	103,14	36.236.327.275,51
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	1.053.786.000,00	1.795.559.000,00	170,39	7.374.908.748,00
2	Ret. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	11.000.000.000,00	12.323.054.500,00	112,03	11.485.924.000,00
3	Ret. Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	9.352.000.000,00	7.592.357.000,00	81,18	6.854.976.000,00
4	Ret. Pelayanan Pasar	5.780.000.000,00	6.800.724.403,00	117,66	6.034.947.630,00
5	Ret. Pengujian Kendaraan Bermotor	2.700.000.000,00	2.320.466.000,00	85,94	2.921.608.000,00
6	Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.100.000.000,00	0,00	0,00	1.508.762.897,51
8	Ret. Pengolahan Limbah	45.000.000,00	73.800.000,00	164,00	55.200.000,00
II	Retribusi Jasa Usaha	4.498.000.000,00	4.252.374.450,00	94,54	4.848.644.380,00
1	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	3.133.000.000,00	2.692.625.350,00	85,94	3.430.708.580,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2019			Realisasi Tahun 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
2	Ret. Terminal	57.000.000,00	119.825.000,00	210,22	21.180.000,00
3	Ret. Tempat Khusus Parkir	648.000.000,00	771.713.000,00	119,09	658.890.000,00
4	Ret. Tempat Rekreasi dan Olah Raga	660.000.000,00	668.211.100,00	101,24	737.865.800,00
5	Ret. Pengolahan Limbah Cair	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Retribusi Perijinan Tertentu	9.658.747.200,00	11.447.367.910,00	118,52	9.420.740.400,00
1	Ret. Ijin Mendirikan Bangunan	9.450.000.000,00	10.949.722.910,00	115,87	9.107.752.300,00
2	Ret. Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	90.000.000,00	0,00	0,00	85.296.500,00
3	Ret. Ijin Trayek	118.747.200,00	54.620.000,00	46,00	66.630.000,00
4	Ret. Perijinan Rumah Susun	0,00	443.025.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	45.187.533.200,00	46.605.703.263,00	103,14	50.505.712.055,51

3) **Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
28.559.431.165,39	24.792.410.715,90

Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan dari hasil perusahaan daerah dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2019 yang dianggarkan sebesar Rp22.585.915.478,00 dan terealisasi sebesar Rp28.559.431.165,39 atau 126,45%, sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp3.767.020.449,49 atau 15,19%. Kontribusi terbesar berasal dari PDAM sebesar Rp23.604.543.251,00 atau terealisasi sebesar 104,51% hal tersebut dikarenakan PDAM Kota Malang membukukan laba diatas target yang telah ditentukan sehingga bagi hasil yang disetor juga meningkat, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.3 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam rupiah

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2019			Realisasi Tahun 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	PDAM	22.467.481.607,00	23.604.543.251,00	104,51	19.938.996.407,00
2	PD Rumah Potong Hewan	118.433.871,00	0,00	0,00	62.566.753,00
3	PD. BPR	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bank Jatim	0,00	4.954.887.914,39	0,00	4.790.847.555,90
	Jumlah	22.585.915.478,00	28.559.431.165,39	126,45	24.792.410.715,90

4) **Lain-lain PAD Yang Sah**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
52.853.457.258,02	46.911.950.692,72

Jumlah tersebut merupakan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2019 yang dianggarkan sebesar Rp44.134.579.876,00 dan terealisasi sebesar Rp52.853.457.258,02 atau 119,76% sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp5.941.506.565,30 atau 12,66%. Kontribusi terbesar atas selisih anggaran dan realisasi adalah salah



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

satunya realisasi penerimaan jasa giro yang mencapai 320,65% dari target anggaran yang ditetapkan. Adapun rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagai berikut.

Tabel 5.1.4 Rincian Lain-lain PAD Yang Sah

dalam rupiah

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2019			Realisasi Tahun 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	0,00	521.263.739,00	0,00	378.631.024,00
2	Penerimaan Jasa Giro	3.500.000.000,00	11.222.718.301,32	320,65	11.698.700.426,15
3	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	85.071.600,86	0,00	14.058.655,25
4	Pendapatan Denda Pajak	0,00	1.896.957.579,00	0,00	2.129.278.288,00
5	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	334.573.737,74	0,00	278.832.880,54
6	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan tertentu	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Pendapatan dari Pengembalian	1.601.782.000,00	3.924.369.088,62	245,00	8.937.642.477,78
8	Pendapatan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	4.400.000.000,00	5.157.783.272,80	117,22	5.050.590.691,00
9	Dana Kapitasi JKN	17.648.424.000,00	16.683.710.325,00	94,53	18.419.552.250,00
10	Pendapatan dari denda Pemanfaatan Kekayaan Daerah	0,00	33.517.400,00	0,00	4.664.000,00
11	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah	14.484.373.876,00	12.993.492.213,68	89,71	0,00
12	Pendapatan dari Penggantian Lahan Makam	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dana BOS SD Kecamatan Klojen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dana BOS SD Kecamatan Blimbing	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dana BOS SD Kecamatan Kedungkandang	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dana BOS SD Kecamatan Lowokwaru	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dana BOS SD Kecamatan Sukun	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dana BOS SMP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	44.134.579.876,00	52.853.457.258,02	119,76	46.911.950.692,72

5.1.1.b PENDAPATAN TRANSFER

31 Desember 2019	31 Desember 2018
1.532.844.037.635,00	1.414.488.577.763,00

Jumlah realisasi diatas adalah realisasi Pendapatan Transfer tahun 2019 yang dianggarkan sebesar Rp 1.508.604.705.660,60 dan terealisasi sebesar 1.532.844.037.635,00 atau 101,60%, yang terdiri dari:

1) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

31 Desember 2019	31 Desember 2018
1.203.245.896.321,00	1.181.289.819.588,00

Jumlah tersebut adalah realisasi Dana Perimbangan tahun 2019 yang dianggarkan sebesar Rp1.248.350.502.150,60 dan terealisasi sebesar Rp1.203.245.896.321,00 atau 96,39% sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

mengalami kenaikan sebesar Rp21.956.076.733,00 atau 1,85% dengan rincian sebagai berikut.

a) **Pendapatan Bagi Hasil Pajak**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
41.088.807.989,00	59.220.052.598,00

Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak tahun 2019 yang dianggarkan sebesar Rp61.050.664.000,00 dan terealisasi sebesar Rp41.088.807.989,00 atau 67,30%, Untuk dana bagi hasil pajak, dianggarkan sebesar Rp61.050.664.000,00 sesuai dengan pagu alokasi dalam Perpres Nomor 129/2019 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 sedangkan realisasi sebesar Rp41.088.807.989,00 adalah penerimaan sampai dengan tribulan 3 sehingga masih terdapat kekurangan alokasi tribulan 4 yang belum diterima oleh Pemerintah Kota Malang sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp18.131.244.609,00 atau 30,61% Adapun rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.5 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Pusat

dalam rupiah

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2019			Realisasi Tahun 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	5.793.216.000,00	4.430.229.700,00	76,47	4.861.216.134,00
2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh. Pasal 21	55.257.448.000,00	36.658.578.289,00	66,34	54.358.836.464,00
Total		61.050.664.000,00	41.088.807.989,00	67,30	59.220.052.598,00

b) **Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak /Sumber Daya Alam (SDA)**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
89.771.535.806,00	93.140.141.495,00

Jumlah tersebut adalah realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA yang dianggarkan pada tahun 2019 sebesar Rp86.541.460.188,00 dan terealisasi sebesar Rp89.771.535.806,00 atau 103,73%. Selisih anggaran dari realisasi dikarenakan adanya pembayaran kurang bayar DBH bukan pajak/SDA tahun-tahun sebelumnya sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp3.368.605.689,00 atau 3,61%. Adapun rincian Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel 5.1.6 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA

dalam rupiah

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2019			Tahun 2018
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Alam Kehutanan	234.970.000,00	140.982.000,00	30,00	250.178.053,00
2	Bagi Hasil Pungutan Pengusahaan Perikanan	0,00	0,00	-	701.234.591,00
3	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	983.593.000,00	590.155.800,00	60,00	0,00
4	Bagi Hasil SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	50.570.238.188,00	54.504.315.307,00	107,78	65.667.268.617,00
5	Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum	0,00	0,00	-	814.447.240,00
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	33.739.000,00	34.775.673,00	103,07	31.203.994,00
7	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	33.907.556.000,00	33.933.352.226,00	100,08	25.675.809.000,00
8	Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00	0,00	-	0,00
9	Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	811.364.000,00	567.954.800,00	70,00	0,00
Total		86.541.460.188,00	89.771.535.806,00	103,70	93.140.141.495,00

c) Dana Alokasi Umum (DAU)

31 Desember 2019	31 Desember 2018
886.503.661.000,00	844.477.164.310,00

Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum tahun 2019 yang dianggarkan sebesar Rp886.503.661.000,00 dan terealisasi sebesar Rp886.503.661.000,00 atau 100%. Perhitungan DAU didasarkan celah fiskal per daerah secara nasional yang besarnya ditentukan Pemerintah Pusat. Dana Alokasi umum apabila dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp42.026.496.690,00 atau 4,97%. Adapun selisih tahun 2018 dan 2019 yang cukup signifikan salah satunya adalah alokasi DAU tambahan untuk pendanaan Kelurahan sebesar Rp20.117.637.000,00.

d) Dana Alokasi Khusus (DAK)

31 Desember 2019	31 Desember 2018
185.881.891.526,00	184.452.461.185,00

Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus tahun 2019 yang dianggarkan sebesar Rp214.254.716.962,60 dan terealisasi sebesar Rp185.881.891.526,00 atau 86,76%, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp1.429.430.341,00 atau 0,77% dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel 5.1.7 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) – Pusat

dalam rupiah

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2019			Realisasi Tahun 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
I	Dana Alokasi Khusus	55.889.178.962,60	43.940.137.786,00	78,62	35.225.633.359,00
1	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	22.549.564.000,00	16.156.099.900,00	71,65	0,00
2	DAK Bidang Pendidikan	6.725.642.962,60	7.011.418.649,00	104,25	0,00
3	DAK Bidang Perumahan dan Permukiman	1.065.751.000,00	0,00		0,00
4	DAK Bidang Sanitasi	5.712.003.000,00	5.212.003.000,00	91,25	0,00
5	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	698.655.960,00
6	DAK Bidang Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
7	DAK Bidang Pendidikan (SD/SDLB)	0,00	0,00	0,00	2.860.061.150,00
8	DAK Bidang Kesehatan dan KB (Pelayanan Dasar)	3.555.175.000,00	4.797.302.502,00	134,94	5.140.521.879,00
9	DAK Bidang Kesehatan dan KB (Pelayanan Rujukan)	4.329.109.000,00	3.720.928.837,00	85,95	2.443.695.971,00
10	DAK Bidang Kesehatan dan KB (Pelayanan Kefarmasian)	2.394.939.000,00	0,00	0,00	731.755.449,00
11	DAK Bidang Kesehatan dan KB (Keluarga Berencana)	1.515.796.000,00	0,00	0,00	340.219.050,00
12	DAK Bidang Perumahan Air Minum dan Sanitasi (Air Minum)	3.390.000.000,00	2.618.602.000,00	77,24	1.277.865.000,00
13	DAK Bidang Perumahan Air Minum dan Sanitasi (Sanitasi)	0,00	0,00	0,00	1.246.627.200,00
14	DAK Bidang Kedaulatan Pangan (Pertanian)	0,00	0,00	0,00	596.509.950,00
15	DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lingkungan.Hidup)	792.958.000,00	733.700.000,00	92,53	0,00
16	DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kehutanan)	0,00	0,00	0,00	0,00
17	DAK Bidang Transportasi (Perhubungan)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	DAK Bidang Sarana Prasarana Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
19	DAK Bidang Sarana Prasarana Penunjang (Jalan)	0,00	0,00	0,00	13.996.479.000,00
20	DAK Bidang Infrastruktur Publik Daerah (IPD)	0,00	780.191.550,00	0,00	00,0
21	DAK Penataan Kawasan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	00,0
22	DAK Bidang Pendidikan (SMP)	0,00	0,00	0,00	598.720.750,00
23	DAK Bidang Pasar	2.954.218.000,00	2.271.500.796,00	76,89	3.569.878.000,00
24	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	0,00	0,00	0,00	1.724.644.000,00
25	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi (Pendukung Kedaulatan Pangan)	904.023.000,00	638.390.552,00	70,62	0,00
II	DAK Non Fisik	158.365.538.000,00	141.941.753.740,00	89,63	149.226.827.826,00
1	Tunjangan Profesi Guru PNSD	119.633.585.000,00	107.799.847.340,00	90,11	117.846.538.270,00
2	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	254.100.000,00	0,00	0,00	298.800.000,00
3	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	17.321.400.000,00	14.997.000.000,00	86,58	17.639.400.000,00
4	Bantuan Operasional Kesehatan	9.729.622.000,00	11.472.855.564,00	117,92	10.903.548.524,00
5	Jaminan Persalinan	1.257.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.276.803.000,00	794.136.283,00	62,20	1.023.173.292,00
7	Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah	470.000.000,00	470.000.000,00	100,00	0,00
8	Akreditasi Puskesmas	1.948.940.000,00	0,00		0,00
9	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.723.050.000,00	1.656.876.553,00	96,16	1.515.367.740,00
10	Museum	450.000.000,00	450.000.000,00	100,00	0,00
11	Dana Pelayanan Kepariwisata	913.038.000,00	913.038.000,00	100,00	0,00
12	BOP Pendidikan Kesetaraan	3.388.000.000,00	3.388.000.000,00	100,00	0,00
	Total	214.254.716.962,60	185.881.891.526,00	86,76	184.452.461.185,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Sesuai dengan Perpres Nomor 129/2019 tentang Rincian APBN TA. 2019 Pemerintah Kota Malang mendapatkan alokasi DAK yang terdiri dari : 1) DAK fisik dengan alokasi Rp57.095.627.000,00 ; 2) DAK non fisik dengan alokasi Rp158.365.538.000,00 sehingga total alokasi DAK untuk Pemerintah Kota Malang adalah sebesar Rp215.461.165.000,00. Dalam APBD Kota Malang TA. 2019 penerimaan DAK ditargetkan sebesar Rp214.254.716.962,60 sehingga ada perbedaan dengan alokasi yang ditetapkan di APBN sebesar Rp1.206.448.037,40. Perbedaan ini terdapat pada pos DAK fisik bidang pendidikan dimana dalam rincian APBN dialokasikan sebesar Rp7.932.091.000,00, tetapi di APBD dianggarkan sebesar Rp6.725.642.962,60

Sehingga, realisasi penerimaan DAK apabila didasarkan pada alokasi APBN adalah sebesar 86,27%, sedangkan apabila didasarkan pada APBD adalah sebesar 86,76%. Selisih realisasi dengan target penerimaan dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut.

DAK Fisik :

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2019 tentang perubahan ketiga atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa pasal 81 ayat (1) angka 4, salah satu syarat penyaluran DAK fisik adalah daftar kontrak kegiatan yang meliputi rincian kontrak, data bukti pemesanan barang atau sejenisnya, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/atau data kegiatan dana penunjang.

Daftar kontrak dimaksud dientri pada aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) dimana nilai kontrak yang dientri merupakan acuan nilai DAK Fisik yang akan disalurkan dari pusat melalui KPPN di daerah.

Adapun penyaluran DAK Fisik memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Tahap I sebesar 25% dari alokasi yang ditetapkan;
2. Tahap II sebesar 45% dari alokasi yang ditetapkan;
3. Tahap III sebesar selisih dari nilai kontrak kegiatan dengan dana yang sudah disalurkan pada tahap I dan tahap II;
4. Apabila nilai kontrak kegiatan kurang dari atau sama dengan 70% dari pagu alokasi, maka DAK tahap III tidak disalurkan.

Pada tahun anggaran 2019 nilai kontrak kegiatan Pemerintah Kota Malang yang dibiayai dengan DAK yang telah dikirim/dientri melalui aplikasi OMS PAN adalah sebesar Rp43.447.196.088,00 sehingga potensi penerimaan DAK Fisik Maksimal adalah Rp43.447.196.088,00 atau hanya 76,10% dari alokasi yang ditetapkan.

Penerimaan riil DAK Fisik adalah sebesar Rp43.940.137.786,00 atau 76,96% dari alokasi, sehingga ada selisih lebih sebesar Rp492.941.698,00 dimana selisih ini ada di bidang kesehatan dan KB (reguler) yang mendapat penyaluran tahap I dan II sebesar Rp4.012.505.700,00 sedangkan nilai kontrak hanya sebesar Rp3.519.564.002,00.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Adapun rincian alokasi, nilai kontrak dan realisasi penyaluran DAK fisik adalah sebagai berikut.

1. Bidang Pendidikan, alokasi Rp7.932.091.000,00 nilai kontrak Rp7.011.418.649,00 (88,39% dari alokasi) realisasi penerimaan Rp7.011.418.649,00 (tahap I, II dan III);
2. Bidang Kesehatan dan KB (reguler) selain subbidang Kesehatan Rujukan alokasi Rp5.732.151.000,00 nilai kontrak Rp3.519.564.002,00 (61,40% dari alokasi), realisasi penerimaan Rp4.012.505.700,00 (hanya disalurkan tahap I dan tahap II);
3. Bidang Kesehatan dan KB (subbidang Kesehatan Rujukan) alokasi Rp4.329.109.000,00 nilai kontrak Rp3.720.928.837,00 (85,95% dari alokasi) realisasi penerimaan Rp3.720.928.837,00 (sekaligus);
4. Bidang Sanitasi alokasi Rp5.712.003.000,00 nilai kontrak Rp5.212.003.000,00 (91,25% dari alokasi) realisasi penerimaan Rp5.212.003.000,00 (tahap I,II dan III);
5. Bidang Jalan alokasi Rp22.549.564.000,00 nilai kontrak Rp16.156.099.900,00 (71,65% dari alokasi) realisasi penerimaan Rp16.156.099.900,00 (tahap I, II, dan III);
6. Bidang Perumahan dan Permukiman alokasi Rp1.065.751.000,00 nilai kontrak Rp0,00 realisasi penerimaan Rp0,00;
7. Bidang Kesehatan (Penugasan) Alokasi Rp1.733.759.000,00 nilai kontrak Rp1.564.988.352,00 (90,27% dari alokasi) realisasi penerimaan Rp1.564.988.352,00 (tahap I, II, dan III);
8. Bidang Air minum alokasi Rp3.390.000.000, nilai kontrak Rp2.618.602.000,00 (77,24% dari alokasi) realisasi penerimaan Rp2.618.602.000,00;
9. Bidang pasar alokasi Rp2.954.218.000,00 nilai kontrak Rp2.271.500.796,00 (76,89% dari alokasi) realisasi penerimaan Rp2.271.500.796,00 (tahap I,II dan III);
10. Bidang irigasi alokasi Rp904.023.000,00 nilai kontrak Rp638.390.552,00 (70,62% dari alokasi) realisasi penerimaan Rp638.390.552,00 (sekaligus);
11. Bidang lingkungan hidup alokasi Rp792.958.000,00 nilai kontrak Rp733.700.000,00 (92,53% dari alokasi) realisasi penerimaan Rp733.700.000,00 (sekaligus).

DAK Non Fisik :

Penyaluran DAK non fisik mengacu pada PMK Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Non Fisik dimana pada pasal 44 ayat (2) disebutkan bahwa sisa DAK Non Fisik selain TPG dan Tamsil diperhitungkan dengan penyaluran masing-masing dana pada tahun anggaran berikutnya (menjadi unsur pengurang alokasi di tahun anggaran berikutnya).

Adapun sisa DAK non fisik sampai dengan tahun anggaran 2018 (selain TPG dan Tamsil) adalah sebesar Rp4.335.946.600,00 sehingga dari total alokasi DAK non fisik (selain TPG dan Tamsil) sebesar Rp38.477.853.000,00, potensi penerimaan maksimal adalah sebesar Rp34.141.906.400,00 atau 88,73% dari alokasi. Dari potensi ini telah disalurkan Rp34.141.906.400,00 atau 100%.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Untuk penyaluran dana TPG dilakukan dengan berdasarkan data jumlah guru PNSD yang sudah bersertifikasi profesi dikalikan dengan gaji pokok selama 12 bulan. Sedangkan penyaluran dana Tamsil dilakukan berdasarkan jumlah guru PNSD yang belum bersertifikasi profesi dikalikan dengan alokasi dana Tamsil per orang per bulan selama dua belas bulan.

Penyaluran dana TPG dan Tamsil tersebut juga memperhitungkan sisa dana Tahun Anggaran sebelumnya yang ada di kas daerah, kurang salur tahun-tahun anggaran sebelumnya, dan toleransi kekurangan bayar sebesar 5%.

Data-data dimaksud di dapat dari rekonsiliasi yang dilakukan antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Departemen Keuangan c.q. Ditjen Perimbangan Keuangan dengan melibatkan stake holder di daerah, sehingga potensi penerimaan dari TPG dan Tamsil dapat tidak sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari hasil rekonsiliasi, untuk kebutuhan dana TPG Pemerintah Kota Malang adalah sebesar Rp117.586.696.800,00, sedangkan sisa dana TPG TA. Sebelumnya di kas daerah adalah sebesar Rp9.786.849.460,00, sehingga potensi penerimaan maksimal dana TPG adalah sebesar Rp107.799.847.340,00 atau 90,11% dari alokasi yang ditetapkan. Sedangkan kebutuhan sisa dana Tamsil adalah sebesar Rp899.650.000,00 dengan kebutuhan dana sebesar Rp273.250.000,00 sehingga potensi penerimaan dana Tamsil adalah Rp0,00 mengingat sisa dana yang tersedia lebih besar dari kebutuhan selama satu tahun anggaran.

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa potensi penerimaan maksimal dari DAK fisik dan non fisik adalah sebesar Rp185.388.949.828,00 atau 86,04% dari alokasi APBN dan 86,53% dari target APBD. Sedangkan realisasi penerimaan riil sebesar Rp185.881.891.526,00 terjadi karena ada selisih lebih penyaluran DAK fisik bidang kesehatan dan KB (reguler) sebesar Rp492.941.698,00.

2) **Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
73.871.078.000,00	25.500.000.000,00

Jumlah tersebut adalah realisasi penerimaan Dana Penyesuaian tahun 2019 yang dianggarkan sebesar Rp73.871.078.000,00 atau terealisasi sebesar Rp73.871.078.000,00 atau 100%, sedangkan realisasi dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp48.371.078.000,00 atau 189,69% disebabkan penetapan alokasi Dana Insentif Daerah didasarkan pada penilaian atas parameter-parameter sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 beserta perubahan-perubahannya (untuk Tahun Anggaran 2019) serta PMK No. 141/PMK.07/2019 yang mencabut PMK No. 50/PMK.07/2017 beserta perubahan Penilaian atas parameter-parameter dimaksud dapat naik/turun sesuai dengan capaian di daerah. Sehingga alokasi DID juga dapat berubah sesuai dengan berubahnya nilai atas parameter-parameter tersebut Penilaian atas parameter-parameter dimaksud dapat naik/turun sesuai dengan capaian di daerah. Sehingga alokasi DID juga dapat berubah sesuai



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

dengan berubahnya nilai atas parameter-parameter tersebut. Adapun rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebagai berikut.

Tabel 5.1.8 Rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - Pusat

dalam rupiah

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2019			Realisasi Tahun 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dana Insentif Daerah	73.871.078.000,00	73.871.078.000,00	100,00	25.500.000.000,00
3	Dana Transfer Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		73.871.078.000,00	73.871.078.000,00	100,00	25.500.000.000,00

3) Transfer Pemerintah Provinsi

31 Desember 2019	31 Desember 2018
255.727.063.314,00	207.698.758.175,00

Jumlah tersebut adalah realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi tahun 2019 yang dianggarkan sebesar Rp186.383.125.510,09 dan terealisasi sebesar Rp255.727.063.314,00 atau 137,21% sedangkan apabila dibandingkan realisasi tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp48.028.305.139,00 atau 23,12% yang terdiri dari:

a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak

31 Desember 2019	31 Desember 2018
252.268.704.314,00	204.361.428.175,00

Jumlah tersebut adalah realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun 2019 yang dianggarkan sebesar Rp182.924.766.510,09 atau terealisasi sebesar Rp252.268.704.314,00 atau 137,91% sedangkan selisih dengan tahun 2018 yang mengalami kenaikan sebesar Rp47.907.276.139,00 atau 23,44% hal tersebut dikarenakan penyaluran dana transfer bagi hasil dari Pemerintah Provinsi dilakukan setiap tribulan setelah memperhitungkan realisasi penerimaan di Kas Daerah Provinsi dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur yang diterbitkan setiap periode penyaluran. Sedangkan penetapan target penerimaan dilakukan berdasarkan perhitungan potensi penerimaan pada pos dimaksud, sehingga besar kemungkinan ada perbedaan yang signifikan antara target dan realisasi penerimaan, ataupun antara penerimaan tahun anggaran berkenaan dengan tahun anggaran sebelumnya/setelahnya.

Tabel 5.1.9 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak - Provinsi

dalam rupiah

No.	Uraian	Tahun 2019			Realisasi Tahun 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	67.561.873.893,00	95.320.863.266,00	141,09	69.123.469.842,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	39.136.845.474,00	58.211.351.496,00	148,74	48.280.565.624,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	50.420.608.155,00	62.266.594.435,00	123,49	50.678.173.429,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	175.559.288,00	251.658.369,00	143,35	204.624.278,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

No.	Uraian	Tahun 2019			Realisasi Tahun 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
5	Bagi Hasil Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT)	0,00	00,0	0,00	00,0
6	Bagi Hasil Sumbangan Pihak Ketiga (SP III)	0,00	00,0	0,00	00,0
7	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	25.629.879.700,09	36.218.236.748,00	141,31	36.074.595.002,00
Jumlah		182.924.766.510,09	252.268.704.314,00	137,91	204.361.428.175,00

b) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

31 Desember 2019	31 Desember 2018
3.458.359.000,00	3.337.330.000,00

Jumlah tersebut adalah bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Timur tahun 2019 yang dianggarkan sebesar Rp3.458.359.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.458.359.000,00 atau 100,00%, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp121.029.000,00 atau 3,63%.

5.1.1.c LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

31 Desember 2019	31 Desember 2018
67.075.400.000,00	68.817.280.000,00

Jumlah realisasi diatas adalah realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Yang Sah tahun 2019 yang dianggarkan sebesar Rp67.822.200.000,00 atau terealisasi sebesar Rp67.075.400.000,00 atau 98,90% sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp1.741.880.000,00 atau 2,53%.

1) Pendapatan Hibah

31 Desember 2019	31 Desember 2018
67.075.400.000,00	68.817.280.000,00

Jumlah tersebut adalah realisasi Pendapatan Hibah tahun 2019 yang dianggarkan sebesar Rp67.822.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp67.075.400.000,00 atau 98,90%. Hibah tersebut berupa Hibah Bosnas tahun 2019 sebesar Rp67.075.400.000,00 dengan rincian SD Negeri sebesar Rp44.190.600.000,00 dan SMP Negeri sebesar Rp22.884.800.000,00, sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp1.741.880.000,00 atau 2,53%.

5.1.2. BELANJA

31 Desember 2019	31 Desember 2018
1.909.775.302.319,19	1.925.070.651.868,55

Belanja Daerah Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp1.909.775.302.319,19 dari anggaran sebesar Rp2.654.691.198.906,71 atau terealisasi 71,94%, sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp15.295.349.549,36 atau 0,79% yang terdiri dari:



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

5.1.2.a BELANJA OPERASI

31 Desember 2019	31 Desember 2018
1.669.892.391.899,53	1.573.833.302.429,69

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp1.669.892.391.899,53 dari anggaran sebesar Rp1.879.833.045.970,00 atau terealisasi sebesar Rp1.669.892.391.899,53 atau 88,83%, sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp96.059.089.469,84 atau 6,10% dengan rincian sebagai berikut.

1) Belanja Pegawai

31 Desember 2019	31 Desember 2018
791.508.273.117,88	761.211.732.403,01

Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp791.508.273.117,88 dari anggaran sebesar Rp865.923.220.800,09 atau 91,41%. Capaian realisasi tersebut dikarenakan tidak terserapnya anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai PNS yang dasar pemberiannya atas kinerja masing-masing PNS sedangkan perbedaan realisasi tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp30.296.540.714,87 atau 3,98% disebabkan antara lain karena adanya kenaikan gaji PNS di tahun 2019 Rincian Belanja Pegawai sebagai berikut.

Tabel 5.1.10 Rincian Belanja Pegawai

dalam rupiah

No	Jenis Belanja	Tahun 2019			Realisasi Tahun 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Tidak Langsung				
	Gaji dan Tunjangan	608.496.523.384,09	579.290.484.716,00	95,20	571.641.753.184,00
	Tambahan Penghasilan PNS	202.050.392.506,00	168.869.619.231,50	83,58	146.435.318.162,75
	Penerimaan Lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	8.538.000.000,00	8.516.797.400,00	99,75	7.497.000.000,00
	Insentif pemungutan pajak daerah	25.057.200.000,00	17.294.877.000,00	69,02	19.792.542.061,00
	Insentif pemungutan retribusi daerah	2.268.326.210,00	2.076.708.420,38	91,55	1.910.466.545,26
	Jumlah 1	846.410.442.100,09	776.048.486.767,88	64,62	747.277.079.953,01
2	Belanja Langsung				
	Uang Lembur	19.512.778.700,00	15.459.786.350,00	79,23	13.934.652.450,00
	Jumlah 2	19.512.778.700,00	15.459.786.350,00	79,23	13.934.652.450,00
	Jumlah 1 + 2	865.923.220.800,09	791.508.273.117,88	91,41	761.211.732.403,01

2) Belanja Barang

31 Desember 2019	31 Desember 2018
775.898.397.761,65	734.640.438.498,41

Belanja Barang terealisasi sebesar Rp775.898.397.761,65 dari anggaran sesudah direklasifikasi sebesar Rp902.470.580.979,91 atau 85,97% sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp41.257.959.263,24 atau 5,61% . Terdapat beberapa belanja yang berkontribusi besar terhadap selisih anggaran dan realisasi seperti belanja perjalanan dinas,



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

belanja jasa kantor dan belanja makanan dan minuman yang terjadi karena beberapa alasan seperti efisiensi ataupun kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Rincian Belanja Barang Tahun Anggaran 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.11 Rincian Belanja Barang

dalam rupiah

Jenis Belanja	Tahun 2019			Realisasi Tahun 2018
	Anggaran	Realisasi	%	
Honorarium PNS	51.531.345.684,94	43.253.629.478,00	83,94	47.145.272.965,03
Honorarium Non PNS	136.114.603.868,81	132.221.526.062,00	97,14	102.537.042.520,54
Belanja Pegawai BLUD	6.637.977.920,60	0,00	0,00	0,00
Belanja Pegawai Dana BOS	6.123.173.000,00	32.920.000,00	0,54	0,00
Belanja bahan pakai habis	30.606.710.065,80	27.978.788.512,00	91,41	54.964.916.044,00
Belanja bahan/material	75.600.483.440,47	64.353.058.185,92	85,12	47.249.361.372,24
Belanja jasa kantor	194.972.553.125,82	168.575.865.223,72	86,46	148.088.304.430,59
Belanja Premi Asuransi	16.922.886.889,00	16.373.207.445,50	96,75	10.573.450.188,80
Belanja perawatan kendaraan bermotor	11.441.417.962,00	10.133.520.707,00	88,57	10.579.150.579,00
Belanja cetak dan penggandaan	30.106.400.602,63	26.195.815.607,00	87,01	45.958.738.983,00
Belanja sewa rumah/gedung/ gudang/ parkir	21.798.740.700,00	18.398.780.316,00	84,40	19.103.724.193,00
Belanja sewa sarana mobilitas	3.303.888.609,00	2.818.815.655,00	85,32	3.006.292.800,00
Belanja Sewa Alat Berat	41.610.000,00	31.320.000,00	75,27	30.420.000,00
Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	7.610.569.650,00	5.057.489.555,00	66,45	5.545.575.575,00
Belanja makanan dan minuman	40.307.097.080,00	31.429.144.786,00	77,97	32.512.071.645,00
Belanja pakaian dinas dan atributnya	4.263.274.000,00	1.543.424.000,00	36,20	1.453.953.300,00
Belanja pakaian kerja	4.214.664.500,00	3.679.069.617,00	87,29	4.087.242.797,47
Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.938.062.200,00	3.505.068.700,00	89,00	5.069.018.720,00
Belanja perjalanan dinas	107.215.493.350,00	75.852.062.542,15	70,75	76.707.800.276,74
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	7.424.505.850,00	6.351.001.050,00	85,54	5.929.215.000,00
Belanja pemeliharaan	52.619.997.904,84	48.180.860.376,72	91,56	91.414.620.409,00
Belanja jasa konsultasi	27.670.952.819,00	23.299.407.949,00	84,20	22.673.866.699,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	54.598.631.757,00	58.117.784.700,50	106,45	10.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	7.405.540.000,00	8.515.837.293,14	114,99	0,00
Jumlah	902.470.580.979,91	775.898.397.761,65	85,97	734.640.438.498,41

Hibah berupa barang dianggarkan dan direalisasikan sebagai Belanja Barang dan Jasa masing-masing SKPD terkait, namun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, maka di Laporan Realisasi Anggaran dikonversi menjadi Belanja Hibah.

Terdapat kenaikan yang signifikan atas realisasi Belanja Barang antara tahun 2018 sebesar Rp734.640.438.498,41 menjadi Rp775.898.397.761,65 pada tahun 2019. Hal tersebut disebabkan meningkatnya anggaran atas Belanja Barang pada APBD Pemerintah Kota Malang TA 2019 dan meningkatnya kebutuhan atas belanja operasional untuk mendukung fungsi dan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Selain realisasi belanja barang sebesar Rp775.898.397.761,65 tersebut, terdapat pengeluaran atas belanja makan minum pasien pada empat Puskesmas yaitu sebesar Rp26.913.000,00 dari dana hasil klaim RITP dan RJTP terdiri dari :



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

No	Puskesmas	Realisasi Makan Minum Pasien (Rp)
1	Puskesmas Dinoyo	17.493.000,00
2	Puskesmas Kedungkandang	2.640.000,00
3	Puskesmas Mulyorejo	3.450.000,00
4	Puskesmas Polowijen	3.330.000,00
Jumlah		26.913.000,00

Belanja barang tersebut tidak termasuk belanja yang direalisasikan pada Belanja Modal sebesar Rp1.109.964.323,00 dengan rincian sebagai berikut.

No.	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Perhubungan	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Lainnya Berupa Pengadaan Zebra Cross dan Pita Pengaduh	210.403.400,00	Tidak menambah masa manfaat aset
2	Dinas Perhubungan	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Lainnya Berupa Pengadaan Pengecatan Fasilitas Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	210.107.600,00	Tidak menambah masa manfaat aset
3	Dinas Perhubungan	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Lainnya Berupa Pengadaan Pengecatan Marka Jalan	211.944.200,00	Tidak menambah masa manfaat aset
4	Dinas Perhubungan	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Lainnya Berupa Pengadaan Fasilitas Parkir	203.212.200,00	Tidak menambah masa manfaat aset
5	Dinas Perhubungan	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Lainnya Berupa Pengadaan Pengecatan Fasilitas Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	176.031.923,00	Tidak menambah masa manfaat aset
6	Kelurahan Rampal Celaket	Belanja Modal pengadaan lampu penerangan jalan umum	20.000.000,00	Diserahkan ke masyarakat
7	Kelurahan Kauman	Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	46.050.000,00	Pemeliharaan aset dibawah nilai kapitalisasi aset
8	Kelurahan Kebonsari	Belanja Modal pengadaan tong komposter dan tong sampah	32.215.000,00	Diserahkan ke masyarakat
			1.109.964.323,00	

3) **Belanja Bunga**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
0,00	0,00

Jumlah tersebut adalah realisasi Belanja Bunga Tahun 2019 yang dianggarkan sebesar Rp0,00 atau terealisasi sebesar 0,00%.

4) **Belanja Subsidi**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
0,00	0,00

Belanja Subsidi terealisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00 atau terealisasi sebesar 0,00%.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

5) **Belanja Hibah**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
101.823.026.287,00	77.345.867.733,27

Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp101.823.026.287,00 dari anggaran sebesar Rp109.225.515.490,00 atau terealisasi sebesar 93,22%, sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp24.477.158.553,73 atau 31,64%. Adapun rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.12. Rincian Belanja Hibah

dalam rupiah

No	Jenis Belanja	Tahun 2019			Realisasi Tahun 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
a.	Hibah Berupa Uang	80.645.217.200,00	73.710.379.600,00	91,40	
1	Belanja Hibah kepada organisasi/lembaga pendidikan	63.757.050.000,00	57.143.990.000,00	89,63	51.643.080.000,00
2	Belanja Hibah kepada Organisasi /Lembaga Kemasyarakatan	16.888.167.200,00	16.566.389.600,00	98,09	21.295.905.333,27
b.	Hibah Berupa Barang	28.580.298.290,00	28.112.646.687,00	98,36	
1	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/ Pihak Ketiga	28.580.298.290,00	28.112.646.687,00	98,36	4.406.882.400,00
Jumlah		109.225.515.490,00	101.823.026.287,00	93,22	77.345.867.733,27

Hibah berupa barang dianggarkan dan direalisasikan sebagai Belanja Barang dan Jasa masing-masing SKPD terkait, namun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, maka di Laporan Realisasi Anggaran dikonversi menjadi Belanja Hibah. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah berupa barang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1.13. Rincian Belanja Hibah Barang

dalam rupiah

No	SKPD	Anggaran 2019	Realisasi 2019		Realisasi 2018	
			Pihak Ke-3	Masyarakat	Pihak Ke-3	Masyarakat
1	Dinas Pendidikan	9.337.959.290,00	8.791.088.000,00	216.435.000,00	3.915.141.100,00	0,00
2	Kelurahan Klojen	358.981.000,00	0,00	358.931.000,00	0,00	0,00
3	Kelurahan Rampal Celaket	349.500.000,00	0,00	349.450.000,00	0,00	0,00
4	Kelurahan Samaan	338.000.000,00	0,00	338.000.000,00	0,00	0,00
5	Kelurahan Kidul Dalem	347.069.000,00	0,00	347.019.000,00	0,00	0,00
6	Kelurahan Sukoharjo	339.641.000,00	0,00	339.641.000,00	0,00	0,00
7	Kelurahan Kasin	336.000.000,00	0,00	335.950.000,00	0,00	0,00
8	Kelurahan Kauman	390.941.000,00	0,00	342.393.250,00	0,00	0,00
9	Kelurahan Oro-Oro Dowo	343.350.000,00	0,00	343.300.000,00	0,00	0,00
10	Kelurahan Barend	330.600.000,00	0,00	299.350.000,00	0,00	0,00
11	Kelurahan Gading Kasri	347.941.000,00	0,00	347.741.000,00	0,00	0,00
12	Kelurahan Penanggungan	360.059.000,00	0,00	359.720.000,00	0,00	0,00
13	Kelurahan Blimbing	347.941.000,00	0,00	347.891.000,00	0,00	0,00
14	Kelurahan Polowijen	343.625.000,00	0,00	343.100.000,00	0,00	0,00
15	Kelurahan Arjosari	338.161.000,00	0,00	338.122.750,00	0,00	0,00
16	Kelurahan Purwodadi	291.800.000,00	0,00	291.800.000,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

No	SKPD	Anggaran 2019	Realisasi 2019		Realisasi 2018	
			Pihak Ke-3	Masyarakat	Pihak Ke-3	Masyarakat
17	Kelurahan Pandanwangi	339.890.000,00	0,00	339.840.000,00	0,00	0,00
18	Kelurahan Purwanto	342.448.000,00	0,00	342.398.000,00	0,00	0,00
19	Kelurahan Bunulrejo	342.061.000,00	0,00	337.061.000,00	0,00	0,00
20	Kelurahan Kesatrian	347.941.000,00	0,00	347.941.000,00	0,00	0,00
21	Kelurahan Polehan	321.000.000,00	0,00	321.000.000,00	0,00	0,00
22	Kelurahan Jodipan	342.941.000,00	0,00	342.891.000,00	0,00	0,00
23	Kelurahan Balarjosari	331.324.000,00	0,00	331.274.000,00	0,00	0,00
24	Kelurahan Kedungkandang	329.966.000,00	0,00	329.916.000,00	0,00	0,00
25	Kelurahan Kotalama	343.000.000,00	0,00	342.950.000,00	0,00	0,00
26	Kelurahan Mergosono	331.631.000,00	0,00	331.431.000,00	0,00	0,00
27	Kelurahan Bumiayu	342.500.000,00	0,00	342.450.000,00	0,00	0,00
28	Kelurahan Wonokoyo	305.000.000,00	0,00	304.980.000,00	0,00	0,00
29	Kelurahan Buring	311.501.000,00	0,00	311.301.000,00	0,00	0,00
30	Kelurahan Lesanpuro	308.000.000,00	0,00	307.950.000,00	0,00	0,00
31	Kelurahan Sawojajar	342.491.000,00	0,00	321.746.700,00	0,00	0,00
32	Kelurahan Madyopuro	340.241.000,00	0,00	340.191.000,00	0,00	0,00
33	Kelurahan Cemorokandang	327.941.000,00	0,00	327.741.000,00	0,00	0,00
34	Kelurahan Arjowinangun	341.250.000,00	0,00	340.700.000,00	0,00	0,00
35	Kelurahan Tlogowaru	347.000.000,00	0,00	346.800.000,00	0,00	0,00
36	Kelurahan Lowokwaru	351.983.000,00	0,00	351.933.000,00	0,00	0,00
37	Kelurahan Dinoyo	336.000.000,00	0,00	335.990.237,00	0,00	0,00
38	Kelurahan Sumbersari	360.000.000,00	0,00	359.800.000,00	0,00	0,00
39	Kelurahan Ketawanggede	335.000.000,00	0,00	334.950.000,00	0,00	0,00
40	Kelurahan Jatimulyo	347.731.000,00	0,00	347.531.000,00	0,00	0,00
41	Kelurahan Tunjungsekar	340.000.000,00	0,00	340.000.000,00	0,00	0,00
42	Kelurahan Mojolangu	344.400.000,00	0,00	344.150.000,00	0,00	0,00
43	Kelurahan Tulusrejo	342.851.000,00	0,00	342.651.000,00	0,00	0,00
44	Kelurahan Tasikmadu	345.062.000,00	0,00	344.972.500,00	0,00	0,00
45	Kelurahan Tunggulwulung	335.000.000,00	0,00	335.000.000,00	0,00	0,00
46	Kelurahan Tlogomas	345.000.000,00	0,00	345.000.000,00	0,00	0,00
47	Kelurahan Merjosari	351.950.000,00	0,00	351.900.000,00	0,00	0,00
48	Kelurahan Sukun	340.141.000,00	0,00	340.141.000,00	0,00	0,00
49	Kelurahan Ciptomulyo	247.941.000,00	0,00	247.941.000,00	0,00	47.680.000,00
50	Kelurahan Gadang	330.000.000,00	0,00	329.950.000,00	0,00	0,00
51	Kelurahan Kebonsari	344.941.000,00	0,00	344.941.000,00	0,00	0,00
52	Kelurahan Bandungrejosari	322.941.000,00	0,00	317.464.250,00	0,00	0,00
53	Kelurahan Tanjung Rejo	332.440.000,00	0,00	316.765.000,00	0,00	0,00
54	Kelurahan Pisangcandi	325.500.000,00	0,00	325.450.000,00	0,00	0,00
55	Kelurahan Karang Besuki	337.941.000,00	0,00	337.891.000,00	0,00	0,00
56	Kelurahan Bandulan	344.650.000,00	0,00	344.650.000,00	0,00	0,00
57	Kelurahan Mulyorejo	327.132.000,00	0,00	327.082.000,00	0,00	0,00
58	Kelurahan Bakalankrajan	346.000.000,00	0,00	346.000.000,00	0,00	0,00
59	SMP NEGERI 9 MALANG	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	28.580.298.290,00	8.791.088.000,00	19.321.558.687,00	3.915.141.100,00	491.741.300,00

6) Belanja Bantuan Sosial

31 Desember 2019

31 Desember 2018

0,00

0,00

Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp1.515.000.000,00 atau terealisasi sebesar 0,00%.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

7) **Belanja Bantuan Keuangan**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
662.694.733,00	635.263.795,00

Belanja Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp662.694.733,00 dari anggaran sebesar Rp698.728.700,00 atau terealisasi sebesar 94,84%, sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp27.430.938,00 atau 4,31%. Adapun rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.14 Rincian Belanja Bantuan Keuangan

dalam rupiah

No	Jenis Belanja	Tahun 2019			Tahun 2018
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
a.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	698.728.700,00	662.694.733,00	94,84	635.263.795,00
	Jumlah	698.728.700,00	662.694.733,00	94,84	635.263.795,00

Pemberian Belanja Bantuan Keuangan berdasarkan surat edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 903/17.546/201/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur TA 2019.

5.1.2.b **BELANJA MODAL**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
238.525.539.354,66	351.203.268.896,86

Belanja Modal terealisasi sebesar Rp238.525.539.354,66 dari anggaran sebesar Rp385.923.298.820,51 atau terealisasi sebesar 61,81%, sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp112.677.729.542,20 atau 32,08%. Adapun rincian sebagai berikut.

1) **Belanja Tanah**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
1.052.056.200,00	0,00

Belanja Tanah terealisasi sebesar Rp1.052.056.200,00 yang merupakan pengadaan tanah untuk TPA dari anggaran sebesar Rp6.888.056.200,00 atau terealisasi sebesar 15,27% sedangkan pengadaan tanah makam sebesar Rp5.836.000.000,00 tidak terealisasi dikarenakan proses administrasi dengan ahli waris tidak selesai di tahun 2019 sedangkan pada tahun 2018 tidak terdapat belanja tanah. Rincian Belanja Modal Tanah sebagai berikut.

Tabel 5.1.15 Rincian Belanja Modal Tanah

dalam rupiah

No	Uraian	Tahun 2019			Realisasi Tahun 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja modal pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah	1.052.056.200,00	1.052.056.200,00	100,00	0,00
2	Belanja modal pengadaan tanah makam	5.836.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	6.888.056.200,00	1.052.056.200,00	15,27	0,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

2) Belanja Peralatan dan Mesin

31 Desember 2019	31 Desember 2018
92.686.829.412,80	164.899.809.894,08

Belanja Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp92.686.829.412,80 dari anggaran sebesar Rp113.536.515.725,18 atau terealisasi sebesar 81,64%, selisih antara anggaran dan realisasi tersebut merupakan akumulasi dari efisiensi dalam proses pengadaan maupun belanja yang tidak dapat dilaksanakan. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp72.212.980.481,28 atau 43,79%. Adapun rincian Belanja Peralatan dan Mesin sebagai berikut.

Tabel 5.1.16 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

dalam rupiah

No	Uraian	Tahun 2019			Realisasi Tahun 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja modal alat-alat berat	7.217.580.000,00	6.355.285.445,00	88,05	15.085.443.110,90
2	Belanja modal alat-alat angkutan darat bermotor	15.076.457.700,00	8.965.386.340,00	59,47	15.154.609.710,00
3	Belanja modal alat-alat angkutan darat tidak bermotor	664.915.000,00	656.474.300,00	98,73	2.441.483.861,98
4	Belanja modal alat-alat bengkel	1.067.481.000,00	1.015.123.832,00	95,1	677.313.800,00
5	Belanja modal alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan	627.061.000,00	599.088.350,00	95,54	769.935.150,00
6	Belanja modal peralatan kantor	7.313.604.806,00	3.893.107.020,00	53,23	5.839.769.348,00
7	Belanja modal perlengkapan kantor	4.600.515.375,70	3.530.151.741,00	76,73	6.473.338.702,00
8	Belanja modal komputer	24.367.935.023,00	20.343.462.204,00	82,82	79.762.252.057,00
9	Belanja modal meubelair	15.613.079.487,09	14.905.102.779,00	95,47	9.612.054.466,00
10	Belanja modal peralatan dapur	632.173.185,00	552.200.600,00	87,35	451.416.028,00
11	Belanja modal penghias ruangan rumah tangga	2.114.075.953,65	1.905.539.053,00	90,14	2.453.741.422,00
12	Belanja modal alat-alat studio	4.572.170.588,00	4.232.075.239,00	92,56	7.896.684.207,00
13	Belanja modal alat-alat komunikasi	2.590.037.862,00	2.346.187.375,00	90,59	1.865.643.023,00
14	Belanja modal alat-alat ukur	1.148.524.300,00	959.862.390,00	83,57	1.069.869.792,00
15	Belanja modal alat-alat kedokteran	9.858.148.888,11	7.426.218.359,00	75,33	9.236.038.516,00
16	Belanja modal alat-alat laboratorium	5.701.239.780,63	4.514.809.023,80	79,19	2.205.889.350,20
17	Belanja modal pengadaan alat-alat persenjataan/keamanan	227.135.000,00	222.157.790,00	97,81	237.937.000,00
18	Belanja modal perbaikan peralatan dan mesin	1.791.189.000,00	1.345.218.476,00	75,1	3.666.390.350,00
19	Belanja Modal - BLUD	1.070.533.728,00	580.540.109,00	54,23	0,00
20	Belanja Modal BOS	7.282.658.048,00	8.338.838.987,00	114,50	0,00
	Jumlah	113.536.515.725,18	92.686.829.412,80	81,64	164.899.809.894,08



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

3) **Belanja Gedung dan Bangunan**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
65.234.558.282,86	84.752.382.348,97

Belanja Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp65.234.558.282,86 dari anggaran sebesar Rp168.114.713.459,87 atau terealisasi sebesar 38,80%, realisasi yang rendah karena ada pembangunan gedung yang tidak terlaksana dan gagal dalam proses pelelangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp19.517.824.066,11 atau 23,02% Adapun rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.17 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

dalam rupiah

No	Jenis Belanja	Tahun 2019			Realisasi Tahun 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan	168.114.713.459,87	65.234.558.282,86	38,80	84.752.382.348,97
	Jumlah	168.114.713.459,87	65.234.558.282,86	38,80	84.752.382.348,97

4) **Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
77.371.112.829,00	94.992.003.183,81

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp77.371.112.829,00 dari anggaran sebesar Rp94.806.169.733,46 atau terealisasi 81,61% sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp17.620.890.354,81 atau 18,54%. Adapun rincian pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1.18 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

dalam rupiah

No	Uraian	Tahun 2019			Tahun 2018
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja modal konstruksi jalan	63.500.249.643,56	49.690.001.000,00	78,25	57.545.329.433,40
2	Belanja modal konstruksi jembatan	4.928.181.689,28	4.034.647.000,00	81,87	9.303.242.660,34
3	Belanja modal konstruksi jaringan air	16.407.761.622,62	15.046.461.050,00	91,70	18.859.393.723,49
4	Belanja modal penerangan jalan, taman dan hutan kota	8.887.367.500,00	7.791.215.508,00	87,67	8.259.948.766,58
5	Belanja modal instalasi listrik dan telepon	1.082.609.278,00	808.788.271,00	74,71	1.024.088.600,00
	Jumlah	94.806.169.733,46	77.371.112.829,00	81,61	94.992.003.183,81

5) **Belanja Aset Tetap Lainnya**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
1.493.032.570,00	4.706.001.970,00

Belanja Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp1.493.032.570,00 dari anggaran sebesar Rp1.550.721.918,00 atau terealisasi sebesar 96,28%, sedangkan apabila



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp3.212.969.400,00 atau 68,27% Adapun rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.19 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

dalam rupiah

No	Uraian	Tahun 2019			Realisasi Tahun 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.470.621.918,00	1.440.222.570,00	97,93	3.730.376.870,00
2	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	50.100.000,00	47.935.000,00	95,68	571.600.000,00
3	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	30.000.000,00	4.875.000,00	16,25	404.025.100,00
	Jumlah	1.550.721.918,00	1.493.032.570,00	96,28	4.706.001.970,00

6) Belanja Aset Lainnya

31 Desember 2019	31 Desember 2018
687.950.060,00	1.853.071.500,00

Belanja Aset Lainnya terealisasi sebesar Rp687.950.060,00 dari anggaran sebesar Rp1.027.121.784,00 atau terealisasi sebesar 66,98%, sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp1.165.121.440,00 atau 62,87%. Adapun rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.20 Rincian Belanja Modal Aset Lainnya

dalam rupiah

No	Uraian	Tahun 2019			Tahun 2018
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja modal pengadaan software pada 5 (lima) SKPD TA 2019 : a. Badan Pelayanan Pajak Daerah b. Dinas Perpustakaan Umum Dan Arsip Daerah c. Dinas Pendidikan d. Dinas Komunikasi Dan Informatika e. Dinas Perhubungan	1.027.121.784,00	687.950.060,00	66,98	1.853.071.500,00
	Jumlah	1.027.121.784,00	687.950.060,00	66,98	1.853.071.500,00

Belanja modal tersebut termasuk untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp1.109.964.323,00 dengan rincian sebagai berikut.

No.	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Perhubungan	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Lainnya Berupa Pengadaan Zebra Cross dan Pita Penggaduh	210.403.400,00	Tidak menambah masa manfaat aset
2	Dinas Perhubungan	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Lainnya Berupa Pengadaan Pengecatan Fasilitas Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	210.107.600,00	Tidak menambah masa manfaat aset
3	Dinas Perhubungan	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Lainnya Berupa Pengadaan Pengecatan Marka Jalan	211.944.200,00	Tidak menambah masa manfaat aset
4	Dinas Perhubungan	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Lainnya Berupa Pengadaan Fasilitas Parkir	203.212.200,00	Tidak menambah masa manfaat aset



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

No.	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
5	Dinas Perhubungan	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Lainnya Berupa Pengadaan Pengecatan Fasilitas Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	176.031.923,00	Tidak menambah masa manfaat aset
6	Kelurahan Rampal Celaket	Belanja Modal pengadaan lampu penerangan jalan umum	20.000.000,00	Diserahkan ke masyarakat
7	Kelurahan Kauman	Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	46.050.000,00	Pemeliharaan aset dibawah nilai kapitalisasi aset
8	Kelurahan Kebonsari	Belanja Modal pengadaan tong komposter dan tong sampah	32.215.000,00	Diserahkan ke masyarakat
			1.109.964.323,00	

5.1.2.c BELANJA TIDAK TERDUGA

31 Desember 2019	31 Desember 2018
1.357.371.065,00	34.080.542,00

Belanja Tidak terduga terealisasi sebesar Rp1.357.371.065,00 dari anggaran sebesar Rp388.934.854.116,20 atau terealisasi sebesar 0,35%, sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp1.323.290.523,00 atau sebesar 3.882,83% . Realisasi belanja tak terduga tersebut berasal dari kegiatan yang bersifat *urgent* yang anggaran tidak tertampung dalam kegiatan, dengan rincian sebagai berikut.

No.	Tanggal	No. SP2D	Nominal	Keterangan
1	22/07/2019	20163/SP2D/LS	46.660.800,00	Belanja Tak terduga kelebihan Pembayaran PBB/BPHTB T.A 2019 Kepada Sdr.M.KAFRAWI,PROF.DR,SH
2	22/07/2019	20164/SP2D/LS	97.461,00	Belanja Tak terduga kelebihan Pembayaran PBB/BPHTB T.A 2019 Kepada Sdri SRI WOERYANI
3	22/07/2019	20165/SP2D/LS	20.750.000,00	Belanja Tak terduga kelebihan Pembayaran PBB/BPHTB T.A 2019 Kepada Sdr.WALUJATI JANTI SUTJIATI
4	22/07/2019	20166/SP2D/LS	52.084.388,00	Belanja Tak terduga kelebihan Pembayaran PBB/BPHTB T.A 2019 Kepada Sdri Hj.MUTOMIMAH
5	22/07/2019	20167/SP2D/LS	17.000.000,00	Belanja Tak terduga kelebihan Pembayaran PBB/BPHTB T.A 2019 Kepada Sdri.NUR ASIYAH
6	12/08/2019	22482/SP2D/LS	5.066.880,00	Belanja Tak terduga kelebihan Pembayaran PBB/BPHTB T.A 2019 Kepada PT GIRI BURING ADIRAYA
7	19/11/2019	36657/SP2D/LS	1.861.536,00	Belanja Tak terduga kelebihan Pembayaran PBB/BPHTB T.A 2019 Kepada Wajib Pajak PARJO BEE dengan Pemohon Sdr.ROBBY SISWOJO
8	30/12/2019	47697/SP2D/LS	1.213.850.000,00	Belanja Tak terduga Perbaikan Perkuatan Pada Kerusakan Struktur Jembatan Jalan Muharto Oleh CV,UTAMA JAYA
			1.357.371.065,00	

Belanja tidak terduga tersebut tidak termasuk belanja yang direalisasikan pada pengeluaran pembiayaan sebesar Rp330.327.859,00 untuk pembayaran kekurangan Jampersal TA 2018.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

5.1.2.d TRANSFER - TRANSFER BAGI HASIL KE DESA

31 Desember 2019	31 Desember 2018
0,00	0,00

Rincian belanja transfer adalah sebagai berikut.

1) Belanja Bagi Hasil Retribusi

31 Desember 2019	31 Desember 2018
0,00	0,00

Belanja Bagi Hasil Retribusi terealisasi sebesar Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp0,00 atau terealisasi sebesar 0,00%.

5.1.3. PEMBIAYAAN

31 Desember 2019	31 Desember 2018
464.554.243.871,35	374.399.444.578,66

Pembiayaan netto pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp464.554.243.871,35 dari anggaran sebesar Rp465.212.264.692,02 atau terealisasi sebesar 99,86% sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp90.154.799.292,69 atau 24,07% yang terdiri dari:

5.1.3.a PENERIMAAN PEMBIAYAAN

31 Desember 2019	31 Desember 2018
489.359.571.730,35	400.598.440.985,66

Penerimaan pembiayaan sebesar Rp489.359.571.730,35 merupakan realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2019 dari anggaran sebesar Rp490.019.264.692,02 atau 99,87% yang berasal dari Penggunaan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp489.523.033.616,78 dikurangi dengan koreksi SiLPA BOSNAS 2018 sebesar Rp163.461.886,43. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp88.761.130.744,69 atau 22,15%. Adapun rincian sebagai berikut :

SiLPA tahun 2018	489.523.033.616,78
Koreksi SiLPA dari BOSNAS 2018	<u>(163.461.886,43)</u>
Penggunaan SiLPA tahun 2018	489.359.571.730,35

5.1.3.b PENGELUARAN PEMBIAYAAN

31 Desember 2019	31 Desember 2018
24.805.327.859,00	26.198.996.407,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi tahun 2019 yang dianggarkan sebesar Rp24.807.000.000,00 atau terealisasi sebesar 99,99% yaitu berupa penyertaan modal Pemerintah Kota Malang kepada BUMD sedangkan apabila dibandingkan realisasi tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp1.393.668.548,00 atau 5,31%. Adapun rincian pengeluaran pembiayaan sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel 5.1.21. Rincian Pengeluaran Pembiayaan

dalam rupiah

No	Uraian	Tahun 2019			Tahun 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Penyertaan Modal pada PD. BPR Tugu Artha	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	1.500.000.000,00
2	Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	21.475.000.000,00	21.475.000.000,00	100,00	22.338.996.407,00
3	Penyertaan Modal pada Rumah Potong Hewan (PD. RPH)	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	2.360.000.000,00
4	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada lembaga keuangan bukan bank	332.000.000,00	330.327.859,00	99,50	0,00
Jumlah		24.807.000.000,00	24.805.327.859,00	99,99%	26.198.996.407,00

Pengeluaran pembiayaan tersebut termasuk untuk belanja tidak terduga sebesar Rp330.327.859,00 untuk pembayaran kekurangan Jampersal TA 2018.

5.1.3.c SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

31 Desember 2019	31 Desember 2018
<u>742.764.421.538,17</u>	<u>489.523.033.616,78</u>

SiLPA Tahun 2019 sebesar Rp742.764.421.538,17 apabila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp489.523.033.616,78 maka mengalami kenaikan sebesar 65,91%%.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

5.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Saldo anggaran lebih tahun 2019 sebesar Rp742.764.421.538,17 yang diperoleh dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2019 dan 2018

dalam rupiah

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
Saldo Anggaran Lebih Awal	489.523.033.616,78	400.598.440.985,66
Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(489.523.033.616,78)	(400.598.440.985,66)
Sub Total	0,00	0,00
Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	743.167.380.451,53	489.523.033.616,78
Sub Total	743.167.380.451,53	489.523.033.616,78
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(163.461.886,43)	0,00
Lain-lain	(239.497.026,93)	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	742.764.421.538,17	489.523.033.616,78

Saldo anggaran lebih tahun 2019 sebesar Rp742.764.421.538,17 dibandingkan dengan saldo anggaran lebih tahun 2018 sebesar Rp489.523.033.616,78 mengalami kenaikan disebabkan karena terjadi kenaikan SAL sebagai penerimaan pembiayaan dari Rp489.523.033.616,78 pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp743.167.380.451,53 pada tahun 2019 dan ada pengurangan dari koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp163.461.886,43 dan lain-lain sebesar Rp239.497.026,93.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

5.3. NERACA

5.3.1 ASET

31 Desember 2019	31 Desember 2018
6.391.773.253.297,18	6.396.564.384.412,46

Saldo Aset Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp6.391.773.253.297,18.

5.3.1.1 ASET LANCAR

31 Desember 2019	31 Desember 2018
860.429.262.272,04	597.996.156.213,51

Saldo Aset Lancar Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp860.429.262.272,04 yang meliputi kas dan setara kas, piutang, beban dibayar dimuka, dan persediaan. Dalam menyajikan piutang, Pemerintah Kota Malang telah menerapkan metode *Net Realizable Value* (NRV) atau metode nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan cara menerapkan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih dengan mengklasifikasikan piutang menurut daftar umur piutang (*aging schedule*). Aset Lancar pada Pemerintah Kota Malang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.1. Uraian Aset Lancar Pemerintah Kota Malang

dalam rupiah

Uraian	31-Des-19	31-Des-18
Kas di Kas Daerah	732.518.691.596,23	484.167.785.594,53
Kas di Bend. Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di Bend. Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bend. FKTP	2.606.583.460,30	2.693.638.550,82
Kas di Bend. Dana BOS	3.118.259.712,27	3.157.840.546,67
Kas di Bendahara BLUD	4.526.792.584,14	0,00
Piutang Pajak Daerah	234.109.824.236,26	220.829.820.451,02
Piutang Retribusi Daerah	11.550.653.250,88	10.899.996.919,88
Piutang Dana Bagi Hasil	12.681.249.689,00	0,00
Penyisihan Piutang	(165.290.633.273,42)	(152.012.641.539,73)
Beban Dibayar Dimuka	694.628.866,39	378.044.309,48
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
Piutang Lainnya	4.060.156.713,50	4.161.625.116,76
Persediaan	19.853.055.436,49	23.720.046.264,08
Jumlah	860.429.262.272,04	597.996.156.213,51



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

1) Kas di Kas Daerah

31 Desember 2019	31 Desember 2018
732.518.691.596,23	484.167.785.594,53

Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp732.518.691.596,23 dan Rp484.167.785.594,53. Nilai tersebut merupakan nilai pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) per 31 Desember 2019 sebesar Rp732.518.691.596,23 yang merupakan saldo kas yang tersimpan pada 2 rekening Bank Jatim dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.2. Kas di Kas Daerah Kota Malang per 31 Desember 2019

dalam rupiah

No.	Rekening	Nama	Nominal
1	0041029722	RKUD Kota Malang	732.518.691.596,23
2	0041000266	Pendapatan Asli Daerah	0,00
Jumlah			732.518.691.596,23

2) Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2019	31 Desember 2018
0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

3) Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2019	31 Desember 2018
0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

4) Kas di Bendahara FKTP

31 Desember 2019	31 Desember 2018
2.606.583.460,30	2.693.638.550,82

Saldo Kas di Bendahara FKTP Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp2.606.583.460,30 dan Rp2.693.638.550,82.

Kas di Bendahara FKTP merupakan sisa dana kapitasi JKN yaitu dana yang dikelola secara langsung oleh Bendahara JKN pada FKTP di seluruh Kota Malang sebanyak 14 Puskesmas. Perhitungan saldo kas tersebut berdasarkan lampiran data-data yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

dalam rangka permohonan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B). Saldo Kas tersebut disimpan pada rekening Bank Mandiri masing-masing puskesmas. Rincian saldo buku Kas di Bendahara Penerimaan JKN per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.3. Dana Kapitasi JKN per 31 Desember 2019 di FKTP

dalam rupiah

No	Nama FKTP	Nomor Rekening	Saldo Kas FKTP
1	Puskesmas Cisadea	144-00-1509842-6	61.295.553,00
2	Puskesmas Bareng	144-00-1509942-4	45.710.920,00
3	Puskesmas Kendalsari	144-00-1510095-8	239.810.984,75
4	Puskesmas Rampalcelaket	144-00-1509940-8	174.409.918,69
5	Puskesmas Mojolangu	144-00-1509941-6	59.575.679,00
6	Puskesmas Kendalkerep	144-00-1509938-2	67.883.077,00
7	Puskesmas Mulyorejo	144-00-1509943-2	450.446.796,21
8	Puskesmas Gribig	144-00-1508690-0	123.493.259,72
9	Puskesmas Arjuno	144-00-1509945-7	229.791.328,00
10	Puskesmas Arjowinangun	144-00-1509944-0	255.638.063,00
11	UPT Rumah Bersalin/Polowijan	144-00-1509983-8	113.345.027,54
12	Puskesmas Ciptomulyo	144-00-1508696-7	172.381.133,00
13	Puskesmas Pandanwangi	144-00-1508695-9	90.580.508,97
14	Puskesmas Kedungkandang	144-00-1508697-5	522.221.211,42
Jumlah			2.606.583.460,30

Rincian saldo kas per FKTP sebagaimana terlampir pada **Lampiran 1.a**.

Selain saldo JKN, terdapat sisa dana Non Kapitasi meliputi Kas klaim RITP dan RJTP serta Kegiatan Prolanis sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp265.653.183,94 sebagaimana terlampir pada **Lampiran 1.b**.

Klaim Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) dan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) merupakan penggantian biaya pelayanan RITP dan RJTP oleh BPJS Kesehatan yang dibayarkan berdasarkan tarif non kapitasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.

Prolanis merupakan salah satu pelayanan promotif dan preventif yang menjadi tanggungjawab Puskesmas dalam peningkatan kesehatan bagi peserta penyakit kronis yaitu pelayanan kesehatan dengan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan peserta, fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

5) Kas di Bendahara Dana BOS

31 Desember 2019	31 Desember 2018
3.118.259.712,27	3.157.840.546,67

Pada Tahun 2019 terdapat kebijakan baru dari pihak anggaran yang berbeda dari tahun sebelumnya yaitu melakukan pengalihan pengakuan Anggaran Dana BOS yang tidak lagi di anggarkan ke KPA (SMPN) tetapi dilimpahkan di PA (Dinas Pendidikan) sehingga perlakuan hutang belanja BOS 2018 tidak dapat dilakukan penyesuaian/koreksi pada KPA (SMPN) begitu juga penyesuaian kas BOSNAS dan harus dilimpahkan ke PA (Dinas Pendidikan).

Untuk saldo per 31 Desember 2019 Kas di Bendahara Dana BOS yang dimiliki Pemerintah Kota Malang Per 31 Desember 2019 adalah Rp3.118.259.712,27. Saldo tersebut merupakan sisa Dana BOS dengan rincian sebagai berikut.

Saldo Kas BOSNAS 31 Desember 2018	3.157.840.546,67
Koreksi saldo awal	6.718.744,38
Saldo Kas BOSNAS 31 Desember 2018 setelah koreksi	3.164.559.291,05
Penerimaan Dana BOSNAS TA 2019	67.075.400.000,00
Pengeluaran Dana BOSNAS TA 2019	(66.489.543.688)
Penerimaan Jasa Giro 2019	52.303.926,93
Setoran Akumulasi Jasa Giro s.d TA 2018 (Non SILPA BOSNAS) ke Kas Daerah	(632.155.891)
Setoran Jasa Giro 2019 ke Kas Daerah	(52.303.927)
Saldo Kas BOSNAS 31 Desember 2019	3.118.259.712,27

Adapun rincian saldo Kas di Bendahara Dana BOS APBN sebagaimana terlampir pada **Lampiran 2**.

6) Kas Di Bendahara BLUD

31 Desember 2019	31 Desember 2018
4.526.792.584,14	0,00

Saldo per 31 Desember 2019 Kas di Bendahara BLUD yang dimiliki Pemerintah Kota Malang Per 31 Desember 2019 adalah Rp4.526.792.584,14. Rincian saldo tersebut adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

RINCIAN KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN BLUD TAHUN 2019

No	BLUD	No Rekening di Bank Jatim	Saldo Awal 2019 (Pelimpahan Kas JKN dari Dinas Kesehatan)	Penerimaan BLUD Tahun 2019	Pengeluaran BLUD Tahun 2019	Saldo Akhir 2019
1	2	3	4	5	6	7 =4+5-6
1	RSUD	0041090472	0,00	8.627.166.068,74	5.009.099.583,00	3.618.066.485,74
2	PUSKESMAS JANTI	0041083450	530.067.648,00	2.316.673.513,85	2.062.041.238,90	784.699.922,95
3	PUSKESMAS DINOYO	0041083441	99.610.124,60	2.049.652.631,09	2.025.236.580	124.026.175,45
Jumlah			629.677.772,60	12.993.492.213,68	9.096.377.402,14	4.526.792.584,14

Selain saldo Kas BLUD, per 31 Desember 2019 terdapat sisa Kas klaim RITP dan RJTP dari BPJS pada Puskemas Dinoyo sebesar Rp60.283.675,23 pada Rekening Bank Jatim Simpeda Nomor 0047611628.

7) Piutang Pajak

31 Desember 2019	31 Desember 2018
234.109.824.236,26	220.829.820.451,02

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2019 dan dapat dilihat pada tabel di bawah ini, dan untuk perinciannya dapat dilihat pada **Lampiran 3a** dan **3b**.

Tabel 5.3.4. Piutang Pajak Per 31 Desember 2019

dalam rupiah

No.	JENIS PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31/12/2018	KOREKSI SALDO AWAL	PELUNASAN PIUTANG 2018	SISA PIUTANG 2018	PENAMBAHAN PIUTANG TAHUN 2019	SALDO PIUTANG 31/12/2019
1	2	3	4	5	6=3+4-5	7	8=6+7
1	PAJAK HOTEL	7.303.055.394,75	1.282.271.966,73	7.012.503.683,23	1.572.823.678,25	6.040.464.043,74	7.613.287.721,99
2	PAJAK RESTORAN	9.393.651.487,71	1.372.684.765,71	8.064.178.099,29	2.702.158.154,13	7.945.675.558,90	10.647.833.713,03
3	PAJAK HIBURAN	1.440.422.342,52	434.353.684,53	1.280.918.327,00	593.857.700,05	1.196.391.871,08	1.790.249.571,13
4	PAJAK PARKIR	1.228.730.027,50	36.583.000,00	1.062.963.120,00	202.349.907,50	644.499.896,00	846.849.803,50
5	PPJ NON PLN	21.977.990,92	7.453.138,49	21.813.030,53	7.618.098,88	43.500.226,11	51.118.324,99
6	PAJAK PLN	5.142.882.466,00	0,00	5.142.882.466,00	0,00	5.467.061.347,00	5.467.061.347,00
7	PAJAK AIR TANAH	132.344.926,62	9.500.229,32	116.499.544,32	25.345.611,62	112.324.127,00	137.669.738,62
8	PBB PERKOTAAN	196.166.755.815,00	0,00	13.518.826.747,00	182.647.929.068,00	24.907.824.948,00	207.555.754.016,00
JUMLAH		220.829.820.451,02	3.142.846.784,78	36.220.585.017,37	187.752.082.218,43	46.357.742.017,83	234.109.824.236,26

Piutang PBB pelimpahan piutang pusat merupakan pelimpahan piutang dari Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Kota Malang berdasarkan Berita Acara Serah Terima antara Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang dengan Pemerintah Kota Malang pada tanggal 30 Januari 2013 dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel 5.3.5. Rincian Berita Acara Serah Terima dari KPP

dalam rupiah

No	KPP Pratama	Berita Acara Serah Terima	Nilai
1	KPP Pratama Malang Utara	BA-11/WPJ.12/KP.01/2013	53.472.789.614,00
2	KPP Pratama Malang Selatan	BA-7/WPJ.12/KP.14/2013	56.876.085.638,00
Jumlah			110.348.875.252,00

Selain itu, pada bulan Desember 2012, berdasarkan BAST Sistem Aplikasi, Basis Data PBB-P2, dan *softcopy* Peta PBB Nomor BA-076/WPJ.12/KP/14/2012 tanggal 26 Desember 2012, Pemerintah Kota Malang dhi. Dispenda menerima dua keping cakram digital yang berisi basis data PBB-P2 dengan format *Oracle Dump*, aplikasi Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (SISMIOP), serta peta blok obyek pajak Kota Malang/Sistem Informasi Geografi (SIG).

Kronologi penyajian nilai Piutang PBB per 31 Desember 2013 sebesar Rp123.634.224.672,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.6. Pembayaran Piutang PBB Tahun 2012

dalam rupiah

No	Uraian	Piutang per 31 Des 2013 (BAST)	Pelunasan Piutang Tahun 2012	Piutang per 31 Des 2013
1	Piutang PBB Tahun 2013	0,00	0,00	19.466.569.648,00
2	Piutang PBB Pelimpahan Pusat	110.348.875.252,00	6.181.220.228,00	104.167.655.024,00
Jumlah		110.348.875.252,00	6.181.220.228,00	123.634.224.672,00

Nilai piutang PBB tahun 2013 yang tersaji dalam Neraca per 31 Desember 2013 sebesar Rp123.634.224.672,00. Pemerintah Kota Malang menyajikan Piutang PBB pada Neraca per 31 Desember 2012 sebesar Rp110.348.875.252,00 yang didasarkan pada BAST. Selain BAST, KPP Pratama juga menyerahkan rincian piutang

- a) Dalam bentuk *softcopy* yang disimpan dalam CD berformat *Microsoft Excel* (ME) yang nilai piutangnya lebih besar daripada yang disajikan dalam BAST, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.7. Rincian Nilai Piutang PBB per 31 Desember 2012

dalam rupiah

No	KPP Pratama	BAST	CD ME
1	KPP Pratama Malang Utara	53.472.789.614,00	55.822.023.078,00
2	KPP Pratama Malang Selatan	56.876.085.638,00	61.158.177.435,00
Jumlah		110.348.875.252,00	116.980.200.513,00
Selisih antara BAST dan CD ME			6.631.325.261,00

Dari tabel diatas diketahui terdapat selisih data antara BAST dengan CD ME sebesar Rp6.631.325.261,00 karena ada keterangan pembayaran pada masa pajak tahun 2012, namun atas pembayaran



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

tersebut, KPP Pratama tidak dapat memberikan rincian setoran per Nomor Obyek Pajak (NOP). Atas perbedaan nilai tersebut, Dispenda telah mengirimkan surat kepada Direktur Teknologi Informasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta Nomor 973/1351/35.73.313/2013 tanggal 1 Juli 2013 tentang permohonan data pembayaran online PBB mulai tanggal 31 Nopember s.d. 31 Desember 2012 namun Pemerintah Kota Malang belum mendapatkan rincian dimaksud. Hasil konfirmasi ke KPP Pratama Malang Utara dan KPP Pratama Malang Selatan menunjukkan bahwa selisih sebesar Rp6.631.325.261,00 merupakan penerimaan PBB tahun 2012 yang tidak teridentifikasi NOP; dan

- b) Saldo Piutang PBB Tahun 2013 sebesar Rp19.466.569.648,00 tidak dapat dijelaskan nilainya karena mutasi tambah (nilai SPPT yang diterbitkan tahun 2013) dan mutasi kurang tahun 2013 tidak dapat dirinci nilainya. Piutang tersebut belum dapat diyakini waktu *cut off* nya karena data dalam SISMIOP bergerak/*update* setiap waktu. Sampai dengan 31 Desember 2018, terdapat progres penerimaan sehingga sisa piutang PBB tahun 2013 menjadi sebesar Rp13.229.494.746,00.

Atas saldo pelimpahan tersebut, sampai dengan 31 Desember 2018, berdasarkan data yang tersaji dalam SISMIOP, nilai piutang yang belum terbayarkan adalah sebesar Rp91.596.045.492,00 yang merupakan piutang hasil pelimpahan tahun 2013 sebesar Rp110.348.875.252,00 dikurangi pelunasan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp21.978.755.316,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.8. Rincian Pelunasan Piutang PBB-P2 Pelimpahan KPP Pratama Malang Utara dan Malang Selatan Tahun 2013 s.d. 2019

dalam rupiah

No	Pelunasan	Nilai
1	Tahun 2013	6.181.220.228,00
2	Tahun 2014	3.651.662.491,00
3	Tahun 2105	3.596.551.151,00
4	Tahun 2016	3.348.269.857,00
5	Tahun 2017	1.302.312.278,00
6	Tahun 2018	672.985.740,00
7	Tahun 2019	3.225.753.571,00
	Jumlah	21.978.755.316,00

8) Piutang Retribusi

31 Desember 2019	31 Desember 2018
11.550.653.250,88	10.899.996.919,88

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel 5.3.9. Piutang Retribusi per 31 Desember 2019

dalam rupiah

No	Jenis Retribusi	Saldo Piutang per 31 Des 2018	Koreksi Saldo Awal	Pelunasan Piutang 2018	Sisa Piutang 2018	Penambahan Piutang 2019	Saldo Piutang per 31 Des 2019
1	2	3	4	5	6=3+4-5	7	8=6+7
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.006.977.900,00	-	2.006.977.900,00	-	2.036.308.642,00	2.036.308.642,00
2	Retribusi Sewa Kios Terminal Dinas Perhubungan	38.592.000,00	-	-	38.592.000,00	-	38.592.000,00
3	Retribusi Sampah Dinas Kebersihan	1.130.143.500,00	-	953.894.000,00	176.249.500,00	1.008.850.500,00	1.185.100.000,00
4	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	494.482.721,88	-	-	494.482.721,88	-	494.482.721,88
5	Retribusi Ijin Pemakaian Tanah	2.934.949.798,00	432.739.844,00	697.059.313,00	2.670.630.329,00	1.225.168.558,00	3.895.798.887,00
6	Retribusi Pelayanan Pasar	4.294.851.000,00	-	394.480.000,00	3.900.371.000,00	-	3.900.371.000,00
	JUMLAH	10.899.996.919,88	432.739.844,00	4.052.411.213,00	7.280.325.550,88	4.270.327.700,00	11.550.653.250,88

Berikut penjelasan dari beberapa jenis Retribusi diatas:

1. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pada tahun 2019, di RSUD terdapat pelunasan piutang tahun 2018 sebesar Rp2.006.977.900,00. Penambahan piutang tahun 2019 sebesar Rp2.036.308.642,00 terdiri dari :

No	Bulan / Tahun	BPJS
1	Februari (pending)	6.690.200,00
2	Mei 2019	549.294.100,00
3	Juni 2019	492.571.900,00
4	Juli 2019	551.503.800,00
5	Tahun 2017	136.200.800,00
6	Tahun 2018	244.092.442,00
7	Klaim Kcs. Ke dinkes	55.955.400,00
	Total	2.036.308.642,00

2. Retribusi Sewa Kios Terminal

Pada tahun 2019, di Dinas Perhubungan tidak ada pelunasan piutang terdahulu sebesar Rp38.592.000,00 yang terdiri dari :

No	Jenis Retribusi Terminal	Nilai Piutang
1	Kios	37.041.200,00
2	MCK	1.550.800,00
	Total	38.592.000,00

3. Retribusi Sampah

Pada tahun 2019, di Dinas Lingkungan Hidup terdapat pelunasan piutang tahun 2018 sebesar Rp953.894.000,00 dari total piutang Rp1.130.143.500,00, sehingga masih terdapat sisa piutang 2018 sebesar Rp176.249.500,00. Di tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

menerbitkan Piutang Retribusi Sampah kepada PDAM sebesar Rp1.008.850.500,00.

4. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pada tahun 2019, di Dinas Komunikasi dan Informatika tidak terdapat pelunasan piutang tahun 2018. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019, Dinas Komunikasi dan Informatika tidak melakukan penarikan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi karena sesuai UU Nomor 23 tahun 2014, PP Nomor 18 tahun 2016, Permenkominfo Nomor 14 tahun 2016 bahwa Pemerintah Kota tidak diberikan wewenang secara otonom untuk mengelola telekomunikasi, serta sesuai Pergub Jatim Nomor 065/918/114.2/2017 bahwa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dilakukan oleh OPD di bidang konstruksi fisik bangunan.

5. Retribusi Ijin Pemakaian Tanah

Pada tahun 2019, di BPKAD terdapat pelunasan piutang tahun 2018 sebesar Rp697.059.313,00 yang terdiri dari :

No	Lokasi Tanah	Pembayaran Saldo Piutang 2018
1	Kecamatan Blimbing	84.821.250,00
2	Kecamatan Klojen	49.665.500,00
3	Kecamatan Kedung Kandang	20.907.625,00
4	Kecamatan Sukun	508.674.438,00
5	Kecamatan Lowokwaru	32.990.500,00
	Jumlah	697.059.313,00

Selain itu, di tahun 2019, BPKAD menerbitkan SKRD sebesar Rp2.772.975.195,00 dan menerima pembayaran atas SKRD tersebut sebesar Rp1.547.806.637,00, sehingga sisa SKRD 2019 yang belum terbayar di tahun 2019 sebesar Rp1.225.168.558,00.

6. Retribusi Pelayanan Pasar

Pada tahun 2019, di Dinas Perdagangan terdapat pelunasan piutang sebesar Rp394.480.000,00 dengan rincian pembayaran piutang sebagai berikut.

No	Uraian	Nilai Pembayaran Piutang
1	Piutang 2013	129.915.000,00
2	Piutang 2014	126.975.000,00
3	Piutang 2015	137.590.000,00
	Total	394.480.000,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

9) Piutang Dana Bagi Hasil

31 Desember 2019	31 Desember 2018
12.681.249.689,00	0,00

Piutang Dana Bagi Hasil merupakan saldo piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.10. Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2019

dalam rupiah

No	Jenis Pendapatan	2019
1	DBH – Pajak	
	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan - LO	585.974.334,00
	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	232.873.317,00
2	DBH – SDA	
	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Alam Kehutanan	19.185.561,00
	Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Perikanan	3.677.289,00
	Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	10.622.308.061,00
	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	812.185.385,00
	Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara	405.045.742,00
	Jumlah	12.681.249.689,00

Pemerintah Kota Malang mencatat Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2019 sesuai nilai kurang bayar dalam PMK Nomor 140/PMK.07/2019 dan PMK Nomor 20/PMK.07/2020 yang telah diterima di Kasda pada tanggal 23-24 April 2020 sebesar Rp12.681.249.689,00.

Sesuai PMK Nomor 140/PMK.07/2019, 20/PMK.07/2020, dan 36/PMK.07/2020 Pemerintah Kota Malang mendapatkan alokasi dana bagi hasil sebesar Rp72.749.194.174,00 sebagaimana uraian berikut. Namun pencatatan dalam Neraca dan CaLK hanya dilakukan untuk dana bagi hasil yang telah diterima sampai dengan bulan April 2020 yaitu sebesar Rp12.681.249.689,00.

No	Uraian Peraturan Menteri Keuangan			
	Nomor	Tanggal	Perihal	Nilai (Rp)
1	140/PMK.07/2019	7 Oktober 2019	Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Pada Tahun 2019	40.048.399.070,00
2	20/PMK.07/2020	16 Maret 2020	Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2020	12.703.321.078,00
3	36/PMK.07/2020	16 April 2020	Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)	19.997.474.026,00
		Jumlah		72.749.194.174,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

10) Penyisihan Piutang

31 Desember 2019	31 Desember 2018
(165.290.633.273,42)	(152.012.641.539,73)

Saldo Penyisihan Piutang Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp165.290.633.273,42 dan Rp152.012.641.539,73 merupakan penyisihan atas piutang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2019.

Penyisihan Piutang bertujuan agar piutang di neraca terjaga nilainya yaitu sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Perhitungan penyisihan piutang dihitung berdasarkan umur piutang, dalam hal ini penyisihan piutang bukan merupakan penghapusan piutang. Jumlah yang disisihkan sebagai piutang tak tertagih menjadi unsur pengurang jumlah piutang.

Jumlah penyisihan piutang Pemerintah Kota Malang tahun 2019 sebesar Rp165.290.633.273,42 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.11. Rincian Saldo Penyisihan Piutang
Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2019**

dalam rupiah

No	Jenis	Nilai
1	Piutang Pajak Non PBB	3.438.790.423,96
2	Piutang Pajak PBB	154.283.600.623,50
3	Piutang Retribusi Sewa Kios Terminal (Dinas Perhubungan)	38.592.000,00
4	Piutang Retribusi Kebersihan (Dinas Lingkungan Hidup)	85.249.500,00
5	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	243.909.532,21
6	Piutang Retribusi Ijin Pemakaian Tanah (BPKAD)	1.799.170.055,25
7	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar (Dinas Perdagangan)	3.605.354.500,00
8	Piutang Lain – Lain (PPKD)	1.795.966.638,50
	Jumlah	165.290.633.273,42

Rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2019 dijelaskan pada **Lampiran 4**.

11) Beban Dibayar Dimuka

31 Desember 2019	31 Desember 2018
694.628.866,39	378.044.309,48

Saldo Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp694.628.866,39 dan Rp378.044.309,48. Jumlah tersebut merupakan saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2019 yang merupakan pembayaran di tahun 2019 dan akan menjadi beban di tahun 2020. Rincian saldo Beban Dibayar



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Dimuka disajikan pada tabel dibawah ini. Rincian nama asuransi dan nomor Polis Asuransi disajikan pada **Lampiran 5**.

Tabel 5.3.12. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019

dalam rupiah

No	SKPD	Saldo Per 31/12/2018	Penambahan Tahun 2019	Pengurangan Tahun 2019	Saldo Per 31/12/2019
1	Dinas Pendidikan	4.058.137,50	153.820.950,00	55.331.787,50	102.547.300,00
2	Dinas Kesehatan	15.782.470,83	94.839.227,00	89.438.669,29	21.183.028,54
3	RSUD Kota Malang	2.440.006,67	18.345.710,00	16.199.289,11	4.586.427,56
4	Puskesmas Dinoyo	0,00	3.971.787,50	2.978.840,62	992.946,88
5	Puskesmas Janti	0,00	0,00	0,00	5.686.346,88
6	Dinas PU dan Penataan Ruang	40.146.637,50	73.622.000,00	58.552.137,50	55.216.500,00
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.322.050,00	257.799.375,00	224.955.018,75	41.166.406,25
8	Dinas Sosial	7.092.500,00	19.976.975,00	10.421.995,84	16.647.479,16
9	Dinas Tenaga Kerja	7.724.075,00	15.424.725,00	14.949.266,66	8.199.533,34
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB	8.483.100,00	48.896.200,00	49.229.933,33	8.149.366,67
11	Dinas Lingkungan Hidup	10.849.100,00	241.631.375,00	111.287.154,06	141.193.320,94
12	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.101.541,67	30.500.875,00	29.060.677,05	2.541.739,62
13	Dinas Perhubungan	23.692.666,67	31.624.900,00	28.963.483,34	26.354.083,33
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	10.843.000,00	10.843.000,00	0,00
15	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	5.667.737,47	8.978.250,00	8.690.091,61	5.955.895,86
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.584.912,50	32.414.100,00	40.596.662,50	5.402.350,00
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.418.672,00	9.036.300,00	9.195.897,00	2.259.075,00
18	Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah	0,00	19.924.500,00	19.924.500,00	0,00
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7.470.520,83	9.440.200,00	12.977.304,16	3.933.416,67
20	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	11.431.758,39	21.815.405,00	22.712.854,64	10.534.308,75
21	Dinas Perdagangan	7.432.445,84	46.280.150,00	45.999.237,54	7.713.358,30
22	Dinas Perindustrian	8.721.766,67	8.729.875,00	12.999.204,17	4.452.437,50
23	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	1.979.375,00	22.729.138,00	22.893.364,12	1.815.094,88
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.041.825,00	23.631.788,00	22.704.297,33	1.969.315,67
25	Badan Pelayanan Pajak Daerah	0,00	66.849.875,00	66.849.875,00	0,00
26	Badan Kepegawaian Daerah	4.543.014,58	17.113.690,00	17.217.230,41	4.439.474,17
27	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	141.593.325,00	211.179.025,00	176.789.829,16	175.982.520,84
28	Inspektorat	7.697.387,50	31.892.750,00	31.716.550,00	7.873.587,50
29	Sekretariat DPRD	28.135.233,36	73.699.375,00	83.409.764,61	18.414.843,75
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.705.066,67	13.394.725,00	10.616.350,00	8.483.441,67
31	Kecamatan Kedungkandang	928.983,33	5.611.600,00	5.605.316,66	935.266,67
	Jumlah	378.044.309,98	1.624.017.845,50	1.313.109.581,96	694.628.866,39



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

12) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

31 Desember 2019	31 Desember 2018
0,00	0,00

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Daerah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00. Tidak dicatatnya bagian lancar TGR karena tidak terdapat batas waktu pembayaran angsuran TGR oleh pegawai sehingga tidak dapat ditentukan dengan pasti jumlah yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan ke depan.

13) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

31 Desember 2019	31 Desember 2018
0,00	0,00

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,00.

14) Piutang Lainnya

31 Desember 2019	31 Desember 2018
4.060.156.713,50	4.161.625.116,76

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Lainnya sebesar Rp4.060.156.713,50 per 31 Desember 2019. Saldo tersebut merupakan penambahan dari saldo piutang tahun 2018 dikurangi pembayaran piutang tahun 2018 dan Koreksi piutang tahun 2018 dan ditambah piutang di tahun 2019. Adapun rincian Piutang Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

15) Persediaan

31 Desember 2019	31 Desember 2018
19.853.055.436,49	23.720.046.264,08

Jumlah tersebut merupakan sisa barang hasil belanja tahun 2019 serta sisa persediaan tahun sebelumnya. Persediaan diukur berdasarkan: biaya Perolehan, harga produksi, atau nilai Wajar. Dan penilaiannya menggunakan metode FIFO (*First in First Out*) yang dicatat secara periodik. Hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2017. Adapun rincian persediaan menurut jenis barang pakai habis dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.13. Persediaan per 31 Desember 2019

dalam rupiah

No	Nama Akun	Saldo Awal 2019	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 2019
1	Alat Tulis Kantor	1.729.883.059,00	2.235.025.394,00	1.716.594.859,00	2.248.313.594,00
2	Alat Listrik dan Elektronik	7.069.345.200,00	572.683.799,00	7.069.345.200,00	572.683.799,00
3	Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.036.000,00	1.962.000,00	2.036.000,00	1.962.000,00
4	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	210.451.495,00	353.101.590,00	202.311.495,00	361.241.590,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

No	Nama Akun	Saldo Awal 2019	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 2019
5	Bahan Bakar Minyak/Gas	65.070.000,00	5.500.000,00	65.070.000,00	5.500.000,00
6	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	0,00
7	Isi Tabung Gas	370.000,00	755.000,00	370.000,00	755.000,00
8	Bahan Baku Bangunan	0,00	101.000.000,00	0,00	101.000.000,00
9	Bahan Makanan	0,00	2.487.826.585,20	781.748.190,30	1.706.078.394,90
10	Bibit Ternak	15.112.500,00	0,00	0,00	15.112.500,00
11	Bahan Obat-obatan	8.683.374.232,27	7.320.088.313,50	6.917.774.709,27	9.085.687.836,50
12	Bahan Kimia	650.540.653,00	372.504.869,00	369.645.939,50	653.399.582,50
13	Bahan Perlengkapan/Praktek	2.911.837.424,81	1.835.747.616,79	1.956.290.942,01	2.791.294.099,59
14	Barang Perlengkapan Kantor	4.067.000,00	110.738.600,00	2.135.000,00	112.670.600,00
15	Barang Cetak	1.920.990.700,00	1.634.002.180,00	1.781.492.940,00	1.773.499.940,00
16	Pakaian Dinas Harian (PDH)	66.430.500,00	0,00	4.224.000,00	62.206.500,00
17	Pakaian Kerja Lapangan	0,00	9.670.000,00	0,00	9.670.000,00
18	Batik Tradisional	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
19	Pakaian Olahraga	877.500,00	0,00	877.500,00	0,00
20	Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	388.020.000,00	6.580.000,00	43.020.000,00	351.580.000,00
Jumlah		23.720.046.264,08	17.047.585.947,49	20.914.576.775,08	19.853.055.436,49

Selain persediaan tersebut, terdapat persediaan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang yang tidak diketahui nilainya. Rincian persediaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Gudang Logistik III

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Family Kid	Paket	220
2	Sembako 2019	Paket	189
3	Lauk Pauk	Kardus	5

Gudang Logistik IV

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Perlengkapan Balita	Paket	28
2	Perlengkapan Rekreasi	Paket	58
3	Peralatan Kesehatan	Paket	11
4	Perlengkapan Makan	Paket	7
5	Sembako Dsp 2018	Paket	45

Gudang Logistik di Jalan A. Yani

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Family Kid	Paket	100
2	Peralatan Sandang	Paket	45
3	Kidsware	Paket	75
4	Kotak P3k	Paket	12
5	Kompor Kayu Serbaguna	Buah	38
6	Tenda Family	Paket	5
7	Gedek	Lembar	30
8	Selimut Biru	Buah	33



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
9	Alas Tenda Keluarga	Gulung	10
10	Tikar	Lembar	75
11	Karpet Gulung	Lembar	4
12	Selambu	Paket	5
13	Peralatan Makan	Paket	58
14	Perlengkapan Rekreasional	Paket	68
15	Perlengkapan Dapur Keluarga	Paket	3
16	Perlengkapan Kesehatan	Paket	68
17	Perlengkapan Sekolah	Paket	70
18	Triplek	Lembar	90
19	Seng Uk 180	Lembar	30
20	Linggis	Buah	30
21	Karung Sak	Biji	8500

5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

31 Desember 2019	31 Desember 2018
374.508.909.229,00	326.146.283.411,00

Saldo Investasi jangka Panjang meliputi Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan dengan rincian sebagai berikut.

1) Investasi Non Permanen

31 Desember 2019	31 Desember 2018
0,00	0,00

Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2019 pada Pemerintah Kota Malang adalah sebesar Rp0,00.

2) Investasi Permanen

31 Desember 2019	31 Desember 2018
374.508.909.229,00	326.146.283.411,00

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2019 adalah Rp374.508.909.229,00 dengan rincian sebagai berikut.

Jumlah tersebut merupakan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kota Malang yang telah diinvestasikan pada perusahaan daerah dan PT BPD Jatim. Investasi permanen pada BUMD dicatat dengan metode ekuitas (*equity method*) yaitu penambahan nilai investasi yang kepemilikannya lebih dari 50% atau mayoritas dengan mencatat total laba/rugi sebagai penambah/pengurang investasi, sedangkan setoran deviden dianggap sebagai pengurang nilai investasi. Investasi permanen pada PT BPD Jatim dicatat dengan metode biaya (*cost method*). Saldo investasi permanen Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2019 terdiri dari :



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel 5.3.14. Rincian Saldo Investasi Permanen

dalam rupiah

No	Nama Perusahaan	%	Saldo Tahun 2018	Kenaikan	Penurunan	Saldo Tahun 2019
1	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	100	278.617.907.878,00	118.750.812.793,00	73.715.026.261,00	323.653.694.410,00
2	Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tugu Artha	100	9.934.352.535,00	2.055.225.003,00	0,00	11.989.577.538,00
3	Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (RPH)	100	10.435.023.248,00	1.606.105.000,00	334.490.717,00	11.706.637.531,00
4	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur	0.91	27.158.999.750,00	0,00	0,00	27.158.999.750,00
Jumlah			326.146.283.411,00	88.282.666.570,00	176.606.785.625,00	374.508.909.229,00

Penjelasan kenaikan dan penurunan dari komponen saldo investasi/ penyertaan modal dalam tabel sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang

Saldo Investasi Permanen Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2019 pada PDAM adalah sebesar Rp323.653.694.410,00 naik sebesar Rp45.035.786.532,00 atau sebesar 16,16% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp278.617.907.878,00. Penilaian Investasi Permanen pada PDAM menggunakan metode ekuitas dengan presentase kepemilikan 100%. Kenaikan Investasi Permanen pada PDAM dapat dijelaskan sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2018 **278.617.907.878,00**

Kenaikan:

Penyertaan Modal TA 2019 21.475.000.000,00
Laba/Rugi tahun 2019 51.113.449.551,00
Kenaikan/(Penurunan) Cadangan 3.166.940.546,00
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasca kerja (30.797.674.895,00)

44.957.715.202,00

Penurunan:

Penggunaan Laba tahun 2018 (42.917.351.366,00)
Koreksi Pencatatatn Modal Hibah 0,00
Koreksi Saldo Laba (Rugi) 42.995.422.696,00
Setoran Bagian Laba Ke RKUD Tahun 2019 0,00

78.071.330,00

Saldo per 31 Desember 2019

323.653.694.410,00

Penjelasan kenaikan dan penurunan investasi karena:

- a) Penambahan saldo Investasi Permanen sebesar Rp21.475.000.000,00 merupakan tambahan penyertaan modal tahun 2019;



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

- b) Penambahan laba bersih tahun buku 2019 sebesar Rp51.113.449.551,00;
- c) Penambahan saldo Investasi Permanen sebesar Rp3.166.940.546,00 merupakan Kenaikan cadangan umum tahun 2019;
- d) Pengurangan saldo Investasi Permanen sebesar Rp30.797.674.895,00 merupakan pengukuran kembali kewajiban imbalan pasca kerja tahun 2019;
- e) Pengurangan saldo Investasi Permanen sebesar Rp42.917.351.366,00 yang merupakan penggunaan laba tahun 2018 oleh PDAM;
- f) Pengurangan saldo Investasi Permanen sebesar Rp42.995.422.696,00 merupakan koreksi saldo laba (rugi).

2) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Tugu Artha

Saldo Investasi Permanen Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2019 pada PD. BPR Tugu Artha adalah sebesar Rp11.989.577.538,00 naik sebesar Rp2.055.225.003,00 atau sebesar 20,69% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp9.934.352.535,00. Penilaian Investasi Permanen pada PD. BPR Tugu Artha menggunakan metode ekuitas dengan presentase kepemilikan 100%. Kenaikan Investasi Permanen pada PD BPR Tugu Artha dapat dijelaskan sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2018	9.934.352.535,00
<i>Kenaikan:</i>	
Penyertaan Modal TA 2019	1.500.000.000,00
Laba/Rugi tahun 2019	555.225.003,00
	2.055.225.003,00
<i>Penurunan:</i>	0,00
Saldo per 31 Desember 2019	11.989.577.538,00

Penjelasan Penambahan investasi permanen karena:

- a) Penambahan saldo Investasi Permanen sebesar Rp1.500.000.000,00 yang merupakan tambahan penyertaan modal tahun 2019;
- b) Penambahan saldo Investasi Permanen sebesar Rp555.225.003,00 yang merupakan pengumuman laba PD BPR Tugu Artha tahun 2019 berdasarkan laporan keuangan PD BPR Tugu Artha *Audited* tahun 2019.

3) Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH)

Saldo Investasi Permanen Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2019 pada PD RPH adalah sebesar Rp11.706.637.531,00 sehingga naik sebesar Rp1.271.614.283,00 atau sebesar 12,18% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp10.435.023.248,00. Penilaian Investasi Permanen pada PD RPH menggunakan metode



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

ekuitas dengan presentase kepemilikan 100%. Kenaikan Investasi Permanen pada PD. RPH dapat dijelaskan sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2018 **10.435.023.248,00**

Kenaikan:

Penyertaan Modal TA 2019 1.500.000.000,00
1.500.000.000,00

Penurunan:

Laba/Rugi tahun 2019 (334.490.717,00)
Penggunaan Laba tahun 2018 6.105.000,00
Koreksi Saldo Laba (Rugi) 100.000.000,00
Setoran Bagian Laba Ke RKUD Tahun 2019 0,00
(228.385.717,00)

Saldo per 31 Desember 2019 **11.706.637.531,00**

Kenaikan dan penurunan investasi permanen karena:

- Penambahan saldo Investasi Permanen sebesar Rp1.500.000.000,00 yang merupakan penyertaan modal tahun 2019;
 - Pengurangan saldo Investasi Permanen sebesar Rp334.490.717,00 merupakan rugi bersih tahun 2019;
 - Penambahan saldo Investasi Permanen sebesar Rp6.105.000,00 yang merupakan penggunaan laba tahun 2016 oleh PD RPH;
 - Penambahan saldo Investasi Permanen sebesar Rp100.000.000,00.
- 4) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (PT Bank Jatim, Tbk.)

Saldo Investasi Permanen Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2019 pada PT Bank Jatim Tbk. adalah sebesar Rp27.158.999.750,00. Penilaian Investasi Permanen pada PT Bank Jatim Tbk menggunakan metode biaya dengan presentase kepemilikan 0,91% yang terdiri atas 108.635.999 lembar saham dengan nilai Rp250,00 per lembar saham.

Berikut penjelasan Penyertaan Modal selama Tahun 2019 yang disetorkan ke 3 Badan Usaha Milik Daerah:

Tabel Penyertaan Modal Tahun 2019

No	Penyertaan Modal	Pagu	Realisasi	Prosentase
1	Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR)	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100%
2	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	21.475.000.000,00	21.475.000.000,00	100%
3	Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD. RPH)	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100%
Jumlah		24.475.000.000,00	24.475.000.000,00	

Realisasi belanja penyertaan modal di 3 Badan Usaha Milik Daerah mencapai 100% dari pagu yang telah dianggarkan, dengan rincian SP2D belanja sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

No	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Pihak Ketiga	Nominal (Rp)	Keterangan	Nomor Bukti
1	22564/SP2D/LS	12/08/2019	BPR TUGU ARTHA PD	1.500.000.000,00	Belanja Penyertaan Modal T.A 2019 kepada PD.BANK PERKREDITAN RAKYAT TUGU ARTHA Jl.Borobudur No 18 Kota Malang	147/BKU/BU D/2019 / 00200
2	23013/SP2D/LS	16/08/2019	PEMOTONGAN HEWAN PD	1.500.000.000,00	Belanja Penyertaan Modal T.A 2019 kepada PD Rumah Potong Hewan Jl.Kol.sugiono 176 Malang	151/BKU/BU D/2019 / 00155
3	39595/SP2D/LS	02/12/2019	PDAM	21.475.000.000,00	Belanja Penyertaan Modal T.A 2019 kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang	229/BKU/BU D/2019 / 00226

5.3.1.3 ASET TETAP

31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.004.550.872.144,19	5.320.020.256.867,29

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo diatas merupakan total Aset Tetap Pemerintah Kota Malang yang terdiri dari Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Konstruksi dalam Pengerjaan. Rincian selengkapnya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.15 Aset Tetap per 31 Desember 2019

dalam rupiah

No	Uraian	31-Des-19	31-Des-18
1	Tanah	2.646.600.381.267,00	2.660.808.950.981,00
2	Peralatan dan Mesin	852.192.730.277,51	767.267.896.794,71
3	Gedung dan Bangunan	1.293.138.813.847,05	1.217.954.244.534,74
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.991.556.907.021,28	2.936.534.806.454,27
5	Aset Tetap Lainnya	65.588.044.383,01	62.189.152.930,01
6	KDP	32.635.869.400,00	34.463.337.400,00
7	Akumulasi Penyusutan	(1.877.161.874.051,66)	(2.359.198.132.227,44)
	Jumlah	5.004.550.872.144,19	5.320.020.256.867,29

1) Tanah

31 Desember 2019	31 Desember 2018
2.646.600.381.267,00	2.660.808.950.981,00

Saldo Aset Tetap - Tanah Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp2.646.600.381.267,00 dan Rp2.660.808.950.981,00. Berapapun nilai perolehannya aset tanah seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah. Pengukuran tanah berdasarkan harga perolehan dan jika tidak memungkinkan menggunakan nilai wajar. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tanah diakui sebagai



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

pengeluaran modal (*capital expenditure*) dan dikapitalisasi jika menambah masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan Perwal 33 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 tahun 2014 tentang sistem dan kebijakan akuntansi. Rincian Aset tetap tanah tahun 2019 sebagai berikut.

Tabel 5.3.16. Historis Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2019

dalam rupiah

TANAH	
Saldo Tahun 2018 (<i>Audited</i>)	2.660.808.950.981,00
Mutasi Tambah	
Kapitalisasi	0,00
Reklasifikasi	0,00
Hibah	0,00
Pengakuan Aset	0,00
Penghapusan	(155.081.993.914,00)
Peny/Koreksi	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	(155.081.993.914,00)
Mutasi Kurang	
Kapitalisasi	0,00
Reklasifikasi	0,00
Hibah	0,00
Regroup	0,00
Penghapusan	0,00
Peny/Koreksi	0,00
Jumlah Mutasi kurang	0,00
Jumlah Mutasi	(155.081.993.914,00)
Saldo Thn 2018 (<i>Audited</i>) setelah Penyesuaian	2.505.726.957.067,00
Mutasi Tambah 2019	
Kapitalisasi (Non BM)	0,00
Belanja Modal	1.052.056.200,00
Koreksi/Penyesuaian	0,00
Reklasifikasi (dari aset jenis lainnya)	0,00
Penghapusan	0,00
Hibah	0,00
Pengakuan Aset	139.821.368.000,00
Jumlah Mutasi Tambah 2019	140.873.424.200,00
Mutasi Kurang 2019	
Kapitalisasi (ke Beban Lain2/Ekstracomp)	0,00
Kapitalisasi (ke Belanja Non Modal)	0,00
Mutasi	0,00
Reklasifikasi (ke Aset Jenis Lainnya)	0,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Hibah	0,00	
Penyesuaian dari utang belanja	0,00	
Penyesuaian/koreksi	0,00	
Jumlah Mutasi Kurang 2019		0,00
Jumlah Mutasi 2019		140.873.424.200,00
Saldo Tahun 2019		2.646.600.381.267,00

Rincian penambahan aset dan pengurangan Aset Tetap Tanah dapat dilihat dalam **Lampiran 7.a s.d. 7.c**.

Aset Tetap Tanah milik Pemerintah Kota Malang sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebanyak 8.174 bidang seluas 7.870.531 m². Tanah yang telah bersertifikat sebanyak 911 bidang, tanah dalam proses pensertifikatan sebanyak 438 bidang dan yang belum bersertifikat sebanyak 6.825 bidang.

Dalam Saldo Aset Tetap Tanah terdapat aset tanah milik Pemerintah Kota Malang yang digunakan oleh pihak/instansi lain berdasarkan ijin pemakaian tanah. Adapun rincian Aset Tetap Tanah yang digunakan oleh pihak/instansi lain sebagai berikut.

Tabel 5.3.17. Aset Tetap Tanah yang Digunakan Pihak/Instansi Lain

No	Nama Pihak/Instansi Pengguna	Lokasi Tanah	Luas (m ²)	Jangka Waktu
1	Suharno, SH, MPM An. DJP Kanwil Jatim III (Kantor Inspeksi Pajak)	Jl. Surabaya No.11	947 m ²	06-06-2008 s/d 06-06-2013
2	Kantor Bea dan Cukai	Jl. Surabaya No.2	7.000 m ²	2020-2025
3	Drs. Sistyanto An. POLSEKTA (Kantor Polsekta)	Jl. Kol. Sugiono (Lowokdoro)	500 m ²	23-01-1993 s/d 23-01-1994
4	Kantor Inspeksi Pajak Negara	Dalam proses penelusuran		
5	Tri Candra Heru Tondo (PT. Bank Umum Nasional)	Jl. Rukem 11-A	310 m ²	02-11-2007 s/d 02-11-2012
6	Jawatan Kehutanan Seksi Perlindungan dan Pengawaetan Alam Jawa Timur yang diwakili oleh Drs. AA Hutabarat (YYS. Kehutanan SLF PPA/Sumarso)	Jl. Rukem	1.300 m ²	01-01-1977 s/d 01-01-1980
7	Amin Idris Martoyo, BA An. Kantor Imigrasi Malang (Kantor Imigrasi)	Jl. Raung	767 m ²	26-09-1989 s/d 26-09-1990
8	Saimin (Dinas Angkatan Laut)	Jl. Sumbersari	789 m ²	01-11-1954 s/d 01-11-1957
9	H.T. Kasmun, Koordinator Ketua MWC.NU. Kec. Lowokwaru (T. Kosenon - Koordinator PBNU)	Jl. Candi Panggung	500 m ²	18-09-1995 s/d 18-09-1996
10	Kep. Kan. Dep. Agama KT, Malang	Jl. Candi Panggung	415 m ²	Proses pembuatan perjanjian pinjam pakai
11	H.R. Soenar, BA (PLN)	Jl. Bengawan Solo No.37	3.000 m ²	23-03-1992 s/d 23-03-1993
12	Drs. H.D. Hadiwardoyo (DKOPINDA)	Jl. R. Panji Suroso No.3	750 m ²	23-01-1993 s/d 23-01-1994
13	Soewito (Soewito An. KONKEP Koperas)	Jl. R. Panji Suroso	1.000 m ²	01-10-1992 s/d 01-10-1993



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Terhadap Aset Tetap Tanah yang di gunakan oleh pihak/instansi lain, Pemerintah Kota Malang sudah melakukan inventarisasi, melayangkan surat pemberitahuan untuk melakukan pembaharuan perjanjian dan selanjutnya akan dibuatkan perjanjian pinjam pakai bagi instansi vertikal dan pembaharuan perpanjangan bagi pihak selain instansi vertikal. Selain permasalahan di atas masih terdapat permasalahan dalam pencatatan Aset Tetap Tanah dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Aset Eks Cina yang telah ditetapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Daerah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan namun belum dicatat di dalam KIB. Rincian Aset Eks Cina yang diserahkan ke Pemerintah Kota Malang pada tabel berikut.

**Tabel 5.3.18. Rincian Aset Eks Cina yang Belum Dicatat
Dalam Neraca Aset Tetap**

No	Nama Aset	Lokasi	Jenis Aset	Luas (m ²)	Sertifikat	Keputusan Menteri Keuangan
1	SMP Negeri IX	Jln. Prof. Yamin VI/18, Sukoharjo, Klojen, Kota Malang	Tanah	1.533	Belum	KMK No. 99/KM.6/2012 Tgl 30 April 2012
2	Kantor Kelurahan Sukoharjo	Jln. Gatot Subroto IV/3, Sukoharjo, Klojen, Kota Malang	Tanah	530	Belum	KMK No. 57/KM.6/2012 Tgl 19 Maret 2012

Pemerintah Kota Malang belum mencatat aset eks Cina karena belum dilakukan penilaian terhadap aset tersebut.

- b. Aset Tanah untuk bangunan pendidikan dan latihan di SDN Pisang Candi IV belum tercatat di KIB A karena belum diketahui dan belum diinventarisasi sehingga belum diketahui luas dan nilainya.
- c. Hasil inventarisasi Ijin Pemakaian tanah tahun 2017 ditemukan 65 Ijin Pemakaian tanah yang sudah berubah status kepemilikan. Sedangkan hasil inventarisasi Ijin Pemakaian tanah tahun 2018 di Kecamatan Blimbing, diketahui sebanyak 96 IP tanah yang sudah berubah status kepemilikan yaitu berubah status menjadi SHM/SHGB sebanyak 79 bidang dan 17 bidang berstatus pelepasan hak dengan luas keseluruhan 44.235m². Adapun tahun terbit SHM, SHGB, dan pelepasan hak tersebut terjadi antara tahun 1997 s.d. 2017. Atas aset Pemerintah Kota Malang yang telah berubah status tersebut, Pemerintah Kota Malang tidak memiliki dokumen pelepasan haknya.
- d. Aset tanah di bawah jalan yang meliputi ruang milik jalan (rumija) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan oleh Pemerintah Kota Malang melalui DPPUR telah dilaksanakan inventarisasi detail *ledger* jalan pada tahun 2019 sebanyak 20 obyek dan tahun 2020 sebanyak 70 obyek bisa dilihat pada **Lampiran 6.d**. Hasil inventarisasi adalah detail tanah rumija. Pencatatan di dalam daftar aset daerah belum dilaksanakan karena variabel nilai Nilai Aset Tetap tanah bawah jalan dan bukti pengakuan penguasaan aset tersebut belum diperoleh.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Saldo Tanah dalam Neraca Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2019 senilai Rp2.646.600.381.267,00 antara lain termasuk Tanah Ijin Pemakaian. Berdasarkan Laporan BMD, Jumlah Tanah Ijin Pemakaian adalah sebanyak 6.223 bidang, seluas 1.134.031 m² senilai Rp427.226.034.000,00. Data Tanah Ijin Pemakaian dalam Laporan BMD tersebut belum sinkron dengan data Obyek Tanah Ijin Pemakaian yang ditatausahakan dalam aplikasi pendukung pencatatan tanah yaitu aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Ijin Pemakaian Tanah (SIPIPT) sebanyak 12.930 SK Penerbitan dan Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah atas 7.381 bidang Tanah maupun Daftar Wajib Retribusi Ijin Pemakaian Tanah 5.595 bidang.

Sampai dengan 31 Desember 2019, Pemerintah Kota Malang masih melakukan proses rekonsiliasi atas ketiga data tersebut. Obyek Tanah Ijin Pemakaian yang ditatausahakan dalam aplikasi SIPIPT digunakan sebagai dasar untuk melakukan inventarisasi Aset Tanah Ijin Pemakaian sejak tahun 2014-2018. Jumlah SK Ijin Pemakaian yang telah diinventarisasi adalah sebanyak 6.399 SK Ijin Pemakaian. Berdasarkan hasil inventarisasi tanah Ijin Pemakaian Tahun 2014-2018 tersebut diketahui antara lain adanya Tanah Ijin Pemakaian yang telah berubah status menjadi SHM/SHGB/Pelepasan Hak sebanyak 361 bidang tanah, fungsi pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukkan yang ditetapkan dalam SK Ijin Pemakaian, SK Ijin Pemakaian yang belum diperpanjang serta adanya penghuni Tanah Ijin Pemakaian yang bukan pemegang ijin tanpa sepersetujuan Pemerintah Kota Malang. Hasil inventarisasi Tanah Ijin Pemakaian tersebut belum ditindaklanjuti secara memadai sebagai bahan perbaikan pencatatan Tanah Ijin Pemakaian dalam Laporan BMD/Neraca per 31 Desember 2019.

2) **Peralatan dan Mesin**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
852.192.730.277,51	767.267.896.794,71

Jumlah tersebut merupakan jumlah aset tetap peralatan dan mesin yang dimiliki Pemerintah Kota Malang Per 31 Desember 2019, yang dalam penyusunannya terdapat penyesuaian-penyesuaian yang meliputi koreksi dampak perubahan Perwal 33 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 tahun 2014 tentang sistem dan kebijakan akuntansi, penyesuaian (mutasi, penghapusan dan reklas aset), belanja modal, penyesuaian kapitalisasi aset, hibah. Dalam pengukuran aset peralatan dan mesin didasarkan pada biaya perolehan sesuai dengan nilai satuan minimum kapitalisasi peralatan dan mesin, atau nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh secara donasi. Pengeluaran setelah perolehan awal peralatan dan mesin diakui sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) dan dikapitalisasi jika memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang. Pengeluaran yang



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

diakui berdasarkan kebijakan Nilai satuan minimum kapitalisasi aset peralatan dan mesin yang telah ditentukan dalam Perwal 33 Tahun 2017.

Saldo Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp8521.92.730.277,51 dan Rp767.267.896.794,71 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.19. Historis Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019

dalam rupiah

Saldo Tahun 2018 (Audited)		767.267.896.794,71
Mutasi Tambah		
Kapitalisasi	0,00	
Mutasi	429.474.000,00	
Reklasifikasi	0,00	
Hibah	679.067.000,00	
Pengakuan Aset	560.325.000,00	
Penghapusan	0,00	
Peny/Koreksi	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah	1.668.866.000,00	
Mutasi Kurang		
Kapitalisasi	6.547.000,00	
Mutasi	429.474.000,00	
Reklasifikasi	7.362.000,00	
Hibah	0,00	
Regroup	0,00	
Penghapusan	14.971.600,00	
Peny/Koreksi	0,00	
Jumlah Mutasi kurang	458.354.600,00	
Jumlah Mutasi		1.210.511.400,00
Saldo Thn 2018 (Audited) setelah Penyesuaian		768.478.408.194,71
Mutasi Tambah 2019		
Kapitalisasi (Non BM)	132.857.800,00	
Belanja Modal	84.110.580.425,80	
Belanja Modal BOSNAS SD	3.551.777.453,00	
Belanja Modal BOSNAS SMP	2.991.824.101,00	
Koreksi/Penyesuaian	0,00	
Reklasifikasi (dari aset jenis lainnya)	1.692.030.880,00	
Mutasi	3.753.728.866,00	
Pengakuan Aset	130.927.500,00	
Hibah	1.200.034.990,00	
Jumlah Mutasi Tambah 2019	97.563.762.015,80	
Mutasi Kurang 2019		



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Kapitalisasi (ke Beban Lain2/Ekstracomp)	6.206.127.841,00	
Kapitalisasi (ke Belanja Non Modal)	316.772.450,00	
Mutasi	3.753.728.866,00	
Reklasifikasi (ke Aset Jenis Lainnya)	688.851.650,00	
Hibah	0,00	
Penghapusan	1.179.150.000,00	
Penyesuaian/koreksi	1.704.809.126,00	
Jumlah Mutasi Kurang 2019	13.849.439.933,00	
Jumlah Mutasi 2019		83.714.322.082,80
Saldo Tahun 2019		852.192.730.277,51

Rincian penambahan aset dan pengurangan aset dapat dilihat dalam **Lampiran 8.a s.d. 8.c.** dan untuk penambahan aset yang berasal dari belanja BOSNAS dapat dilihat pada **Lampiran 8.d s.d. 8.g.**

Saldo Peralatan dan Mesin tersebut belum termasuk:

- Peralatan dan Mesin pada Dinas Kesehatan yang dalam keadaan rusak dan berasal dari aset *dropping* Kementerian Kesehatan, yang sampai saat ini belum diperoleh berita acara serah terima barang, sehingga dikelompokkan sebagai barang dengan status siaga dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.20. Peralatan dan Mesin *Dropping* Belum Dicatat di Daftar Inventaris

dalam unit

No	Jenis Kendaraan	Jumlah
1	Kendaraan Roda 2	40
2	Kendaraan Roda 4	6
3	Peralatan dan Mesin	191
	Jumlah	237

- Peralatan dan Mesin pada UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga Dinas Kesehatan yang dalam keadaan baik, merupakan hibah dari Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan pada tahun 2011 dan sampai saat ini belum diperoleh berita acara serah terima barang, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.21. Aset Peralatan dan Mesin UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga Belum Dicatat Pada Neraca

dalam unit

No	Jenis Barang	Jumlah
1	<i>Stopwatch</i>	2
2	<i>Stethoscope</i>	2
3	Tensi Meter Berdiri	2
4	<i>Metronome</i>	2
5	<i>Handgrip Dynamometer</i>	2



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

No	Jenis Barang	Jumlah
6	<i>Back Leg Dynamometer</i>	2
7	<i>Pull Push Dynamometer</i>	2
8	<i>Heart Rate Monitor</i>	2
9	<i>Ergocycle For Diagnostic</i>	2
Jumlah		18

- c. Terdapat Aset Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan yang belum dicatat di Daftar Inventaris yang berasal dari bantuan tunai (*block grant*) tahun 2014 dikarenakan sampai pada saat ini belum ada Berita Acara Serah Terima barang yang rinci dari pemerintah pusat senilai Rp89.820.182,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.22. Bantuan Tunai (*Block Grant*) Aset Peralatan dan Mesin Belum Masuk Daftar Inventaris

dalam rupiah

No	Nama Sekolah	Peruntukan Bantuan	Nilai Bantuan
1	SMA Negeri 8	Peralatan Kantin	100.000.000,00
2	SMP Negeri 13	Bantuan Alat TIK	44.910.091,00
3	SMP Negeri 14	Bantuan Alat TIK	44.910.091,00
Jumlah			189.820.182,00

Aset Tetap berupa peralatan kantin pada SMA Negeri 8 sebesar Rp100.000.000,00 tersebut belum disertai BAST dari pemerintah pusat sehingga belum pernah dicatat dalam Daftar Inventaris Pemerintah Kota Malang. Aset tersebut belum diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehubungan dengan pengalihan pengelolaan satuan pendidikan menengah tingkat atas dari Pemerintah Kota ke Pemerintah Provinsi.

3) Gedung dan Bangunan

31 Desember 2019	31 Desember 2018
1.293.138.813.847,05	1.217.954.244.534,74

Jumlah tersebut merupakan jumlah Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dimiliki Pemerintah Kota Malang Per 31 Desember 2019 yang didalamnya terdapat koreksi kapitalisasi atas belanja perolehan hasil perhitungan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 PSAP berbasis akrual Pernyataan Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap pada bab Penilaian Awal Aset Tetap pada paragraf 30 dan 33 tentang biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung kepada aset yaitu biaya perencanaan (DED), biaya pelaksanaan konstruksi dan biaya pengawasan. Selain itu terdapat kapitalisasi belanja pemeliharaan yang disesuaikan menjadi aset tetap gedung dan bangunan, reklasifikasi terhadap konstruksi dalam pengerjaan menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena sudah selesainya proses pembangunan dan serah terimanya kepada Pemerintah Kota Malang, pengeluaran nominal gedung dan bangunan Pemerintah Kota Malang yang dihitung dalam kerjasama (BOT) dengan pihak ketiga. Sedangkan untuk batas minimal



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

nilai kapitalisasi aset Gedung dan Bangunan berdasarkan Perwal 33 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 tahun 2014 tentang sistem dan kebijakan akuntansi.

Selain itu jumlah dalam penghitungan aset Gedung dan Bangunan terdapat penyesuaian-penyesuaian yang meliputi penyesuaian kapitalisasi aset, reklasifikasi aset, hibah, dan penghapusan.

Saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.293.138.813.847,05 dan Rp1.217.954.244.534,74, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.23 Historis Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019

dalam rupiah

GEDUNG DAN BANGUNAN		
Saldo Thn 2018 (Audited)		1.217.954.244.534,74
Mutasi Tambah		
Kapitalisasi	0,00	
Mutasi	0,00	
Reklasifikasi	239.970.000,00	
Penghapusan	0,00	
Peny/Koreksi	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah	239.970.000,00	
Mutasi Kurang		
Kapitalisasi	0,00	
Mutasi	0,00	
Reklasifikasi	193.428.000,00	
Hibah	0,00	
Regroup	0,00	
Penghapusan	565.415.000,00	
Peny/Koreksi	57.648.158,55	
Jumlah Mutasi kurang	816.491.158,55	
Jumlah Mutasi		(576.521.158,55)
Saldo Thn 2018 (Audited) setelah Penyesuaian		1.217.377.723.376,19
Mutasi Tambah 20189		
Belanja Barang dan Jasa	0,00	
Belanja Modal	65.294.258.282,86	
Belanja Modal BOSNAS SD	0,00	
Belanja Modal BOSNAS SMP	40.950.000,00	
Koreksi/Penyesuaian	0,00	
Reklasifikasi	0,00	
Mutasi	0,00	
Hibah	13.479.304.761,00	
Jumlah Mutasi Tambah 2019	78.814.513.043,86	



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Mutasi Kurang 2019		
Kapitalisasi (ke Beban Lain2/Ekstracomp)	1.109.122.523,00	
Kapitalisasi (ke Belanja Non Modal)	0,00	
Reklasifikasi (Ke aset jenis lainnya)	1.898.250.050,00	
Hibah	0,00	
Penghapusan	0,00	
Penyesuaian/koreksi	46.050.000,00	
Jumlah Mutasi Kurang 2019	3.053.422.573,00	
Jumlah Mutasi 2019		75.761.090.470,86
Saldo Tahun 2019		1.293.138.813.847,05

Rincian penambahan aset dan pengurangan aset dapat dilihat dalam **Lampiran 9.a s.d. 9.c**

Saldo Gedung dan Bangunan tersebut belum termasuk Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan yang belum dicatat di Daftar Inventaris yang berasal dari bantuan tunai (*block grant*) tahun 2013 senilai Rp462.000.000,00 dan tahun 2014 sebesar Rp5.851.836.000,00 karena belum diperoleh berita acara serah terima barang dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.24. Bantuan Tunai (*Block Grant*) Dinas Pendidikan
Belum Masuk Daftar Inventaris**

dalam rupiah

No	Nama Sekolah	Peruntukan Bantuan	Nilai Bantuan
Tahun 2013			
1	SMKN 8	RKB SMK	231.000.000,00
2	SMKN 11	RKB SMK	231.000.000,00
Tahun 2014			
3	SMPN 17	R K B	232.000.000,00
4	SMPN 24	Perpustakaan	193.800.000,00
5	SMPN 25	Lab IPA	218.025.000,00
6	SMPN 26	Perpustakaan	193.800.000,00
7	SMKN 11	RKB SMK	391.713.000,00
8	SMKN 10	RKB SMK	391.713.000,00
9	SMKN 1	RKB SMK	391.173.000,00
10	SMKN 5	RKB SMK	261.142.000,00
11	SMKN 9	RKB SMK	261.142.000,00
12	SMKN 6	RKB SMK	543.789.000,00
13	SMKN 12	RKB SMK	362.526.000,00
14	SMKN 12	RKB SMK	130.571.000,00
15	SMPN 16	Kantin Kejujuran	10.000.000,00
16	SMKN 7	RKB SMK	261.142.000,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

No	Nama Sekolah	Peruntukan Bantuan	Nilai Bantuan
17	SMKN 4	Pengembangan SMK Rujukan	1.004.300.000,00
18	SMKN 2	Pengembangan SMK Rujukan	1.004.300.000,00
Jumlah			6.313.136.000,00

Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada 11 SMK Negeri sebesar Rp5.465.511,00 berupa bangunan RKB dan pengembangan SMK Rujukan tersebut belum disertai BAST dari pemerintah pusat sehingga belum pernah dicatat dalam Daftar Inventaris Pemerintah Kota Malang. Aset tersebut belum diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehubungan dengan adanya pengalihan pengelolaan satuan pendidikan menengah tingkat atas dari Pemerintah Kota ke Pemerintah Provinsi.

4) **Jalan, Irigasi dan Jaringan**

31 Desember 2018	31 Desember 2018
<u>1.991.556.907.021,28</u>	<u>2.936.534.806.454,27</u>

Saldo Aset Tetap – Jalan Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.991.556.907.021,28 dan Rp2.936.534.806.454,27. Sesuai dengan Perwal 33 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 tahun 2014 tentang sistem dan kebijakan akuntansi, untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan tidak ada kebijakan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapapun nilai perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikapitalisasi. Pengukuran aset jalan, irigasi dan jaringan berdasarkan biaya perolehan berapapun nilainya atau nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh secara donasi. Pengeluaran setelah perolehan awal jalan, irigasi dan jaringan diakui sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) dan dikapitalisasi jika memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang. Pengeluaran yang diakui berdasarkan kebijakan Nilai satuan minimum kapitalisasi aset jalan, irigasi dan jaringan yang telah ditentukan.

Jumlah Saldo Aset Tetap – Jalan, Irigasi, dan Jaringan merupakan jumlah Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan beserta penyesuaiannya yang dimiliki Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

**Tabel 5.3.25. Historis Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2019**

dalam rupiah

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	
Saldo Tahun 2018 (Audited)	2.936.534.806.454,27
Mutasi Tambah	
Kapitalisasi	0,00
Mutasi	0,00
Reklasifikasi	2.097.200.000,00
Hibah	0,00
Regroup	0,00
Penghapusan	0,00
Peny/Koreksi	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	2.097.200.000,00
Mutasi Kurang	
Kapitalisasi	0,00
Mutasi	0,00
Reklasifikasi	191.970.000,00
Regroup	0,00
Penghapusan	0,00
Peny/Koreksi	1.026.033.389.681,99
Jumlah Mutasi kurang	1.026.225.359.681,99
Jumlah Mutasi	(1.024.128.159.681,99)
Saldo Thn 2018 (Audited) setelah Penyesuaian	1.912.406.646.772,28
Mutasi Tambah 2019	
Belanja Modal	77.548.272.829,00
Belanja Modal BOSNAS SD	161.330.600,00
Belanja Modal BOSNAS SMP	30.000.000,00
Kapitalisasi (dari Belanja Non Modal)	1.213.850.000,00
Mutasi	0,00
Reklasifikasi (dari aset jenis lainnya)	216.806.820,00
Regrouping	0,00
Penyesuaian/koreksi	0,00
Jumlah Mutasi Tambah 2019	79.170.260.249,00
Mutasi Kurang 2019	
Penghapusan	0,00
Hibah	0,00
Koreksi/penyesuaian	20.000.000,00
Reklasifikasi	0,00
Mutasi	0,00
Ekstrakomtabel	0,00
Koreksi BPK (Dengan Persetujuan BPKAD)	0,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Jumlah Mutasi Kurang 2018	20.000.000,00	
Jumlah Mutasi 2018		79.150.260.249,00
Saldo Tahun 2018		1.991.556.907.021,28

Rincian penambahan aset dan pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat dalam **Lampiran 10.a s.d. 10.c**.

5) Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2019	31 Desember 2018
<u>65.588.044.383,01</u>	<u>62.189.152.930,01</u>

Saldo Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp65.588.044.383,01 dan Rp62.189.152.930,01. Jumlah tersebut merupakan jumlah Aset Tetap Lainnya beserta penyesuaiannya yang dimiliki Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.26. Historis Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019

dalam rupiah

ASET TETAP LAINNYA		
Saldo Tahun 2018 (<i>Audited</i>)		62.189.152.930,01
Mutasi Tambah		
Kapitalisasi	0,00	
Mutasi	0,00	
Regroup	0,00	
Penghapusan	0,00	
Reklasifikasi	7.362.000,00	
Jumlah Mutasi Tambah		7.362.000,00
Mutasi Kurang		
Kapitalisasi	0,00	
Mutasi	0,00	
Reklasifikasi	0,00	
Hibah	0,00	
Regroup	0,00	
Penghapusan	0,00	
Jumlah Mutasi kurang		0,00
Jumlah Mutasi		7.362.000,00
Saldo Thn 2018 (<i>Audited</i>) setelah Penyesuaian		62.196.514.930,01
Mutasi Tambah 2019		
Belanja Modal	1.493.582.570,00	
Belanja Modal BOSNAS SD	84.876.150,00	
Belanja Modal BOSNAS SMP	1.479.654.683,00	
Kapitalisasi (dari Belanja Non Modal)	0,00	



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Reklasifikasi (dari aset jenis lainnya)	360.532.000,00	
Penyesuaian dari pembayaran utang	0,00	
Mutasi	0,00	
Hibah	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah 2019		3.418.645.403,00
Mutasi Kurang 2019		
Kapitalisasi (ke beban lain2/ekstracomp)	18.408.750,00	
Hibah	0,00	
Kapitalisasi (ke Belanja Non Modal)	0,00	
Reklasifikasi (ke aset)	0,00	
Mutasi	0,00	
Penghapusan	0,00	
Penyesuaian/koreksi	8.707.200,00	
Jumlah Mutasi Kurang 2019		27.115.950,00
Jumlah Mutasi 2019		3.391.529.453,00
Saldo Tahun 2019		65.588.044.383,01

Rincian penambahan aset dan pengurangan Aset Tetap Lainnya dapat dilihat dalam **Lampiran 11.a s.d. 11.c**.

Aktiva tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam kelompok aset tetap di atas. Dalam nilai tersebut termasuk penyesuaian penambahan aset dari Dana BOS tahun 2019.

Saldo Aset Tetap Lainnya belum termasuk:

- Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan namun belum dicatat di Daftar Inventaris yang berasal dari bantuan tunai (*block grant*) tahun 2013 karena belum diperoleh berita acara serah terima barang dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.27. Bantuan Tunai (*Block Grant*) Dinas Pendidikan
Belum Masuk Daftar Inventaris**

dalam rupiah

No	Nama Sekolah	Peruntukan Bantuan	Nilai Bantuan
1	SDN Karang Besuki 2	Alat Kesenian	70.000.000,00
2	SMPN 24	Alat Kesenian	70.000.000,00
3	SMPN 18	Alat Kesenian	70.000.000,00
4	SMPN 23	Alat Kesenian	70.000.000,00
5	SMAN 8	Alat Kesenian	70.000.000,00
Jumlah			350.000.000,00

Aset Tetap Lainnya berupa alat kesenian pada SMA Negeri 8 sebesar Rp70.000.000,00 tersebut belum disertai BAST dari pemerintah pusat sehingga belum pernah dicatat dalam Daftar Inventaris Pemerintah Kota Malang. Aset tersebut belum diserahkan kepada Pemerintah



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Provinsi Jawa Timur sehubungan dengan adanya pengalihan pengelolaan satuan pendidikan menengah tingkat atas dari Pemerintah Kota ke Pemerintah Provinsi.

- b. Aset Tetap Lainnya yang dikelola oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Malang berupa binatang dalam keadaan hidup yang terdiri dari 22 satwa yang dilindungi undang-undang dan 86 satwa yang tidak dilindungi undang-undang, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.28. Binatang Hidup Milik UPT Taman Rekreasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang Belum Masuk Daftar Inventaris

No	Jenis Satwa yang Dilindungi UU	Jumlah (unit)	Jenis Satwa yang Tidak Dilindungi UU	Jumlah (unit)
1	Kera Jawa	1	Landak	15
2	Rangkok	2	Derkuku	10
3	Kuntul Cina	2	Kalong	1
4	Bayan	1	Monyet Ekor Panjang	2
5	Burung Merak Hijau	5	Itik Alabio	1
6	Burung Hantu	1	Nuri Kelam	3
7	Burung Kakatua Raja	1	Ayam Mutiara	4
8	Burung Kakatua Besar Jambul Kuning	5	Merpati Batu/Lokal	20
9	Burung Elang Laut	2	Angsa	6
10	Burung Elang Hitam	1	Nuri Merah Kepala Hitam	1
11	Burung Kasuari Gelambir Tunggal	1	Musang/Luwak	2
			Itik	2
			Kalkun	6
			Merpati Kipas	6
			Ayam Pelung	0
			Ayam Ketawa	1
			Ayam Kate	4
			Ular Sanca Batik	2
	Jumlah	22		86

Sebanyak 22 satwa yang dilindungi undang-undang tersebut berasal dari hibah Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan 86 satwa yang tidak dilindungi undang-undang berasal dari sumbangan warga Malang.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2019	31 Desember 2018
32.635.869.400,00	34.463.337.400,00

Saldo Aset Tetap - KDP Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp32.635.869.400,00 dan Rp34.463.337.400,00.

Jumlah tersebut merupakan beberapa proyek konstruksi yang sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 belum selesai dikerjakan dan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan dengan mengakumulasikan juga biaya-biaya penunjang sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 7 tentang



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Akuntansi Aset Tetap pada bab Penilaian Awal Aset Tetap pada paragraf 30 dan 34 tentang biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung kepada aset, yaitu dengan mengkapitalisasi belanja perencanaan (DED) dan belanja pengawasan dalam nilai konstruksi dalam pengerjaan yang tercatat dalam neraca. Penjelasan adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.29. Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019

dalam rupiah

ASET TETAP KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		
Saldo Thn 2018 (Audited)		34.463.337.400,00
Mutasi Tambah 2019		
Kapitalisasi	0,00	
Reklasifikasi	0,00	
Hibah	0,00	
Regrouping	0,00	
Penyesuaian/koreksi	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah	0,00	
Mutasi Kurang		
Kapitalisasi	0,00	
Reklasifikasi	0,00	
Hibah	0,00	
Regrouping	0,00	
Penghapusan	0,00	
Jumlah Mutasi Kurang	0,00	
Jumlah Mutasi		0,00
Saldo Tahun 2018 (Audited) setelah Penyesuaian		34.463.337.400,00
Mutasi Tambah 2019		
Belanja Modal	0,00	
Kapitalisasi (dari Belanja Non Modal)	0,00	
Mutasi	0,00	
Reklasifikasi (dari aset jenis lainnya)	317.732.000,00	
Penghapusan	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah 2019	317.732.000,00	
Mutasi Kurang 2019		
Kapitalisasi (Ke Belanja Non Modal)	0,00	
Mutasi	0,00	
Reklasifikasi	2.145.200.000,00	
Hibah	0,00	
Penyesuaian/koreksi	0,00	
Jumlah Mutasi Kurang 2019	2.145.200.000,00	
Jumlah Mutasi 2019		(1.827.468.000,00)
Saldo Tahun 2019		32.635.869.400,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Rincian penambahan aset dan pengurangan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dilihat dalam **Lampiran 12.a s.d. 12.d.**

7) **Akumulasi Penyusutan**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
(1.877.161.874.051,66)	(2.359.198.132.227,44)

Saldo Aset Tetap – Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.877.161.874.051,66 dan Rp2.359.198.132.227,44. Sesuai dengan Perwal Nomor 33 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 tahun 2014 tentang sistem dan kebijakan akuntansi, perhitungan penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) dengan masa manfaat sesuai dengan lampiran Perwal 33 tahun 2017 tentang sistem dan Kebijakan Akuntansi. Perbandingan komparatif akumulasi penyusutan sebagai berikut.

Tabel 5.3.30. Akumulasi Penyusutan Tahun 2019

dalam rupiah

Aset Tetap	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
Peralatan dan Mesin	598.060.637.350,91	493.948.400.644,97
Gedung dan Bangunan	198.291.851.971,68	172.252.548.445,68
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.076.810.526.431,88	1.689.780.252.646,19
Aset Tetap Lainnya	3.998.858.297,19	3.216.930.490,60
Jumlah	1.877.161.874.051,66	2.359.198.132.227,44

Informasi Tambahan Atas Aset Tetap

Sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Kota Malang menerima hibah dari pihak ke-3 dalam bentuk *Corporate Social Responsibilities* (CSR) berupa aset yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Aset tersebut belum tercatat dan diakui sebagai aset tetap pada neraca Pemerintah Kota Malang dikarenakan masih dilakukan penelusuran atas besaran nilai per unit barang yang diterima. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Bab VI – Penjelasan Atas Informasi-Informasi Keuangan dan Non Keuangan. Rincian aset yang bersumber dari CSR sebagaimana terlampir pada **Lampiran 13A** dan telah diungkap lebih lanjut dalam LHP LKPD TA 2017 Pemerintah Kota Malang, pada temuan SPI terkait Aset Tetap.

Selain Aset Tetap tersebut diatas, Pemerintah Kota Malang mencatat aset *ekstrakomtable*, yaitu aset-aset dengan nilai dibawah batas minimum kapitalisasi aset tetap. Nilai aset *ekstrakomtable* Tahun 2019 sebesar Rp40.942.513.725,87. **Rincian pada lampiran 13B.**



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

5.3.1.4 DANA CADANGAN

31 Desember 2019	31 Desember 2018
0,00	0,0

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0,00.

5.3.1.5 ASET LAINNYA

31 Desember 2019	31 Desember 2018
152.284.209.651,59	152.401.687.920,66

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp152.286.209.651,95 diklasifikasikan menjadi beberapa pos, yaitu:

Tabel 5.3.31. Aset Lainnya

	dalam rupiah	
Keterangan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Tuntutan Ganti Rugi	50.105.000,00	52.105.000,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	106.449.318.000,00	106.449.318.000,00
Aset Tak Berwujud	8.449.293.987,50	8.730.276.765,25
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	483.999.255,50	318.494.746,46
Aset Lain-Lain	36.851.493.408,95	36.851.493.408,95
Jumlah	152.284.209.651,95	152.401.687.920,66

1) Tuntutan Ganti Rugi

31 Desember 2019	31 Desember 2018
50.105.000,00	52.105.000,00

Saldo Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2019 dan 2018 masing - masing sebesar Rp50.105.000,00 dan Rp52.105.000,00. Rincian tagihan tuntutan ganti kerugian daerah sebagai berikut.

Tabel 5.3.32. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2019

No	Nama	Barang Yang Hilang	Saldo Piutang Tahun 2018	Peny. (+/-)	Pembayaran Tahun 2019	Saldo Piutang Tahun 2019	Jatuh Tempo Angsuran TGR (sesuai BA Sidang BA Majelis PPKD)	Jaminan
1	ANI RAHMAWIYATI	Kend.roda dua merk Honda C 100 thn 2004 Nopol N 9927 BC (Inv. Inspektorat Kota Malang)	3.200.000,00		2.000.000,00	1.200.000,00	akhir Nopember 2019	-
2	Drs. ATUS BACHTIAR	Kend. roda dua merk Honda C 100 thn 2004 Nopol N 9942 BC (Inv. Kel. Klojen Kec.Klojen Kota Malang)	2.250.000,00		0,00	2.250.000,00	-	-
3	SOEGIANTO	Kend. roda dua merk Honda Supra X thn 2006 Nopol N 2160 AP (Inv. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang)	2.780.000,00		0,00	2.780.000,00	8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Desember 2019	-



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

No	Nama	Barang Yang Hilang	Saldo Piutang Tahun 2018	Peny. (+/-)	Pembayaran Tahun 2019	Saldo Piutang Tahun 2019	Jatuh Tempo Angsuran TGR (sesuai BA Sidang BA Majelis PPKD)	Jaminan
4	ELVIRA RINDI SAFITRI	Kend. roda empat merk Toyota Kijang KF 52 Super thn 1995 Nopol N 349 AP	43.875.000,00		0,00	43.875.000,00	48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak bulan Desember 2019	-
Jumlah			52.105.000,00		2.000.000,00	50.105.000,00		

Saldo tuntutan Ganti Kerugian Daerah didasarkan pada Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah per Semester II tahun 2017 pada Pemerintah Kota Malang Nomor 66/LPPKD/XVIII.SBY/12/2017 tanggal 29 Desember 2017, pada **Lampiran 13** atas kasus yang telah diterbitkan SK Pembebanan/SKTJM/putusan pengadilan sebesar Rp52.105.000,00.

Jumlah tersebut merupakan reklasifikasi dari Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi menjadi Aset Lainnya karena tidak terdapat jadwal waktu pembayaran dan jatuh tempo pelunasannya lebih dari 12 bulan. Sebelumnya, pelaksanaan pembayaran atas kerugian daerah belum diterapkan pemotongan gaji oleh bendahara, tetapi sejak tahun 2014. pembayaran atas kerugian daerah sudah dilakukan melalui pemotongan gaji.

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

31 Desember 2019	31 Desember 2018
106.449.318.000,00	106.449.318.000,00

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp106.449.318.000,00. Perincian BOT bisa dilihat pada tabel dibawah ini dan pada **Lampiran 15**.

Tabel 5.3.33. Daftar Aset BOT per 31 Desember 2019

dalam rupiah

No	Keterangan	Nilai	Jumlah per 31 Desember 2019	Jumlah per 31 Desember 2018
1.	Alun-Alun Mal Ramayana PT. SadeanIntramitra Corporation Kontrak No. 050/20/428.114/1997 Tanah seluas 7.607 m	7.607.000.000,00	7.607.000.000,00	7.607.000.000,00
2.	Pasar Besar -Matahari PT. Matahari Putra Prima Kontrak No : 050/50/420.112/2004 Tanah seluas 21.820 m ² Bangunan	21.820.000.000,00 22.540.508.000,00	44.360.508.000,00	44.360.508.000,00
3.	Malang Olympic Garden (MOG) PT. Mustika Taman Olympic Kontrak No : 050/15/35.73.112/2006 Addm : 050/12/35.73.112/2007	22.755.810.000,00	22.755.810.000,00	22.755.810.000,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

No	Keterangan	Nilai	Jumlah per 31 Desember 2019	Jumlah per 31 Desember 2018
4	Pasar Dinoyo PT. Citra Gading Asritama Kontrak Nomor : 050/558/35.73.112/2010 Tanah seluas 9.980 m ² Bangunan	4.870.000.000,00 7.000.000.000,00	11.870.000.000,00	11.870.000.000,00
5	Pasar Blimbing PT. Karya Indah Sukses konsorsium dengan PT.Fortunindo dan PT. RakaUtama Kontrak No : 050/559/35.73.112/2010 Tanah seluas 17.320 m ² Bangunan	13.856.000.000,00 6.000.000.000,00	19.856.000.000,00	19.856.000.000,00
Jumlah			106.449.318.000,00	106.449.318.000,00

Keterangan:

- a) Nilai aset BOT Ramayana dengan mengacu Buletin Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran Nomor 2 pada Bab VIII poin D.1 tentang Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam format Bangun, Kelola, Serah atau BOT, bahwa nilai yang dicatat dalam Neraca Pemerintah Daerah adalah sebesar aset yang diserahkan oleh Pemerintah Kota Malang untuk dikerjasamakan, yaitu sebesar nilai tanah yang tercantum dalam neraca awal Pemerintah Kota Malang tahun 2001 sebesar Rp7.607.000.000,00 bukan nilai yang tercantum dalam perjanjian kontrak Nomor 050/20/428.114/1997 senilai Rp3.584.000.000,00;
- b) Nilai aset BOT Pasar Besar sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Malang dengan PT MPP Nomor 050/50/420.112/2004 dengan aset milik Pemerintah Kota Malang yang dikerjasamakan berupa tanah Pasar Besar seluas 21.820 m² senilai Rp21.820.000.000,00 dan bangunan senilai Rp22.540.508.000,00. (Perjanjian bersama antara Pemerintah Kota Malang dengan PT. SFK tentang Penyerahan Bagunan Pasar Besar, Nomor 050/01/420.112/2004 sebesar Rp22.540.508.000,00 dan menyesuaikan nilai yang sebelumnya pada neraca tahun 2008 sebesar Rp19.110.000.000,00 (kontrak Nomor 644/035/ 428.112/ 1990) dengan PT SFK;
- c) Nilai objek BOT MOG merupakan perhitungan nilai dari luasan tanah yang dikerjasamakan seluas 29.553 m² dikalikan nilai tanah per neraca awal Pemerintah Kota Malang tahun 2001 yaitu sebesar Rp770.000,00, sehingga total senilai Rp22.755.810.000,00. Nilai yang diakui bukan nilai yang tercantum dalam Adendum perjanjian kontrak Nomor 050/12/35.73.112/2007 sebesar Rp56.962.000.000,00;
- d) Nilai objek BOT pasar Dinoyo jangka waktu perjanjian 30 tahun sejak tanggal perjanjian yaitu jatuh tempo tahun 2040. Tanah dan bangunan yang dicatat dalam *Built On Transfer* pada Neraca



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Pemerintah Kota Malang sesuai dengan nilai awal yang tercatat dalam Neraca Awal Pemerintah Kota Malang tahun 2001 baik dalam luasan maupun nilai satuan per meter persegi yang dipindah bukukan dari Aset Tanah ke Aset lainnya-BOT pada tahun 2011. Nilai kerjasama yang tercantum dalam kontrak dengan Pihak Ke-3 berbeda karena menyesuaikan dengan kondisi penilaian yang dilaksanakan pada waktu kontrak yaitu tahun 2010;

- e) Nilai objek BOT pasar Blimbing jangka waktu perjanjian 30 tahun sejak tanggal perjanjian yaitu jatuh tempo tahun 2040. Tanah dan bangunan yang dicatat dalam *Built On Transfer* pada Neraca Pemerintah Kota Malang sesuai dengan nilai awal yang tercatat dalam Neraca awal Pemerintah Kota Malang tahun 2001 baik dalam luasan maupun nilai satuan per meter persegi yang dipindah bukukan dari Aset Tanah ke Aset lainnya-BOT pada tahun 2011. Nilai kerjasama yang tercantum dalam kontrak dengan Pihak Ke-3 berbeda karena menyesuaikan dengan kondisi penilaian yang dilaksanakan pada waktu kontrak yaitu tahun 2010.

Pada tahun 2016 terdapat perubahan pencatatan BOT dari Bagian Perekonomian ke BPKAD.

3) Aset Tak Berwujud

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	8.449.293.987,50	8.730.276.765,25

Saldo Aset Tak Berwujud Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp8.449.293.987,50 dan Rp8.730.276.765,25.

Jumlah Aset Tak Berwujud tersebut terdiri dari *software* sistem aplikasi, kajian/penelitian yang menunjang pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang rinciannya dapat dilihat pada **Lampiran 16**. Kronologis saldo Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

Tabel 5.3.34. Aset Tak Berwujud dan Akumulasi Amortisasinya

dalam rupiah

Uraian	Harga Perolehan	Akumulasi Amortisasi	Nilai Buku
1	2	3	4
Saldo Per 31 Desember 2018	34.959.586.952,00	(26.229.310.186,75)	8.730.276.765,25
Koreksi kurang catat akumulasi amortisasi 2018			-
Saldo Awal Aset Tak Berwujud Setelah Koreksi	34.959.586.952,00	(26.229.310.186,75)	8.730.276.765,25
Mutasi 2019			-
Kapitalisasi	4.597.895.700,00		4.597.895.700,00
Belanja Modal	687.950.060,00		687.950.060,00
Beban Amortisasi		(5.566.828.537,75)	(5.566.828.537,75)
Jumlah Mutasi 2019	5.285.845.760,00	(5.566.828.537,75)	(280.982.777,75)
Saldo 31 Desember 2019	40.245.432.712,00	(31.796.138.724,50)	8.449.293.987,50



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

4) Aset Lain yang Dibatasi Penggunaannya

31 Desember 2019	31 Desember 2018
483.999.255,50	318.494.746,46

Saldo Aset Lain yang Dibatasi Penggunaannya merupakan saldo kas di Badan Pelayanan Pajak Daerah yang merupakan uang jaminan bongkar pemasangan reklame. Uang tersebut berasal dari wajib pajak reklame sebagai jaminan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Jaminan Bongkar yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran Badan Pelayanan Pajak Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2012 yang diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Pengembalian dan Pengelolaan Uang Jaminan Bongkar reklame, jaminan tersebut akan dikembalikan kepada wajib pajak reklame apabila wajib pajak membongkar sendiri reklame yang dipasang saat masa tayang reklame berakhir, namun apabila seminggu setelah masa tayang reklame berakhir uang jaminan tidak diklaim, maka uang jaminan bongkar tersebut menjadi hak Pemda dan harus disetor ke kas daerah oleh Bendahara Pengeluaran Jaminan Bongkar.

Uang jaminan bongkar pemasangan reklame tidak memenuhi definisi kas namun dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lainnya karena uang tersebut telah diterima Pemda dan dimungkinkan dapat menjadi potensi pendapatan. Pada tahun 2018 dilakukan pencatatan ke dalam neraca pada akun Aset Lain yang Dibatasi Penggunaannya. Saldo dan mutasi atas uang jaminan bongkar selama tahun 2019 tersaji sebagai berikut.

	dalam rupiah
Saldo Per 31 Desember 2018	318.494.746,46
Penambahan 2019	165.504.509,04
Saldo Per 31 Desember 2019	483.999.255,50

Saldo Uang Jaminan Bongkar Pemasangan Reklame sebesar Rp483.999.255,50.

5) Aset Lain lain

31 Desember 2019	31 Desember 2018
36.851.493.408,95	36.851.493.408,95

Saldo Aset Lain-Lain Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sama yaitu sebesar Rp36.851.493.408,95. Jumlah Aset Lain-lain tahun 2019 adalah aset tetap yang telah dihibahkan kepada pihak lain atau aset yang telah dibongkar/dihentikan penggunaannya tetapi belum dilakukan penghapusan aset. Terkait penerapan Peraturan Walikota Malang Nomor 88 tahun 2015 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud Pemerintah Daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 18 ayat (5) yang menyatakan bahwa penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut direklasifikasi ke Aset Lainnya. Berdasarkan kebijakan tersebut, nilai Aset Lain-lain per



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

31 Desember 2019 disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan yang dihitung sejak tahun perolehan Aset Tetap hingga dilakukan reklasifikasi ke aset lain-lain pada tahun 2014 dan 2019.

Saldo Akhir 2018	36.851.493.408,95
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain 2019	(0,00)
Saldo Akhir Bersih Aset Lain-lain 2019	36.851.493.408,95

Terdapat perbedaan antara saldo aset lain-lain yang disajikan dalam Neraca dengan rincian nilai buku per barang pada 18 OPD sebesar Rp1.656.707.588,00 sebagaimana uraian berikut.

Rincian pendukung neraca	36.851.493.409,00
Rekapitulasi Form E SKPD	35.194.785.821,00
Selisih	1.656.707.588,00

Selisih lebih sebesar Rp1.656.707.588,00 tersebut merupakan lebih catat nilai buku dalam Neraca sesuai dengan hasil penelusuran harga perolehan dan perhitungan akumulasi penyusutan masing-masing barang. Lebih catat tersebut akan dikoreksi pada Neraca Pemerintah Kota Malang periode selanjutnya.

5.3.2 KEWAJIBAN

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	12.096.894.513,23	13.915.474.059,94

5.3.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	12.096.894.513,23	13.915.474.059,94

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp12.096.894.513,23 dan Rp13.915.474.059,94. Rincian kewajiban jangka pendek Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut.

Tabel 5.3.35. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019
dalam rupiah

Keterangan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima dimuka	851.525.261,12	924.148.419,70
Utang Belanja	9.679.341.348,85	12.672.320.630,78
Utang Jangka Pendek lainnya	1.566.027.903,26	510.263,00
Utang Pihak Ketiga Lainnya	0,00	318.494.746,46
Jumlah	12.096.894.513,23	13.915.474.059,94



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Kewajiban Jangka Pendek disajikan dengan rincian sebagai berikut.

1) **Utang Perhitungan Pihak Ketiga**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
0,00	0,00

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2019 adalah Rp0,00.

2) **Pendapatan Diterima Dimuka**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
851.525.261,12	924.148.419,70

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2019 sebesar Rp851.525.261,12, dan dasar penghitungan pada Pemerintah Kota Malang menggunakan dasar penghitungan bulanan dan tidak harian, jadi jika perjanjian dimulai baik diawal bulan maupun tidak diawal bulan akan dihitung satu bulan.

Saldo Pendapatan diterima dimuka Tahun 2019 terdiri dari Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya sebesar Rp435.583.334,04 dengan rincian pada **Lampiran 17**, dan Pendapatan dari sewa kekayaan daerah reklame sebesar Rp110.145.264,58 dan sewa lahan pertanian sebesar Rp305.796.662,50. Adapun rincian masing-masing pendapatan adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.36. Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2019

dalam rupiah

Uraian	Lainnya	Reklame	Sewa Lahan Pertanian	Total
1	2	3	4	5 = 2+3+4
Saldo 31/12/2018	418.416.667,62	180.334.689,58	325.397.062,50	924.148.419,70
Mutasi kurang	(228.499.999,85)	(180.334.689,58)	(325.397.062,50)	(734.231.751,93)
Mutasi tambah	245.666.666,27	110.145.264,58	305.796.662,50	661.608.593,35
Saldo 31/12/2019	435.583.334,04	110.145.264,58	305.796.662,50	851.525.261,12

Mutasi kurang merupakan pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2018 sebagai Pendapatan Retribusi-LO ditahun 2019. Sedangkan, mutasi tambah merupakan penangguhan atas Pendapatan Retribusi yang telah diterima pembayarannya di tahun 2019 namun belum menjadi hak Pemerintah Kota Malang sehingga belum dicatat sebagai pendapatan di tahun 2019. Adapun rincian pendapatan diterima dimuka lainnya tersaji pada **Lampiran 17**.

Tabel 5.3.37. Sewa Lahan Reklame per 31 Desember 2019

dalam rupiah

No	Periode/Bulan	Nominal Sewa	Pendapatan Jasa Tahun 2019	Pendapatan Diterima Dimuka
1	Januari	35.829.000,00	35.829.000,00	0,00
2	Februari	38.808.750,00	36.542.750,00	2.266.000,00
3	Maret	43.732.500,00	35.728.250,00	8.004.250,00
4	April	4.575.000,00	2.880.625,00	1.694.375,00
5	Mei	31.581.375,00	21.043.968,75	10.537.406,25



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

No	Periode/Bulan	Nominal Sewa	Pendapatan Jasa Tahun 2019	Pendapatan Diterima Dimuka
6	Juni	8.878.500,00	6.112.000,00	2.766.500,00
7	Juli	13.650.000,00	6.812.500,00	6.837.500,00
8	Agustus	23.649.600,00	2.193.375,00	21.456.225,00
9	September	43.180.325,00	21.511.333,33	21.668.991,67
10	Oktober	18.745.500,00	5.445.375,00	13.300.125,00
11	Nopember	14.032.150,00	3.041.383,33	10.990.766,67
12	Desember	12.067.500,00	1.444.375,00	10.623.125,00
Jumlah		288.730.200,00	178.584.935,42	110.145.264,58

Tabel 5.3.38. Sewa Lahan Pertanian per 31 Desember 2019

dalam rupiah

No	Periode/Bulan	Nominal Sewa	Pendapatan Jasa Tahun 2019	Pendapatan Diterima Dimuka
1	Januari	25.266.900,00	25.266.900,00	0,00
2	Februari	117.109.650,00	107.350.512,50	9.759.137,50
3	Maret	10.357.350,00	8.631.125,00	1.726.225,00
4	April	57.445.500,00	43.084.125,00	14.361.375,00
5	Mei	26.083.350,00	17.388.900,00	8.694.450,00
6	Juni	31.550.100,00	18.404.225,00	13.145.875,00
7	Juli	62.679.600,00	31.339.800,00	31.339.800,00
8	Agustus	47.828.850,00	19.928.687,50	27.900.162,50
9	September	46.988.250,00	15.662.750,00	31.325.500,00
10	Oktober	7.515.000,00	1.878.750,00	5.636.250,00
11	Nopember	22.375.800,00	3.729.300,00	18.646.500,00
12	Desember	156.285.150,00	13.023.762,50	143.261.387,50
Jumlah		611.485.500,00	305.688.837,50	305.796.662,50

3) Utang Belanja

31 Desember 2019	31 Desember 2018
9.679.341.348,85	12.672.320.630,78

Saldo Utang Belanja Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp9.679.341.348,85 dan Rp12.672.320.630,78.

Saldo Utang Belanja pada tahun 2019 sebesar Rp9.679.341.348,85 merupakan tagihan belanja pegawai, telepon, air, listrik, jasa medis, internet, dan insentif pajak bulan Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.39. Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2019

dalam rupiah

No	Uraian	Saldo per	Pembayaran di Tahun 2019	Penambahan di Tahun 2019	Saldo per
		31-Des-18			31-Des-19
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan :					
1	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	7.214.875.000,00	7.214.875.000,00	6.787.625.000,00	6.787.625.000,00
2	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	665.544.276,06	665.544.276,06	258.761.978,77	258.761.978,77
Jumlah I		7.880.419.276,06	7.880.419.276,06	7.046.386.978,77	7.046.386.978,77
1	Jasa Telepon	57.569.668,00	65.684.308,00	47.698.661,00	39.584.021,00
2	Jasa Air	144.662.350,00	144.657.866,00	143.347.314,00	143.351.798,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Saldo per	Pembayaran di Tahun 2019	Penambahan di Tahun 2019	Saldo per
		31-Des-18			31-Des-19
3	Jasa Listrik	2.684.461.987,00	2.684.654.831,00	560.112.645,00	559.919.801,00
4	Jasa Kawat/Faksimil/Internet	78.248.772,00	69.945.772,00	67.318.322,00	75.621.322,00
5	Jasa Pemeriksaan Medis	1.578.459.864,72	1.095.938.186,00	1.331.955.749,36	1.814.477.428,08
	Jumlah II	4.543.402.641,72	4.060.880.963,00	2.150.432.691,36	2.632.954.370,08
1	Belanja Barang dan Jasa Kegiatan BOS	248.498.713,00	248.498.713,00	0,00	0,00
	Jumlah III	248.498.713,00	248.498.713,00	0,00	0,00
1	Utang Belanja Aset Lainnya	8.707.200,00	8.707.200,00	0,00	0,00
	Jumlah IV	8.707.200,00	8.707.200,00	0,00	0,00
	Jumlah I+II+III+IV	12.672.320.630,78	12.189.798.952,06	9.196.819.670,13	9.679.341.348,85

4) Utang Jangka Pendek Lainnya

31 Desember 2019	31 Desember 2018
1.566.027.903,26	510.263,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.566.027.903,26 dan Rp510.263,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.40. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019
dalam rupiah

No	Keterangan	Saldo 2018	Pembayaran Tahun 2018	Sisa	Penambahan Tahun 2019	Saldo Tahun 2019
1	2	3	4	5=3-4	6	7=5+6
1	Kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak yg disetor ke kas bendahara penerimaan Dinas Pendapatan Daerah	510.263,00	0,00	510.263,00	0,00	510.263,00
2	Kas Bendahara Jaminan Bongkar	318.494.746,46	-	318.494.746,46	165.504.509,04	483.999.255,50
3	Hutang klaim jaminan kesehatan ke RSUD pada Dinas Kesehatan	-	-	-	55.955.400,00	55.955.400,00
4	Hutang Jangka Pendek klaim Jaminan Kesehatan kepada RSSA, RST, RSI Aisiyah, RS Lavalette, RSUD Malang pada Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	1.025.562.984,76	1.025.562.984,76
	Jumlah	319.005.009,46	0,00	319.005.009,46	1.247.022.893,80	1.566.027.903,26

5) Utang Pihak Ketiga Lainnya

31 Desember 2019	31 Desember 2018
0,00	318.494.746,46

Saldo Utang Pihak Ketiga Lainnya Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp318.494.746,46. Saldo Utang Pihak Ketiga Lainnya per 31 Desember 2019 adalah nol karena ada reklas dari hutang pihak Ketiga Lainnya ke Hutang Jangka Pendek Lainnya.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

5.3.2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

31 Desember 2019	31 Desember 2018
0,00	0,00

Saldo Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0,00.

5.3.3 EKUITAS

31 Desember 2019	31 Desember 2018
6.379.676.358.783,95	6.382.648.910.352,52

Saldo Ekuitas Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp6.379.676.358.783,95 dan Rp6.382.648.910.352,52. Ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kota Malang tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Berdasarkan basis akrual, nilai ekuitas dihitung dari Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan Ekuitas disusun dengan menggunakan data ekuitas awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Surplus/defisit-LO sesuai dengan lampiran Perwal 33 tahun 2017 tentang sistem dan Kebijakan Akuntansi.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

5.4. LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1 PENDAPATAN-LO

31 Desember 2019	31 Desember 2018
2.265.250.180.310,79	2.003.885.971.167,89

Pendapatan Laporan Operasional Pemerintah Kota Malang tahun 2019 sebesar Rp2.265.250.180.310,79 terdiri dari:

5.4.1.a PENDAPATAN ASLI DAERAH- LO

31 Desember 2019	31 Desember 2018
622.125.988.886,79	553.012.477.381,34

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2019 sebesar Rp622.125.988.886,79 meningkat sebesar Rp69.113.511.505,45 atau 12,50% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp553.012.477.381,34. Pendapatan Asli Daerah-LO dirinci sebagai berikut.

1) Pendapatan Pajak Daerah - LO

31 Desember 2019	31 Desember 2018
470.184.607.665,06	453.452.629.252,09

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2019 sebesar Rp470.184.607.665,06 naik sebesar Rp16.731.978.412,97 atau 3,69% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp453.452.629.252,09 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.1 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO

dalam rupiah

No	Jenis Pendapatan	2019	2018
1	Pajak Hotel – LO	50.803.162.530,82	46.747.445.936,86
2	Pajak Restoran – LO	84.506.786.307,07	64.949.899.818,92
3	Pajak Hiburan – LO	14.291.525.312,89	11.316.304.777,30
4	Pajak Reklame – LO	24.602.510.249,97	17.223.257.957,31
5	Pajak Penerangan Jalan – LO	60.611.934.342,51	58.691.858.149,89
6	Pajak Parkir – LO	6.457.568.274,00	6.202.560.323,00
7	Pajak Air Bawah Tanah – LO	969.570.040,80	899.265.010,31
8	Pajak Bumi dan Bangunan – LO	75.828.060.887,00	75.642.299.614,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO	152.113.489.720,00	171.779.737.664,50
	Jumlah	470.184.607.665,06	453.452.629.252,09

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan Pendapatan Pajak Daerah LRA. Adapun rincian selisih Pendapatan Pajak-LO dan LRA sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel 5.4.2 Rincian Selisih Pendapatan Pajak-LO dan LRA

dalam rupiah

Jenis Pajak	LRA	Kurang	Tambah	LO
Hotel	51.775.202.170,31	7.012.503.683,23	6.040.464.043,74	50.803.162.530,82
Restoran	84.625.288.847,46	8.064.178.099,29	7.945.675.558,90	84.506.786.307,07
Hiburan	14.376.051.768,81	1.280.918.327,00	1.196.391.871,08	14.291.525.312,89
Reklame	24.602.510.249,97	0,00	0,00	24.602.510.249,97
Penerangan Jalan PLN	60.002.966.834,00	5.142.882.466,00	5.467.061.347,00	60.327.145.715,00
Penerangan Jalan Non PLN	263.101.431,93	21.813.030,53	43.500.226,11	284.788.627,51
Parkir	6.876.031.498,00	1.062.963.120,00	644.499.896,00	6.457.568.274,00
Air Bawah Tanah	973.745.458,12	116.499.544,32	112.324.127,00	969.570.040,80
Pajak Bumi dan Bangunan	64.439.062.686,00	13.518.826.747,00	24.907.824.948,00	75.828.060.887,00
BPHTB	152.113.489.720,00	0,00	0,00	152.113.489.720,00
Jumlah	460.047.450.664,60	36.220.585.017,37	46.357.742.017,83	470.184.607.665,06

Berdasarkan tabel di atas terdapat selisih antara Pendapatan Pajak LO dan LRA tahun 2019 sebesar Rp10.137.157.000,46. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

Pendapatan Pajak Daerah :

Tambah :	Nilai (Rp)
Pencatatan Piutang Pajak Hotel tahun 2019	6.040.464.043,74
Pencatatan Piutang Pajak Restoran tahun 2019	7.945.675.558,90
Pencatatan Piutang Pajak Hiburan tahun 2019	1.196.391.871,08
Pencatatan Piutang Pajak PJ PLN tahun 2019	5.467.061.347,00
Pencatatan Piutang Pajak PJ Non PLN Tahun 2019	43.500.226,11
Pencatatan Piutang Pajak Parkir tahun 2019	644.499.896,00
Pencatatan Piutang Pajak Air Bawah Tanah tahun 2019	112.324.127,00
Pencatatan Piutang PBB Tahun 2019	24.907.824.948,00
	46.357.742.017,83
Kurang :	Nilai (Rp)
Pelunasan Piutang Pajak Hotel	7.012.503.683,23
Pelunasan Piutang Pajak Restoran	8.064.178.099,29
Pelunasan Piutang Pajak Hiburan	1.280.918.327,00
Pelunasan Piutang Pajak PJ PLN	5.142.882.466,00
Pelunasan Piutang Pajak PJ Non PLN	21.813.030,53
Pelunasan Piutang Pajak Parkir	1.062.963.120,00
Pelunasan Piutang Pajak Air Bawah Tanah	116.499.544,32
Pelunasan Piutang Pajak PBB	13.518.826.747,00
	36.220.585.017,37
	10.137.157.000,46



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

2) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

31 Desember 2019	31 Desember 2018
46.920.433.833,00	51.773.976.224,44

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2019 adalah sebesar Rp46.920.433.833,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.853.542.391,44 atau sebesar 9,37% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp51.773.976.224,44 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.3 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO

dalam rupiah

No	Jenis Pendapatan	2019	2018
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	1.851.514.400,00	8.447.621.748,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan - LO	12.378.011.000,00	11.645.203.500,00
3	Retribusi Perijinan Rumah Susun - LO	443.025.000,00	0,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum - LO	7.592.357.000,00	6.854.976.000,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	6.406.244.403,00	5.541.557.630,00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	2.320.466.000,00	2.921.608.000,00
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	0,00	1.786.921.500,77
8	Retribusi Pengolahan Limbah – LO	73.800.000,00	55.200.000,00
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	3.290.924.020,00	3.682.211.645,67
10	Retribusi Terminal – LO	119.825.000,00	21.180.000,00
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	771.713.000,00	658.890.000,00
12	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LO	668.211.100,00	737.865.800,00
13	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	10.949.722.910,00	9.107.752.300,00
14	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO	0,00	85.296.500,00
15	Retribusi Izin Gangguan - LO	0,00	161.061.600,00
16	Retribusi Izin Trayek - LO	54.620.000,00	66.630.000,00
Jumlah		46.920.433.833,00	51.773.976.224,44

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Retribusi Daerah-LO dengan Pendapatan Retribusi-LRA. Rincian selisih Pendapatan Retribusi Daerah-LO dan LRA disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.4.4 Rincian Selisih Pendapatan Retribusi Daerah-LO dan LRA

dalam rupiah

No	Uraian	LRA	Selisih		Perhitungan	LO
			Kurang	Tambah		
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.795.559.000,00	0,00	55.955.400,00	1.851.514.400,00	1.851.514.400,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	12.323.054.500,00	953.894.000,00	1.008.850.500,00	12.378.011.000,00	12.378.011.000,00
3	Retribusi Perijinan Rumah Susun	443.025.000,00	0,00	0,00	443.025.000,00	443.025.000,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	7.592.357.000,00	0,00	0,00	7.592.357.000,00	7.592.357.000,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar	6.800.724.403,00	394.480.000,00	0,00	6.406.244.403,00	6.406.244.403,00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor	2.320.466.000,00	0,00	0,00	2.320.466.000,00	2.320.466.000,00
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Retribusi Pengolahan Limbah	73.800.000,00	0,00	0,00	73.800.000,00	73.800.000,00
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan	2.692.625.350,00	807.204.577,58	1.405.503.247,58	3.290.924.020,00	3.290.924.020,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	LRA	Selisih		Perhitungan	LO
			Kurang	Tambah		
	Daerah					
10	Retribusi Terminal	119.825.000,00	0,00	0,00	119.825.000,00	119.825.000,00
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir	771.713.000,00	0,00	0,00	771.713.000,00	771.713.000,00
12	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	668.211.100,00	0,00	0,00	668.211.100,00	668.211.100,00
13	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	10.949.722.910,00	0,00	0,00	10.949.722.910,00	10.949.722.910,00
14	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Retribusi Izin Gangguan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Retribusi Izin Trayek	54.620.000,00	0,00	0,00	54.620.000,00	54.620.000,00
	Jumlah	46.605.703.263,00	2.155.578.577,58	2.470.309.148,00	46.920.433.833,00	46.920.433.833,00

Berdasarkan tabel diatas terdapat selisih antara Pendapatan Retribusi LO dan LRA tahun 2019 sebesar Rp314.730.570,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

Tambah :

- Pencatatan piutang retribusi sampah masa tahun 2019 pada DLH 1.008.850.500,00
 - Pencatatan piutang retribusi sewa tanah pemakaian kekayaan daerah masa tahun 2019 pada BPKAD 1.225.168.558,00
 - Kurang catat Piutang klaim jaminan kesehatan ke Dinas Kesehatan 55.955.400,00
 - Pendapatan diterima dimuka ijin pemakaian tanah tahun 2018 pada BPKAD 180.334.689,58
- 2.470.309.148,00

Kurang :

- Pelunasan piutang retribusi sampah tahun 2018 pada DLH 953.894.000,00
 - Pelunasan piutang pelayanan pasar tahun 2018 pada Dinas Perdagangan 394.480.000,00
 - Pelunasan Piutang tahun 2018 pada BPKAD 697.059.313,00
 - Pendapatan diterima dimuka atas pendapatan retribusi sewa lahan tahun 2019 pada BPKAD 110.145.264,58
- 2.155.578.577,58
314.730.570,00

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

31 Desember 2019	31 Desember 2018
<u>52.675.442.700,39</u>	<u>687.770.506,00</u>

Realisasi Pendapatan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2019 adalah sebesar Rp52.675.442.700,39 naik sebesar Rp51.987.672.194,39 atau sebesar 7558,87% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp687.770.506,00 dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel 5.4.5 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

dalam rupiah

No	Jenis Pendapatan	2019	2018
I	Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah-LO	47.720.554.786,00	687.770.506,00
1	Perusahaan Daerah Air Minum-LO	47.165.329.783,00	0,00
2	PD Rumah Potong Hewan-LO	0,00	188.152.765,00
3	PD BPR Tugu Artha-LO	555.225.003,00	499.617.741,00
II	Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah lainnya-LO	4.954.887.914,39	0,00
4	Deviden Saham PT BPD Jatim-LO	4.954.887.914,39	0,00
Jumlah		52.675.442.700,39	687.770.506,00

Terdapat perbedaan antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA. Rincian selisih Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO dan LRA disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.6 Rincian selisih Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO dan LRA

dalam rupiah

No	Jenis Pendapatan	LRA	Selisih		LO
			Kurang	Tambah	
1	2	3	4	5	6=3-4+5
I	Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah				
1	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	23.604.543.251,00	0,00	23.560.786.532,00	47.165.329.783,00
2	PD Rumah Potong Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PD BPR Tugu Artha	0,00	0,00	555.225.003,00	555.225.003,00
II	Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah lainnya				
4	Deviden Saham PT BPD Jatim	4.954.887.914,39	0,00	0,00	4.954.887.914,39
Jumlah		28.559.431.165,39	0,00	24.116.011.535,00	52.675.442.700,39

Berdasarkan tabel diatas terdapat selisih antara LO dan LRA sebesar Rp24.116.011.535,00. Selisih tersebut disebabkan adanya koreksi tambah akibat adanya pencatatan kenaikan nilai investasi permanen tahun 2019 pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp23.560.786.532,00 dan PD BPR Tugu Artha sebesar Rp555.225.003,00.

4) Lain-lain PAD yang Sah – LO

31 Desember 2019	31 Desember 2018
52.345.504.688,34	47.098.101.398,81

Jumlah tersebut merupakan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO tahun 2019. Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah-LO tahun 2019 sebesar Rp52.345.504.688,34 naik sebesar Rp5.247.403.289,53 atau sebesar 11,14% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp47.098.101.398,81 dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel 5.4.7 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

dalam rupiah

No	Jenis Pendapatan	2019	2018
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan-LO	521.263.739,00	378.631.024,00
2	Penerimaan Jasa Giro-LO	11.222.718.301,32	11.737.292.407,83
3	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	85.071.600,86	14.058.655,25
4	Pendapatan Denda Pajak-LO	1.896.957.579,00	2.129.278.288,00
5	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	334.573.737,74	265.261.470,94
6	Pendapatan dari Pengembalian-LO	3.924.369.088,62	8.937.642.477,78
7	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah-LO	4.882.193.803,00	5.211.720.825,01
8	Dana Kapitasi JKN-LO	16.858.265.125,00	18.419.552.250,00
9	Pendapatan dari Denda Pemanfaatan Kekayaan Daerah-LO	33.517.400,00	4.664.000,00
10	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah - LO	12.586.574.313,68	0,00
Jumlah		52.345.504.688,34	47.098.101.398,81

Terdapat perbedaan antara Lain-Lain PAD yang sah – LO dengan Lain-Lain PAD yang sah – LRA. Rincian selisih Lain-Lain PAD yang sah LO dan LRA disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.4.8. Rincian selisih Lain-Lain PAD yang sah LO dan LRA

dalam rupiah

No	Jenis Pendapatan	LRA	Selisih		LO
			Kurang	Tambah	
1	2	3	4	5	6=3-4+5
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan-LO	521.263.739,00	0,00	0,00	521.263.739,00
2	Penerimaan Jasa Giro-LO	11.222.718.301,32	0,00	0,00	11.222.718.301,32
3	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	85.071.600,86	0,00	0,00	85.071.600,86
4	Pendapatan Denda Pajak-LO	1.896.957.579,00	0,00	0,00	1.896.957.579,00
5	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	334.573.737,74	0,00	0,00	334.573.737,74
6	Pendapatan dari Pengembalian-LO	3.924.369.088,62	97.584.528,89	0,00	3.826.784.559,73
7	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah-LO	5.157.783.272,80	2.221.084.428,77	2.217.634.287,98	5.154.333.132,01
8	Dana Kapitasi JKN-LO	16.683.710.325,00	0,00	0,00	16.683.710.325,00
9	Pendapatan dari Denda Pemanfaatan Kekayaan Daerah-LO	33.517.400,00	0,00	0,00	33.517.400,00
10	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah - LO	12.993.492.213,68	2.006.977.900,00	1.600.060.000,00	12.586.574.313,68
Jumlah		52.853.457.258,02	4.325.646.857,66	3.817.694.287,98	52.345.504.688,34

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO sebesar Rp52.345.504.688,34 berbeda dengan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA yaitu sebesar Rp52.853.457.258,02 sehingga terdapat selisih sebesar Rp507.952.569,68. Adapun selisih tersebut disebabkan adanya :

Koreksi Tambah :

- Pendapatan Diterima Dimuka (Tanah Sewa) tahun 2018 menjadi Pendapatan-LO tahun 2019 sebesar Rp325.397.062,50;
- Piutang hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan tahun 2019 sebesar Rp1.663.737.225,63;
- Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya-Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan tahun 2018 menjadi Pendapatan-LO Tahun 2019 sebesar Rp228.499.999,85;
- Piutang retribusi pelayanan kesehatan tahun 2019 sebesar Rp1.600.060.000,00.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Koreksi Kurang :

- Pendapatan Diterima Dimuka (Tanah Sewa) dari pendapatan pemanfaatan kekayaan daerah sewa tahun 2019 sebesar Rp305.796.662,5;
- Penyesuaian pendapatan-LO atas penerimaan pembayaran piutang lainnya kerjasama pemanfaatan tahun 2018 sebesar Rp1.669.621.100,00;
- Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya-Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan Tahun 2019 sebesar Rp242.125.000,00;
- Penyesuaian pendapatan LO tahun 2019 atas pelunasan piutang retribusi pelayanan kesehatan RSUD tahun 2018 sebesar Rp2.006.977.900,00;
- Pembayaran Setoran Angsuran TGR 2019 sebesar Rp.2.000.000;
- Pembayaran piutang kurang volume tahun 2018 (di DLH, Dinas P3AP2KB, Dinas Perdagangan) sebesar Rp. 95.584.528,89;
- Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp.3.541.666,27.

5.4.1.b PENDAPATAN TRANSFER - LO

31 Desember 2019	31 Desember 2018
1.545.525.287.324,00	1.377.474.827.518,00

Realisasi Pendapatan Transfer-LO tahun 2019 sebesar Rp1.545.525.287.324,00 naik sebesar Rp168.050.459.806,00 atau sebesar 12,20% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp1.377.474.827.518,00.

1) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO

31 Desember 2019	31 Desember 2018
1.215.927.146.010,00	1.181.289.819.588,00

Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat-LO tahun 2019 sebesar Rp1.215.927.146.010,00 naik sebesar Rp34.637.326.422,00 atau sebesar 2,93% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp1.181.289.819.588,00.

a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO

31 Desember 2019	31 Desember 2018
41.907.655.640,00	59.220.052.598,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO tahun 2019 sebesar Rp41.907.655.640,00 turun sebesar Rp17.312.396.958,00 atau sebesar 29,23% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp59.220.052.598,00.

Tabel 5.4.9 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO

dalam rupiah

No	Jenis Pendapatan	2019	2018
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan-LO	4.430.229.700,00	4.861.216.134,00
2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh. Pasal 21-LO	37.477.425.940,00	54.358.836.464,00
Total		41.907.655.640,00	59.220.052.598,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

b) Pendapatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) – LO

31 Desember 2019 31 Desember 2018
101.633.937.844,00 93.140.141.495,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) –LO tahun 2019 sebesar Rp101.633.937.844,00 naik sebesar Rp8.493.796.349,00 atau sebesar 9,12% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp93.140.141.495,00.

Tabel 5.4.10 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)-LO

dalam rupiah

No	Jenis Pendapatan	2019	2018
1	Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan-LO	140.982.000,00	250.178.053,00
2	Bagi Hasil Pungutan Pengusahaan Perikanan-LO	590.155.800,00	701.234.591,00
3	Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi-LO	54.504.315.307,00	65.667.268.617,00
4	Bagi Hasil Pertambangan Umum-LO	0,00	814.447.240,00
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi-LO	34.775.673,00	31.203.994,00
6	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau-LO	45.795.754.264,00	25.675.809.000,00
7	Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara	567.954.800,00	0,00
Jumlah		101.633.937.844,00	93.140.141.495,00

c) Dana Alokasi Umum – LO

31 Desember 2019 31 Desember 2018
886.503.661.000,00 844.477.164.310,00

Realisasi Dana Alokasi Umum-LO tahun 2019 sebesar Rp886.503.661.000,00 naik sebesar Rp42.026.496.690,00 atau sebesar 4,98% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp844.477.164.310,00.

d) Dana Alokasi Khusus – LO

31 Desember 2019 31 Desember 2018
185.881.891.526,00 184.452.461.185,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus-LO tahun 2019 sebesar Rp185.881.891.526,00 naik sebesar Rp1.429.430.341,00 atau sebesar 0,77% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp184.452.461.185,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.11 Rincian Dana Alokasi Khusus-LO

dalam rupiah

No	Jenis Penerimaan	2019	2018
I	Dana Alokasi Khusus	47.430.052.339,00	36.741.001.099,00
1	DAK Bidang Infrastruktur Jalan – LO	16.156.099.900,00	0,00
2	DAK Bidang Kesehatan	8.518.231.339,00	8.656.192.349,00
3	DAK Bidang Lingkungan Hidup	733.700.000,00	0,00
4	DAK Bidang Pendidikan	7.011.418.649,00	2.860.061.150,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

No	Jenis Penerimaan	2019	2018
5	DAK Bidang Kependudukan – LO	1.656.876.553,00	1.515.367.740,00
6	DAK Bidang Sanitasi – LO	5.212.003.000,00	0,00
7	DAK Bidang Perdagangan – LO	470.000.000,00	0,00
8	DAK Bidang Perumahan Air Minum dan Sanitasi (air minum) dan Sanitasi (Air Minum) - LO	2.618.602.000,00	1.246.627.200,00
9	DAK Bidang Kedaulatan Pangan (pertanian) - LO	638.390.552,00	2.321.153.950,00
10	DAK Bidang Infrastruktur Publik Daerah (IPD) – LO	780.191.550,00	0,00
11	DAK Bidang Penataan Kawasan Pariwisata-LO	913.038.000,00	0,00
12	DAK Bidang Pasar-LO	2.271.500.796,00	3.569.878.000,00
13	Museum	450.000.000,00	0,00
14	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	698.655.960,00
15	DAK Bidang Pendidikan (SMP)	0,00	598.720.750,00
16	DAK Bidang Perumahan Air Minum dan Sanitasi (Air Minum)	0,00	1.277.865.000,00
17	DAK Bidang Sarana Prasarana Penunjang (Jalan)	0,00	13.996.479.000,00
18	DAK Bidang Penataan Kawasan Pariwisata	0,00	0,00
II	DAK Non Fisik	138.451.839.187,00	147.711.460.086,00
1	Tunjangan Profesi Guru PNSD	111.187.847.340,00	117.846.538.270,00
2	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	0,00	298.800.000,00
3	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	14.997.000.000,00	17.639.400.000,00
4	Bantuan Operasional Kesehatan	11.472.855.564,00	10.903.548.524,00
5	Bantuan Operasional Keluarga Berencana	794.136.283,00	1.023.173.292,00
	Jumlah	185.881.891.526,00	184.452.461.185,00

2) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO

31 Desember 2019	31 Desember 2018
73.871.078.000,00	25.500.000.000,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO tahun 2019 sebesar Rp73.871.078.000,00 naik sebesar Rp48.371.078.000,00 atau sebesar 189,69% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp25.500.000.000,00 yang merupakan dana insentif daerah.

3) Transfer Pemerintah Provinsi – LO

31 Desember 2019	31 Desember 2018
255.727.063.314,00	170.685.007.930,00

Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi-LO tahun 2019 sebesar Rp255.727.063.314,00 naik sebesar Rp85.042.055.384,00 atau sebesar 49,82% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp170.685.007.930,00. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi-LO tahun 2019 yang terdiri dari:

a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

31 Desember 2019	31 Desember 2018
252.268.704.314,00	167.347.677.930,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO tahun 2019 sebesar Rp252.268.704.314,00 naik sebesar Rp84.921.026.384,00 atau sebesar 50,75% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp167.347.677.930,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.12 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi–LO

dalam rupiah

No	Uraian	2019	2018
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor-LO	95.320.863.266,00	56.836.176.667,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	58.211.351.496,00	39.702.001.482,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	62.266.594.435,00	41.595.590.925,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah-LO	251.658.369,00	166.356.112,00
5	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	0,00	0,00
6	Bagi Hasil dari Pajak Rokok-LO	36.218.236.748,00	29.047.552.744,00
Jumlah		252.268.704.314,00	167.347.677.930,00

b) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya – LO

31 Desember 2019	31 Desember 2018
3.458.359.000,00	3.337.330.000,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya – LO tahun 2019 sebesar Rp3.458.359.000,00 naik sebesar Rp121.029.000,00 atau sebesar 3,63% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp3.337.330.000,00.

5.4.1.c LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO

31 Desember 2019	31 Desember 2018
97.598.904.100,00	73.398.666.268,55

Jumlah realisasi diatas adalah realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO Tahun 2019 yang terdiri dari:

1) Pendapatan Hibah

31 Desember 2019	31 Desember 2018
97.598.904.100,00	73.398.666.268,55

Realisasi Pendapatan Hibah–LO tahun 2019 sebesar Rp97.598.904.100,00 naik sebesar Rp24.200.237.831,45 atau sebesar 32,97% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp73.398.666.268,55 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.13 Rincian Pendapatan Hibah-LO

dalam rupiah



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	2019	2018
Hibah berupa uang:			
1	Hibah dari Pemerintah – LO	0,00	2.424.000.000,00
2	Hibah Dana BOS	67.075.400.000,00	66.393.280.000,00
Hibah berupa barang:			
1	Dropping bahan obat-obatan dan perlengkapan praktek dari Provinsi Jawa Timur pada Dinas Kesehatan	13.013.578.087,00	2.983.224.588,55
2	Hibah Hibah Persediaan Obat dan Leaflet dari Provinsi Jawa Timur pada Dinas P3AP2KB	419.245.342,00	325.890.680,00
3	Hibah CSR Bank Jatim pada Dinas Perdagangan	0,00	0,0
4	Mencatat hibah otonomi award Kecamatan dan Kelurahan berupa Laptop pada Kecamatan Lowokwaru	0,00	17.675.000,00
5	Mencatat Hibah Barang Pakai Habis berupa Obat-Obatan, Bahan Kimia, Bahan Perlengkapan/Praktek, dan Cetak dari Provinsi Jawa Timur pada Dinas Kesehatan	0,00	42.000.000,00
6	Hibah blanko KTP elektronik dari Pusat Dirjen Kependudukan dan pencatatan sipil	448.244.500,00	1.212.596.000,00
7	Koreksi pendapatan hibah th 2019 (rincian terdapat di AJP)	16.642.436.171,00	0,00
Jumlah		97.598.904.100,00	73.398.666.268,55

Terdapat perbedaan Pendapatan Hibah–LO dan LRA dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.14 Rincian perbedaan Pendapatan Hibah–LO dan LRA

dalam rupiah

No	Uraian	LRA	Selisih		LO
			Kurang	Tambah	
Hibah berupa uang:					
1	Hibah dari Pemerintah - LO	0,00			0,00
2	Hibah Dana BOS	67.075.400.000,00			67.075.400.000,00
Hibah berupa barang:					
1	Dropping bahan obat-obatan dan perlengkapan praktek dari Provinsi Jawa Timur pada Dinas Kesehatan	0,00	0,00	13.013.578.087,00	13.013.578.087,00
2	Hibah Hibah Persediaan Obat dan Leaflet dari Provinsi Jawa Timur pada Dinas P3AP2KB	0,00	0,00	419.245.342,00	419.245.342,00
3	Hibah blanko KTP elektronik dari Pusat Dirjen Kependudukan dan pencatatan sipil	0,00	0,00	448.244.500,00	448.244.500,00
4	Koreksi pendapatan hibah th 2019 (rincian terdapat di AJP)	0,00	0,00	16.642.436.171,00	16.642.436.171,00
Jumlah		67.075.400.000,00	0,00	30.523.504.100,00	97.598.904.100,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LO sebesar Rp. 97.598.904.100,00 berbeda dengan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah–LRA yaitu sebesar Rp67.075.400.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp.30.523.504.100,00.

5.4.2 BEBAN



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

31 Desember 2019	31 Desember 2018
1.958.095.614.002,73	2.154.453.225.670,21

Beban yang dilaporkan dalam Laporan Operasional Pemerintah Kota Malang Tahun 2019 sebesar Rp1.958.095.614.002,73 terdiri dari:

5.4.2.a BEBAN OPERASI

31 Desember 2019	31 Desember 2018
1.958.095.614.002,73	2.154.453.225.670,21

Beban Operasi-LO tahun 2019 terealisasi sebesar Rp1.958.095.614.002,73 dengan rincian sebagai berikut.

1) Beban Pegawai

31 Desember 2019	31 Desember 2018
790.674.240.820,59	762.391.902.609,37

Realisasi Beban Pegawai tahun 2019 sebesar Rp790.674.240.820,59 naik sebesar Rp28.282.338.211,22 atau naik sebesar 3,71% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp762.391.902.609,37 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.15 Rincian Beban Pegawai-LO

dalam rupiah

No	Uraian	2019	2018
1	Gaji dan Tunjangan-LO	579.290.484.716,00	571.641.753.184,00
2	Tambahan Penghasilan PNS-LO	168.869.619.231,50	146.435.318.162,75
3	Penerimaan Lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH-LO	8.516.797.400,00	7.497.000.000,00
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah-LO	16.867.627.000,00	20.732.308.459,00
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-LO	1.669.926.123,09	2.150.870.353,62
6	Uang Lembur-LO	15.459.786.350,00	13.934.652.450,00
Jumlah		790.674.240.820,59	762.391.902.609,37

Beban Pegawai pada LO sebesar Rp790.674.240.820,59 tidak sama dengan Belanja Pegawai pada LRA sebesar Rp791.508.273.117,88 sehingga terdapat selisih sebesar Rp834.032.297,29. Selisih tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.4.16 Rincian perbedaan Beban Pegawai-LO dan LRA

dalam rupiah

No	Uraian	LRA	Selisih		LO
			Kurang	Tambah	
1	2	3	4	5	6=3-4+5
1	Gaji dan Tunjangan-LO	579.290.484.716,00	0,00	0,00	579.290.484.716,00
2	Tambahan Penghasilan PNS-LO	168.869.619.231,50	0,00	0,00	168.869.619.231,50
3	Penerimaan Lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH-LO	8.516.797.400,00	0,00	0,00	8.516.797.400,00
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah-LO	17.294.877.000,00	7.214.875.000,00	6.787.625.000,00	16.867.627.000,00
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-LO	2.076.708.420,38	665.544.276,06	258.761.978,77	1.669.926.123,09
6	Uang Lembur-LO	15.459.786.350,00	0,00	0,00	15.459.786.350,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	LRA	Selisih		LO
			Kurang	Tambah	
1	2	3	4	5	6=3-4+5
	Jumlah	791.508.273.117,88	7.880.419.276,06	7.046.386.978,77	790.674.240.820,59

Selisih sebesar Rp834.032.297,29 disebabkan adanya koreksi tambah dan koreksi kurang. Adapun penjelasan mengenai koreksi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penyesuaian Beban Pegawai Tahun 2019 karena Utang Belanja Pegawai tahun 2018	(7.880.419.276,06)
Penambahan Beban Pegawai Tahun 2019 atas Utang Belanja Pegawai tahun 2018	7.046.386.978,77
	<u>(834.032.297,29)</u>

Adapun penjelasan detail rincian beban pegawai per SKPD dapat dilihat di **Lampiran 18**.

2) **Beban Persediaan**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
<u>174.664.126.996,71</u>	<u>134.576.112.987,62</u>

Realisasi Beban Persediaan tahun 2019 sebesar Rp174.664.126.996,71 naik sebesar Rp40.088.014.009,09 atau naik sebesar 29,79% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp134.576.112.987,62 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.17 Rincian Beban Persediaan

dalam rupiah

No	Uraian	2019	2018
1	Beban Barang Pakai Habis Pakai	33.846.082.683,00	47.577.933.627,00
2	Beban Persediaan Bahan/Material	77.142.619.414,41	51.407.089.765,15
3	Beban Cetak	26.795.926.959,00	20.805.243.878,00
4	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	1.547.648.000,00	1.461.824.300,00
5	Beban Pakaian Kerja	3.669.399.617,00	4.127.557.797,47
6	Beban Pakaian Khusus dan Hari Tertentu	3.505.546.200,00	5.071.881.220,00
7	Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	28.201.301.687,00	4.124.582.400,00
8	Koreksi beban persediaan th 2019 (rincian terdapat di AJP)	(44.397.564,00)	0,00
	Jumlah	174.664.126.996,71	134.576.112.987,62

Beban Persediaan pada LO sebesar Rp174.664.126.996,71 tidak sama dengan belanja Persediaan pada LRA sebesar Rp155.367.871.308,92, sehingga terdapat selisih sebesar Rp19.296.255.688,00. Selisih sebesar Rp19.296.255.688,00 disebabkan adanya mutasi tambah dan mutasi kurang. Adapun penjelasan mengenai mutasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Mutasi Tambah :	
Penggunaan barang pakai habis dari saldo tahun 2018	20.132.828.584,78
Penerimaan hibah bahan obat-obatan dan perlengkapan praktik di Dinas Kesehatan dari Provinsi Jawa Timur	13.013.578.087,00
Penerimaan hibah berupa Blanko KTP-EL di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dari Ditjen Dukcapil	448.244.500,00
Penerimaan hibah obat dan leaflet di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dari Provinsi Jawa Timur	419.245.342,00
Reklas pengadaan lampu penerangan jalan umum berupa tiang lampu sejumlah 10 buah @.Rp.2.000.000,- yang diserahkan pada masyarakat di Kelurahan Rampalcelaket	20.000.000,00
Reklas belanja alat-alat pertanian berupa komposter dan tong sampah senilai Rp.32.215.000,- merupakan barang yang diberikan pada pihak lain di Kelurahan Kebonsari	32.215.000,00
Reklas pengadaan alat-alat laboratorium biologi berupa 1 buah spare part alat hematologi analyzer membran pump masuk dalam form persediaan bahan pakai habis di Dinas Kesehatan	3.500.000,00
Reklas pengadaan alat-alat laboratorium kimia berupa torniquit dan tabung reaksi masuk dalam belanja persediaan di Puskesmas Dinoyo	4.963.750,00
Jumlah mutasi tambah	34.074.575.263,78
Mutasi Kurang :	
Sisa Persediaan yang berasal dari belanja pakai habis tahun 2019	11.319.984.710,79
Sisa persediaan dari perolehan hibah barang pakai habis di Dinas Kesehatan	3.030.547.085,50
Sisa persediaan dari perolehan hibah barang pakai habis di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	209.227.566,00
Reklas barang pakai habis ke kelompok barang ekstracomptabel	138.046.050,00
Reklas barang pakai habis belanja barang perlengkapan kantor berupa papan data kategori belanja aset masuk dalam KIB B peralatan dan mesin di Kelurahan Gading Kasri	6.690.000,00
Reklas belanja barang 20 unit Rak Tanaman @ Rp.995.000,- nilai Total Rp.19.900.000,- masuk dalam KIB B di Kelurahan Rampalcelaket	19.900.000,00
Reklas dari persediaan Alat listrik dan Elektronik berupa multi tester digital, bor listrik, power amplifier,dll (Rp.6.004.100,-) dan MIC (Rp.3.522.500,-) masuk kedalam golongan Peralatan dan Mesin di Bagian Umum	9.526.600,00
Koreksi beban persediaan 2019 (sesuai AJP)	44.397.564,00
Jumlah mutasi kurang	14.788.319.576,00
Selisih mutasi tambah dan kurang	19.296.255.687,49

Selain realisasi Beban Persediaan sebesar Rp174.664.126.996,71 tersebut, terdapat pengeluaran atas belanja makan minum pasien pada empat Puskesmas yaitu sebesar Rp26.913.000,00 dari dana hasil klaim RITP dan RJTP terdiri dari :



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

No	Puskesmas	Realisasi Makan Minum Pasien (Rp)
1	Puskesmas Dinoyo	17.493.000,00
2	Puskesmas Kedungkandang	2.640.000,00
3	Puskesmas Mulyorejo	3.450.000,00
4	Puskesmas Polowijen	3.330.000,00
Jumlah		26.913.000,00

Nilai beban persediaan tersebut tidak termasuk pengeluaran belanja barang yang direalisasikan pada belanja modal sebesar Rp52.215.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

No.	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Kelurahan Rampal Celaket	Belanja Modal pengadaan lampu penerangan jalan umum	20.000.000,00	Diserahkan ke masyarakat
2	Kelurahan Kebonsari	Belanja Modal pengadaan tong komposter dan tong sampah	32.215.000,00	Diserahkan ke masyarakat
			52.215.000,00	

3) **Beban Jasa**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
518.951.782.277,07	427.878.903.020,61

Realisasi Beban Jasa tahun 2019 sebesar Rp518.951.782.277,07 naik sebesar Rp91.072.879.256,46 atau 21,28% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp427.878.903.020,61 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.18 Rincian Beban Jasa

dalam rupiah			
No	Uraian	2019	2018
1	Beban Jasa Kantor	166.665.416.952,08	148.833.170.440,91
2	Beban Premi Asuransi	16.056.622.888,59	10.578.044.870,13
3	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	10.133.520.707,00	10.579.150.579,00
4	Beban Penggandaan	0,00	26.011.479.618,00
5	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.398.780.316,00	19.103.724.193,00
6	Beban Sewa Sarana Mobilitas	2.818.815.655,00	3.006.292.800,00
7	Beban Sewa Alat Berat	31.320.000,00	30.420.000,00
8	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.057.489.555,00	5.545.575.575,00
9	Beban Makanan dan Minuman Rapat	31.429.144.786,00	32.526.371.495,00
10	Beban Jasa Konsultasi	18.799.904.749,00	16.041.622.964,00
11	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	6.351.001.050,00	5.929.215.000,00
12	Beban Barang dan Jasa BOS	58.104.334.400,5	10.400.000,00
13	Beban Honorarium PNS	43.253.629.478,00	47.146.392.965,03
14	Beban Honorarium Non PNS	132.221.526.062,00	102.537.042.520,54
15	Beban Pegawai - BLUD	5.707.124.917,14	0,00
16	Beban Pegawai - Dana BOS	32.920.000,00	0,00
17	Beban Barang dan Jasa BLUD	3.890.230.760,76	0,00
Jumlah		518.951.782.277,07	427.878.903.020,61

Beban Jasa pada LO sebesar Rp518.951.782.277,07 tidak sama dengan belanja Jasa pada LRA sebesar Rp524.596.799.920,86 sehingga terdapat selisih sebesar (Rp5.645.017.643,79). Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Mutasi Tambah :	
Utang Belanja Jasa	2.150.432.691,36
Asuransi Diterima Dimuka 2019	378.044.309,48
Penyesuaian kurang dari belanja modal pengadaan meubelair lainnya senilai 48.425.000 karena berupa jasa konsultasi desain meubelair museum di Dinas Pendidikan	48.425.000,00
Penyesuaian utang beban jasa medis 2019	1.081.518.384,76
Jumlah mutasi tambah	3.658.420.385,60
Mutasi Kurang :	
Pembalik Utang Jasa 2018	4.060.880.963,00
Penyesuaian Asuransi Diterima Dimuka 2018	694.628.866,39
Beban Kurang Dari Penambahan Aset	4.547.928.200,00
Jumlah mutasi kurang	9.303.438.029,39
Selisih mutasi tambah dan kurang	(5.645.017.643,79)

4) **Beban Pemeliharaan**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
48.761.087.202,72	91.613.615.733,00

Realisasi Beban Pemeliharaan tahun 2019 sebesar Rp48.761.087.202,72 turun sebesar Rp42.852.528.530,28 atau 46,78% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp91.613.615.733,00 dengan rincian sebagai berikut.

5.4.19 Rincian Beban Pemeliharaan

dalam rupiah

No	Uraian	2019	2018
1	Beban Pemeliharaan	48.761.087.202,72	91.613.615.733,00
Jumlah		48.761.087.202,72	91.613.615.733,00

Beban Pemeliharaan pada LO sebesar Rp48.277.601.576,72 tidak sama dengan belanja Pemeliharaan pada LRA sebesar Rp48.180.860.376,72 adapun rincian beban pemeliharaan tersebut terdapat di **Lampiran 19**.

Nilai beban pemeliharaan tersebut tidak termasuk pengeluaran belanja barang yang direalisasikan pada belanja modal sebesar Rp1.057.749.323,00 dengan rincian sebagai berikut.

No.	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Perhubungan	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Lainnya Berupa Pengadaan Zebra Cross dan Pita Penghaduh	210.403.400,00	Tidak menambah masa manfaat aset
2	Dinas Perhubungan	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Lainnya Berupa Pengadaan Pengecatan Fasilitas Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	210.107.600,00	Tidak menambah masa manfaat aset
3	Dinas Perhubungan	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Lainnya Berupa Pengadaan Pengecatan Marka Jalan	211.944.200,00	Tidak menambah masa manfaat aset
4	Dinas Perhubungan	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Lainnya Berupa Pengadaan Fasilitas Parkir	203.212.200,00	Tidak menambah masa manfaat aset
5	Dinas Perhubungan	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	176.031.923,00	Tidak menambah masa



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

No.	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
		Lainnya Berupa Pengadaan Pengecatan Fasilitas Zona Selamat Sekolah (ZOSS)		manfaat aset
6	Kelurahan Kauman	Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	46.050.000,00	Pemeliharaan aset dibawah nilai kapitalisasi aset
			1.057.749.323,00	

5) Beban Perjalanan Dinas

<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
75.852.062.542,15	76.748.173.276,74

Realisasi Beban Perjalanan Dinas tahun 2019 sebesar Rp75.852.062.542,15 turun sebesar Rp896.110.734,59 atau 1,17% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp76.748.173.276,74 dengan rincian sebagai berikut.

5.4.20 Rincian Beban Perjalanan Dinas

dalam rupiah

No	Uraian	2019	2018
1	Beban Perjalanan Dinas	75.852.062.542,15	76.748.173.276,74
2	Beban Perjalanan Pindah Tugas	0,00	0,00
Jumlah		75.852.062.542,15	76.748.173.276,74

6) Beban Hibah

<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
73.710.379.600,00	300.595.470.636,27

Realisasi Beban Hibah tahun 2019 sebesar Rp73.710.379.600,00 turun sebesar Rp226.885.091.036,27 atau sebesar 75,48% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp300.595.470.636,27 dengan rincian sebagai berikut.

5.4.21 Rincian Beban Hibah

dalam rupiah

No	Uraian	SKPD	2019	2018
1	Beban hibah kepada organisasi/lembaga pendidikan	BPKAD selaku PPKD	57.143.990.000,00	51.643.080.000,00
2	Beban hibah kepada organisasi/lembaga kemasyarakatan	BPKAD selaku PPKD	16.566.389.600,00	21.295.905.333,27
3	Beban hibah kepada pemerintah		0,00	227.656.485.303,00
Jumlah			73.710.379.600,00	300.595.470.636,27

7) Beban Bantuan Sosial

<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
0,00	0,00

Realisasi Beban Bantuan Sosial tahun 2019 sebesar Rp0,00.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

8) **Beban Penyusutan**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
248.490.344.020,05	332.773.984.736,53

Realisasi Beban Penyusutan tahun 2019 sebesar Rp248.490.344.020,05 turun sebesar Rp84.283.640.716,48 atau sebesar 25,33% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp332.773.984.736,53 dengan rincian sebagai berikut.

5.4.22 Beban Penyusutan

dalam rupiah

No	Uraian	2019	2018
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	105.470.747.504,71	97.727.772.051,85
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	26.661.375.394,54	24.921.100.100,60
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	115.623.285.689,20	209.300.037.310,80
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	734.935.431,60	825.075.273,28
Jumlah		248.490.344.020,05	332.773.984.736,53

Adapun rincian beban penyusutan per masing-masing jenis aset dapat dilihat di **Lampiran 20**.

9) **Beban Amortisasi**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
5.554.336.662,75	5.174.800.379,00

Realisasi Beban Amortisasi tahun 2019 sebesar Rp5.554.336.662,75 naik sebesar Rp379.536.283,75 atau sebesar 7,33% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp5.174.800.379,00 Adapun rincian beban amortisasi per SKPD terdapat di **Lampiran 21**.

10) **Beban Penyisihan Piutang**

31 Desember 2019	31 Desember 2018
13.277.991.733,69	16.760.034.979,38

Realisasi Beban Penyisihan Piutang - LO tahun 2019 sebesar Rp13.277.991.733,69 turun sebesar Rp3.482.043.245,69 atau sebesar 20,78% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp16.760.034.979,38 dengan rincian sebagai berikut.

5.4.23 Beban Penyisihan Piutang

dalam rupiah

No	Uraian	2019	2018
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	11.991.988.289,84	15.732.833.958,64
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	875.332.763,22	836.329.561,24
3	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	410.670.680,63	190.871.459,50
Jumlah		13.277.991.733,69	16.760.034.979,38



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

11) Beban Transfer

31 Desember 2019	31 Desember 2018
662.694.733,00	635.263.795,00

Realisasi Beban Transfer tahun 2019 sebesar Rp662.694.733,00 naik sebesar Rp27.430.938,00 atau sebesar 4,32% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp635.263.795,00 dengan rincian sebagai berikut.

5.4.24 Beban Transfer

dalam rupiah

No	Uraian	2019	2018
1	Beban Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	662.694.733,00	635.263.795,00
	Jumlah	662.694.733,00	635.263.795,00

Adapun rincian beban transfer tahun 2019, terdapat di **Lampiran 22**.

12) Beban Lain-Lain

31 Desember 2019	31 Desember 2018
7.496.567.414,00	5.304.963.516,69

Realisasi Beban Lain-Lain tahun 2019 sebesar Rp7.496.567.414,00 naik sebesar Rp2.191.603.897,31 atau sebesar 41,31% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp5.304.963.516,69. Beban Lain-Lain terdiri dari Beban Lain-Lain yang berupa penyesuaian aset dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sesuai Perwal 33 tahun 2018 dan penyesuaian reklasifikasi dari beban barang pakai habis karena tidak memenuhi kriteria barang pakai habis dengan rincian sebagai berikut.

5.4.25 Beban Lain Lain

dalam rupiah

No	Uraian	2019	2018
1	Beban lain-ain tambah dari pengurangan aset yang direklasifikasi ke ekstrakomptable	0,00	5.085.022.764,00
2	Beban bunga bos negatif yang disebabkan beban administrasi lebih besar dari pada pendapatan bunga	0,00	25.120,69
3	Beban lain-lain tambah dari pengurangan persediaan karena direklasifikasi ke ekstrakomptable	0,00	219.915.632,00
4	Beban Lain-lain	7.496.567.414,00	0,00
	Jumlah	7.496.567.414,00	5.304.963.516,69

Penjelasan Beban Lain-lain menurut klarifikasi organisasi:

Kode SKPD	Nama SKPD	Realisasi (Rp)
1.01.01	Dinas Pendidikan	4.226.165.509,00
1.01.03	SMP NEGERI 2 MALANG	2.700.000,00
1.01.05	SMP NEGERI 4 MALANG	22.750.000,00
1.01.07	SMP NEGERI 6 MALANG	7.063.800,00
1.01.16	SMP NEGERI 15 MALANG	13.740.000,00
1.01.17	SMP NEGERI 16 MALANG	1.000.000,00
1.01.18	SMP NEGERI 17 MALANG	5.100.000,00
1.01.20	SMP NEGERI 19 MALANG	24.620.000,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Kode SKPD	Nama SKPD	Realisasi (Rp)
1.01.23	SMP NEGERI 22 MALANG	5.000.000,00
1.01.24	SMP NEGERI 23 MALANG	15.730.000,00
1.01.25	SMP NEGERI 24 MALANG	16.250.000,00
1.02.01	Dinas Kesehatan	543.260.835,00
1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah	87.465.552,00
1.02.03	Puskesmas Janti	21.194.680,00
1.02.04	Puskesmas Dinoyo	39.998.000,00
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	11.153.570,00
1.04.01	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	8.556.202,00
1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	410.000,00
1.06.01	Dinas Sosial	31.283.500,00
1.08.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	5.880.000,00
1.11.01	Dinas Lingkungan Hidup	5.340.000,00
1.12.01	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	660.000,00
1.15.01	Dinas Perhubungan	1.102.234.323,00
1.16.01	Dinas Komunikasi Dan Informatika	2.527.520,00
1.17.01	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	7.159.600,00
1.18.01	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.595.850,00
1.19.01	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	5.755.000,00
1.23.01	Dinas Perpustakaan Umum Dan Arsip Daerah	2.475.000,00
2.03.01	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	43.185.043,00
2.07.01	Dinas Perindustrian	14.970.000,00
3.02.01	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	136.627.500,00
3.02.02	Badan Pelayanan Pajak Daerah	39.680.000,00
4.01.0308	Bagian Umum	103.849.950,00
4.01.0309	Bagian Keuangan Dan Perlengkapan	49.582.400,00
4.02.01	Inspektorat	24.125.000,00
4.03.01	Sekretariat DPRD	92.217.700,00
4.04.01	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.311.680,00
4.05.01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30.980.000,00
4.06.01	Kecamatan Klojen	4.944.000,00
4.06.0101	Kelurahan Klojen	7.934.000,00
4.06.0102	Kelurahan Rampal Celaket	54.409.000,00
4.06.0103	Kelurahan Samaan	4.800.000,00
4.06.0106	Kelurahan Kasin	59.000.000,00
4.06.0107	Kelurahan Kauman	46.050.000,00
4.06.0111	Kelurahan Penanggungan	5.480.000,00
4.06.02	Kecamatan Blimbing	475.000,00
4.06.0201	Kelurahan Blimbing	5.215.000,00
4.06.0202	Kelurahan Polowijen	31.000.000,00
4.06.0203	Kelurahan Arjosari	1.350.000,00
4.06.0205	Kelurahan Pandanwangi	24.750.000,00
4.06.0206	Kelurahan Purwanto	11.565.000,00
4.06.0208	Kelurahan Kesatrian	53.400.000,00
4.06.0210	Kelurahan Jodipan	46.220.000,00
4.06.0302	Kelurahan Kotalama	3.250.000,00
4.06.0303	Kelurahan Mergosono	1.000.000,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Kode SKPD	Nama SKPD	Realisasi (Rp)
4.06.0305	Kelurahan Wonokoyo	1.955.000,00
4.06.0308	Kelurahan Sawojajar	201.173.200,00
4.06.0309	Kelurahan Madyopuro	19.065.000,00
4.06.04	Kecamatan Lowokwaru	19.079.000,00
4.06.0403	Kelurahan Sumbersari	2.937.000,00
4.06.0404	Kelurahan Ketawanggede	4.950.000,00
4.06.0405	Kelurahan Jatimulyo	900.000,00
4.06.0406	Kelurahan Tunjungsekar	32.530.000,00
4.06.0407	Kelurahan Mojolangu	21.925.000,00
4.06.0408	Kelurahan Tulusrejo	38.245.000,00
4.06.0410	Kelurahan Tunggulwulung	2.000.000,00
4.06.0504	Kelurahan Kebonsari	681.000,00
4.06.0508	Kelurahan Karang Besuki	33.687.000,00
Jumlah		7.496.567.414,00

5.4.3 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL - LO

31 Desember 2019	31 Desember 2018
228.385.717,00	115.210.885.966,00

Realisasi Surplus/ Defisit non operasional-LO sebesar Rp228.385.717,0 turun sebesar 99,80% dibandingkan tahun 2018 yang sebesar Rp115.210.885.966,00. Defisit sebesar Rp228.385.717,00 ini dikarenakan terjadi penyesuaian atas pencatatan penurunan investasi permanen tahun 2019 di PD. Rumah Potong Hewan, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Nominal (Rp)
Rugi bersih tahun 2019	(334.490.717,00)
Koreksi Saldo Laba (Rugi) Tahun 2018	100.000.000,00
Penggunaan Laba Tahun 2018	6.105.000,00
Jumlah	(228.385.717,00)

5.4.4 POS LUAR BIASA

31 Desember 2019	31 Desember 2018
143.521.065,00	34.080.542,00

Pos Luar Biasa yang dilaporkan dalam Laporan Operasional Pemerintah Kota Malang Tahun 2019 sebesar Rp143.521.065,00.

5.4.4.a PENDAPATAN LUAR BIASA – LO

31 Desember 2019	31 Desember 2018
0,00	0,00

Tidak terdapat adanya mutasi pada akun Pendapatan Luar Biasa – LO pada TA 2019.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

5.4.4.b BEBAN LUAR BIASA - LO

31 Desember 2019	31 Desember 2018
143.521.065,00	34.080.542,00

Realisasi Beban Luar Biasa tahun 2019 sebesar Rp143.521.065,00 naik sebesar Rp109.440.523,00 atau sebesar 321,12% dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp34.080.542,00. Adapun rincian data tersebut terdapat di **Lampiran 23**.

Nilai beban luar biasa tersebut tidak termasuk pengeluaran belanja tidak terduga yang direalisasikan pada pengeluaran pembiayaan sebesar Rp330.327.859,00 untuk pembayaran kekurangan Jampersal TA 2018.

5.4.5 SURPLUS/DEFISIT - LO

31 Desember 2019	31 Desember 2018
306.782.659.526,06	(265.812.221.010,32)

Surplus/Defisit-LO Pemerintah Kota Malang pada tahun 2019 sebesar Rp306.782.659.526,06 naik sebesar Rp572.594.880.536,38 atau 215,41% dibanding tahun 2018 sebesar (Rp265.812.221.010,32).



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

5.5. LAPORAN ARUS KAS

Tujuan penyusunan Laporan Arus Kas adalah menyajikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran selama satu periode akuntansi serta memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Malang per tanggal 31 Desember 2019 terdiri dari:

5.5.1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Saldo Arus Kas dari Aktivitas Operasi mencerminkan posisi penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan kegiatan operasi Pemerintah Daerah yang meliputi aliran kas masuk dan aliran kas keluar dari aktivitas operasi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

dalam rupiah

Uraian	2019	2018
Arus Kas Masuk	2.187.985.479.986,01	2.040.194.240.906,67
Arus Kas Keluar	(1.671.249.762.964,53)	(1.573.867.382.971,69)
Arus Kas Bersih	516.735.717.021,48	466.326.857.934,98

Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2019 dan 2018 sebagai berikut.

Tabel 5.5.2 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

dalam rupiah

Uraian	2019	2018
Penerimaan Pajak Daerah	460.047.450.664,60	434.678.309.679,54
Penerimaan Retribusi Daerah	46.605.703.263,00	50.505.712.055,51
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28.559.431.165,39	24.792.410.715,90
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	52.853.457.258,02	46.911.950.692,72
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	41.088.807.989,00	59.220.052.598,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	89.771.535.806,00	93.140.141.495,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	886.503.661.000,00	844.477.164.310,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	185.881.891.526,00	184.452.461.185,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	73.871.078.000,00	25.500.000.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	252.268.704.314,00	204.361.428.175,00
Penerimaan Bagi Hasil Provinsi Lainnya	3.458.359.000,00	3.337.330.000,00
Penerimaan Hibah	67.075.400.000,00	68.817.280.000,00
Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
Penerimaan Lainnya	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Uraian	2019	2018
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah	2.187.985.479.986,01	2.040.194.240.906,67

Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2019 dan 2018 sebagai berikut.

Tabel 5.5.3 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

dalam rupiah

Uraian	2019	2018
Pembayaran Pegawai	791.508.273.117,88	761.211.732.403,01
Pembayaran Barang dan Jasa	804.011.044.448,65	739.047.320.898,41
Pembayaran Bunga	0,00	0,00
Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
Pembayaran Hibah	73.710.379.600,00	72.938.985.333,27
Pembayaran Bantuan Sosial	0,00	0,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	662.694.733,00	635.263.795,00
Pembayaran Tak Terduga	1.357.371.065,00	34.080.542,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah	1.671.249.762.964,53	1.573.867.382.971,69

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi tersebut tidak termasuk pengeluaran yang direalisasikan pada Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan untuk pembayaran barang dan jasa dan pembayaran kejadian luar biasa sebesar Rp1.440.292.182,00 dengan rincian sebagai berikut.

No.	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Perhubungan	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Lainnya Berupa Pengadaan Zebra Cross dan Pita Penggaduh	210.403.400,00	Tidak menambah masa manfaat aset
2	Dinas Perhubungan	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Lainnya Berupa Pengadaan Pengecatan Fasilitas Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	210.107.600,00	Tidak menambah masa manfaat aset
3	Dinas Perhubungan	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Lainnya Berupa Pengadaan Pengecatan Marka Jalan	211.944.200,00	Tidak menambah masa manfaat aset
4	Dinas Perhubungan	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Lainnya Berupa Pengadaan Fasilitas Parkir	203.212.200,00	Tidak menambah masa manfaat aset
5	Dinas Perhubungan	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Lainnya Berupa Pengadaan Pengecatan Fasilitas Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	176.031.923,00	Tidak menambah masa manfaat aset
6	Kelurahan Rampil Celaket	Belanja Modal pengadaan lampu penerangan jalan umum	20.000.000,00	Diserahkan ke masyarakat
7	Kelurahan Kauman	Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	46.050.000,00	Pemeliharaan aset dibawah nilai kapitalisasi aset



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

No.	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
8	Kelurahan Kebonsari	Belanja Modal pengadaan tong komposter dan tong sampah	32.215.000,00	Diserahkan ke masyarakat
9	BKAD	Pengeluaran pembiayaan untuk Kekurangan Jampersal TA 2018	330.327.859,00	Pengeluaran untuk Belanja Tidak Terduga
			1.440.292.182,00	

5.5.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan posisi penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan kegiatan investasi pemerintah daerah yang meliputi aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Arus kas bersih dari aktivitas investasi tahun 2019 adalah sebesar (Rp263.000.539.354,66) yang dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

dalam rupiah

Uraian	2019	2018
Arus Kas Masuk	0,00	0,00
Arus Kas Keluar	(263.000.539.354,66)	(377.402.265.303,86)
Arus Kas Bersih	(263.000.539.354,66)	(377.402.265.303,86)

Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2019 dan 2018 sebagai berikut.

Tabel 5.5.5 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

dalam rupiah

Uraian	2019	2018
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Penjualan atas Aset Lainnya	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2019 dan 2018 sebagai berikut.

Tabel 5.5.6 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

dalam rupiah

Uraian	2019	2018
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Perolehan Tanah	1.052.056.200,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	92.686.829.412,80	164.899.809.894,08
Perolehan Gedung dan Bangunan	65.234.558.282,86	84.752.382.348,97



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Uraian	2019	2018
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	77.371.112.829,00	94.992.003.183,81
Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.493.032.570,00	4.706.001.970,00
Perolehan Aset Lainnya	687.950.060,00	1.853.071.500,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	24.475.000.000,00	26.198.996.407,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah	263.000.539.354,66	377.402.265.303,86

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan tersebut termasuk pengeluaran untuk Aktivitas Operasi untuk pembayaran barang dan jasa sebesar Rp1.109.964.323,00 dengan rincian sebagai berikut.

No.	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Dinas Perhubungan	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Lainnya Berupa Pengadaan Zebra Cross dan Pita Penggaduh	210.403.400,00	Tidak menambah masa manfaat aset
2	Dinas Perhubungan	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Lainnya Berupa Pengadaan Pengecatan Fasilitas Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	210.107.600,00	Tidak menambah masa manfaat aset
3	Dinas Perhubungan	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Lainnya Berupa Pengadaan Pengecatan Marka Jalan	211.944.200,00	Tidak menambah masa manfaat aset
4	Dinas Perhubungan	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Lainnya Berupa Pengadaan Fasilitas Parkir	203.212.200,00	Tidak menambah masa manfaat aset
5	Dinas Perhubungan	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Lainnya Berupa Pengadaan Pengecatan Fasilitas Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	176.031.923,00	Tidak menambah masa manfaat aset
6	Kelurahan Rampal Celaket	Belanja Modal pengadaan lampu penerangan jalan umum	20.000.000,00	Diserahkan ke masyarakat
7	Kelurahan Kauman	Belanja Modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	46.050.000,00	Pemeliharaan aset dibawah nilai kapitalisasi aset
8	Kelurahan Kebonsari	Belanja Modal pengadaan tong komposter dan tong sampah	32.215.000,00	Diserahkan ke masyarakat
			1.109.964.323,00	

5.5.3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp330.327.859,00. Arus Kas keluar dari Aktivitas Pendanaan tersebut merupakan pengeluaran untuk Aktivitas Operasi untuk pembayaran kekurangan Jampersal TA 2018 sebesar Rp330.327.859,00.

5.5.4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus kas dari aktivitas transitoris pada tanggal 31 Desember 2019 Rp33.593.342.448,00. Nilai tersebut merupakan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang telah dipungut dan disetor kembali sebesar Rp33.593.342.448,00.

Perbandingan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2019 dan 2018 sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel 5.5.7 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

dalam rupiah

Uraian	2019	2018
Arus Kas Masuk	33.593.342.448,00	93.117.145.403,03
Arus Kas Keluar	(33.593.342.448,00)	(93.117.145.403,03)
Arus Kas Bersih	0,00	0,00

5.5.5. KENAIKAN/(PENURUNAN) KAS

Kenaikan/(penurunan) kas yang berasal dari arus kas bersih dari aktivitas operasi, arus kas bersih dari aktivitas investasi, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan, dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris Tahun 2019 sebesar Rp253.404.849.807,82.

5.5.6. SALDO AWAL KAS DI BUD, KAS JKN DAN KAS BOS SILPA

Saldo awal kas di Bendahara Umum Daerah sebesar Rp489.359.571.730,35 terdiri dari Kas di BUD, Kas di JKN dan Kas BOS SILPA.

5.5.7. SALDO KAS AKHIR

Saldo akhir kas merupakan penjumlahan dari Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan JKN SILPA 2019, Kas di Bendahara Dana BOSNAS SILPA 2019, Kas di Bendahara BLUD SILPA 2019, Kas di Bendahara Penerimaan JKN non SILPA, dan Kas di Bendahara Dana BOSNAS non SILPA per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.8 Saldo Akhir Kas

dalam rupiah

Uraian	Tahun 2019
Kas di BUD	732.518.691.596,23
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan JKN SILPA 2019	2.602.752.860,30
Kas di Bendahara Dana BOSNAS SILPA 2019	3.116.184.497,50
Kas di Bendahara BLUD SILPA 2019	4.526.792.584,14
Kas di Bendahara Penerimaan JKN Non SILPA	3.830.600,00
Kas di Bendahara Dana BOSNAS Non SILPA	2.075.214,77
Saldo Akhir Kas	742.770.327.352,94



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.6.1 EKUITAS AKHIR

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	6.379.676.358.783,95	6.382.648.910.352,52

Saldo ekuitas akhir sebesar Rp6.379.676.358.783,95 berasal dari ekuitas awal ditambah dengan Surplus/ Defisit LO dan dikurangi dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar.

1. Saldo Ekuitas Awal

Ekuitas awal disajikan berdasarkan saldo ekuitas akhir tahun 2018 (*audited*), dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5.6.1 Kronologi Ekuitas Awal

dalam rupiah

No	Uraian	Nominal	Keterangan
1	Ekuitas Awal	6.382.648.910.352,52	Saldo ekuitas awal tahun 2019 terdiri dari: - sama dengan ekuitas akhir tahun 2018

A. Surplus/Defisit LO

Penyajian nominal Surplus/Defisit-LO berasal dari Laporan Operasional (LO) yang penghitungannya adalah Total Pendapatan-LO dikurangi total beban. Surplus/Defisit-LO tahun 2019 sebesar Rp306.782.659.526,06 dengan perhitungan sebagai berikut.

Pendapatan LO	2.265.250.180.310,79
Beban LO	1.958.095.614.002,73
Surplus dari Kegiatan Operasi	307.154.566.308,06
Surplus dari kegiatan Non Operasi	(228.385.717,00)
Beban Luar Biasa	143.521.065,00
Surplus/Defisit LO	306.782.659.526,06

B. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar

Penyajian nominal dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar tahun 2019 sebesar Rp309.755.211.094,62 sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

Tabel 5.6.2. Tabel Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

dalam rupiah

No	Uraian	Nilai
1	Mencatat penyesuaian pelimpahan Kas JKN dari Dinas Kesehatan ke Kas BLUD di Puskesmas Janti (Rp530.067.648,00)	530.067.648,00
2	Mencatat penyesuaian pelimpahan Kas JKN dari Dinas Kesehatan ke Kas BLUD di Puskesmas Dinoyo (Rp99.610.124,60)	99.610.124,60
3	Mencatat kapitalisasi Aset Lainnya tahun 2019	49.967.500,00
4	Koreksi kurang catat piutang retribusi sewa tanah pemakaian kekayaan daerah tahun 2018	432.739.844,00
5	Koreksi kurang catat piutang pajak Air Tanah tahun 2018	11.886.164,42
6	Koreksi kurang catat piutang pajak Parkir tahun 2018	36.583.000,00
7	Koreksi kurang catat piutang pajak Penerangan Jalan Non PLN tahun 2018	7.453.138,49
8	Koreksi kurang catat Piutang Pajak Restoran tahun 2018	1.462.777.710,31
9	Koreksi kurang catat Piutang Pajak Hotel tahun 2018	1.285.457.854,48
10	Koreksi kurang catat Piutang Pajak Hiburan tahun 2018	434.403.764,53
11	Mencatat koreksi saldo Kas Bosnas karena Pelimpahan dari SMP ke Dinas Pendidikan	1.754.185.715,05
12	Koreksi saldo Utang Belanja Bosnas	74.318.938,00
13	Koreksi kurang catat saldo kas di SD Bunulrejo 3 sebesar Rp6.718.744,38	6.718.744,38
14	Mencatat koreksi saldo akhir Kas di Bendahara Dana BOSNAS SILPA 2018	212.058.056,59
15	Koreksi saldo Utang Belanja Bosnas karena pelimpahan dari SMP ke Dinas Pendidikan	400.000,00
16	Koreksi saldo Utang Belanja Bosnas karena pelimpahan dari SMP ke Dinas Pendidikan	220.000,00
17	Koreksi saldo Utang Belanja Bosnas karena pelimpahan dari SMP ke Dinas Pendidikan	72.459.900,00
18	Mencatat pengalihan Utang dari SMPN 15 ke Dinas Pendidikan sebesar Rp8.707.200,00	8.707.200,00
19	Koreksi saldo Utang Belanja Bosnas karena pelimpahan dari SMP ke Dinas Pendidikan	40.373.000,00
20	Koreksi saldo Utang Belanja Bosnas karena pelimpahan dari SMP ke Dinas Pendidikan	52.019.675,00
21	Koreksi kelebihan Jurnal Pembayaran Bunga BOS 2019 (yang seharusnya tidak dijumlah)	52.426.770,16
22	Koreksi lebih catat setor non SILPA BOS 2018 (SD Lowokwaru belum setor di tahun 2019)	2.075.214,77
23	Mencatat sisa persediaan 2018 bahan makanan (biskuit) dari APBN	475.889.911,20
24	Koreksi kurang catat Piutang BPJS 2019, dengan rincian :	380.293.242,00
25	Penyesuaian masuk kembali aset belanja modal perbaikan peralatan dan mesin berupa pemeliharaan rutin berkala yang telah dikeluarkan dari Aset (Peralatan dan Mesin) senilai Rp96.741.200	96.741.200,00
26	Penyesuaian menghapus beban penyusutan dan akumulasi penyusutan karena penghapusan double catat	1.036.780.971,43
27	Koreksi beban penyusutan dan akumulasi penyusutan reklas dari KIB B ke KIB E berupa alat kesenian	4.417.200,00
28	Koreksi beban dan akumulasi penyusutan Peralatan dan mesin di bawah nilai kapitalisasi pada 5 SKPD	993.500,00
29	Penyesuaian beban penyusutan dan akumulasi penyusutan pemeliharaan di bawah nilai kapitalisasi	3.908.571,43
30	Penyesuaian Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan karena Penghapusan Peralatan dan Mesin senilai Rp1.179.150.000	1.010.700.000,00
31	Penghapusan akumulasi penyusutan gedung UPT Laboratorium DLH jalan Majapahit no.1 Malang senilai Rp.565.415.000,- berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Malang No.188.451/250/35.73.112/2019 tanggal. 31 Desember 2019	565.415.000,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Nilai
32	Penyesuaian beban penyusutan dan Akumulasi penyusutan aset gedung dan bangunan direklas ke persediaan karena akan diserahkan kepada masyarakat	7.737.120,00
Jurnal Koreksi Menambah Ekuitas		10.209.786.678,84
1	Mencatat penyesuaian Kas JKN karena penyetoran Kas Non SiLPA di Puskesmas Gribig sesuai Audit BPK (STS Nomor 3439/3.02.0101/STS/2019)	(28.350.000,00)
2	Mencatat penyesuaian pelimpahan Kas JKN ke Kas BLUD di Puskesmas Janti (Rp530.067.648,00) dan Puskesmas Dinoyo (Rp99.610.124,60)	(629.677.772,60)
3	Mencatat beban amortisasi tahun 2019 dan akumulasi amortisasi atas kurang catat kapitalisasi aset tidak berwujud (<i>software</i>) pengadaan tahun 2018	(12.491.875,00)
4	Koreksi Saldo Awal Utang Jangka Pendek Lainnya (Dana DAK) Pengeluaran Pembiayaan Daerah Untuk Pembayaran Pokok Utang Jatuh Tempo Kekurangan Jampersal tahun 2018 kepada RSUD Kota Malang	(330.327.859,00)
5	Koreksi lebih catat piutang pajak Air Tanah tahun 2018	(2.385.935,10)
6	Koreksi lebih catat Piutang Pajak Restoran tahun 2018	(90.092.944,60)
7	Koreksi lebih catat Piutang Pajak Hotel tahun 2018	(3.185.887,75)
8	Koreksi lebih catat Piutang Pajak Hiburan tahun 2018	(50.080,00)
9	Mencatat pengalihan Utang dari SMPN 15 ke Dinas Pendidikan sebesar Rp8.707.200,00	(8.707.200,00)
10	Mencatat Setoran Akumulasi Bunga Bank Dana BOSNAS periode s.d TA 2018 dan setoran bunga bersih ke Kas Daerah	(686.657.876,21)
11	Mencatat Beban Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan Tahun Sebelumnya	(157.148.599.607,56)
12	Mencatat koreksi saldo Kas Bosnas karena Pelimpahan dari SMP ke Dinas Pendidikan	(23.367.797,08)
13	Mencatat koreksi saldo Kas Bosnas karena Pelimpahan dari SMP ke Dinas Pendidikan	(47.291.365,43)
14	Mencatat koreksi saldo Kas Bosnas karena Pelimpahan dari SMP ke Dinas Pendidikan	(198.790.375,91)
15	Mencatat koreksi saldo Kas Bosnas karena Pelimpahan dari SMP ke Dinas Pendidikan	(116.132.625,53)
16	Mencatat koreksi saldo Kas Bosnas karena Pelimpahan dari SMP ke Dinas Pendidikan	(36.744.581,97)
17	Mencatat koreksi saldo Kas Bosnas karena Pelimpahan dari SMP ke Dinas Pendidikan	(58.561.293,48)
18	Mencatat koreksi saldo Kas Bosnas karena Pelimpahan dari SMP ke Dinas Pendidikan	(40.803.565,81)
19	Mencatat koreksi saldo Kas Bosnas karena Pelimpahan dari SMP ke Dinas Pendidikan	(167.199.546,61)
20	Mencatat koreksi saldo Kas Bosnas karena Pelimpahan dari SMP ke Dinas Pendidikan	(100.496.969,14)
21	Mencatat koreksi saldo Kas Bosnas karena Pelimpahan dari SMP ke Dinas Pendidikan	(84.713.530,76)
22	Mencatat koreksi saldo Kas Bosnas karena Pelimpahan dari SMP ke Dinas Pendidikan	(138.459.354,00)
23	Mencatat koreksi saldo Kas Bosnas karena Pelimpahan dari SMP ke Dinas Pendidikan	(20.958.258,48)
24	Mencatat koreksi saldo Kas Bosnas karena Pelimpahan dari SMP ke Dinas Pendidikan	(51.352.329,60)
25	Mencatat koreksi saldo Kas Bosnas karena Pelimpahan dari SMP ke Dinas Pendidikan	(27.733.734,58)
26	Mencatat koreksi saldo Kas Bosnas karena Pelimpahan dari SMP ke Dinas Pendidikan	(32.193.829,59)
27	Mencatat koreksi saldo Kas Bosnas karena Pelimpahan dari SMP ke Dinas Pendidikan	(3.199.640,95)
28	Mencatat koreksi saldo Kas Bosnas karena Pelimpahan dari SMP ke Dinas Pendidikan	(122.566.728,56)
29	Mencatat koreksi saldo Kas Bosnas karena Pelimpahan dari SMP ke Dinas Pendidikan	(11.579.450,66)
30	Mencatat koreksi saldo Kas Bosnas karena Pelimpahan dari SMP ke Dinas Pendidikan	(65.323.821,59)
31	Mencatat koreksi saldo Kas Bosnas karena Pelimpahan dari SMP ke Dinas Pendidikan	(144.182.901,40)
32	Mencatat koreksi saldo Kas Bosnas karena Pelimpahan dari SMP ke Dinas Pendidikan	(107.222.467,78)



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Nilai
33	Mencatat koreksi saldo Kas Bosnas karena Pelimpahan dari SMP ke Dinas Pendidikan	(37.596.454,40)
34	Mencatat koreksi saldo Kas Bosnas karena Pelimpahan dari SMP ke Dinas Pendidikan	(17.476.844,45)
35	Mencatat koreksi saldo Kas Bosnas karena Pelimpahan dari SMP ke Dinas Pendidikan	(16.985.092,09)
36	Mencatat koreksi saldo Kas Bosnas karena Pelimpahan dari SMP ke Dinas Pendidikan	(79.341.745,90)
37	Mencatat koreksi saldo Kas Bosnas karena Pelimpahan dari SMP ke Dinas Pendidikan	(2.249.864,43)
38	Mencatat koreksi saldo Kas Bosnas karena Pelimpahan dari SMP ke Dinas Pendidikan	(1.661.544,87)
39	Penghapusan Aset Tanah dampak P2D karena telah diserahkan ke Provinsi pada Dinas BKAD (SMKN 2, SMKN 1 utara dan SMKN 1 Selatan)	(155.081.993.914,00)
40	Penghapusan double catat kendaraan sebesar Rp1.209.577.800,00	(1.209.577.800,00)
41	Penyesuaian KIB B pada Bagian Umum karena penghapusan Peralatan dan Mesin senilai Rp1.179.150.000,00	(1.179.150.000,00)
42	Koreksi jurnal hibah berupa bus dari Kemenhub tahun 2019	(670.000.000,00)
43	Penghapusan Gedung UPT Laboratorium DLH jalan Majapahit no.1 malang senilai Rp565.415.000,00 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Malang No.188.451/250/35.73.112/2019 tanggal. 31 Desember 2019	(565.415.000,00)
44	Koreksi kelebihan Jurnal Kas BOS (yg seharusnya tidak ada)	(212.058.056,59)
45	Penyesuaian Aset Gedung dan Bangunan yg diserahkan kepada masyarakat berupa gardu senilai Rp193.428.000,00	(193.428.000,00)
46	Koreksi Peralatan dan mesin di bawah nilai kapitalisasi pada 5 SKPD	(150.302.250,00)
47	Penyesuaian pemeliharaan dari aset tetap peralatan dan mesin pada 2 SKPD karena	(8.360.000,00)
Jurnal Koreksi Menambah Ekuitas		(319.964.997.773,46)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar		(309.755.211.094,62)



BAB VI
**PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI KEUANGAN DAN NON-
KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MALANG**

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 terdapat informasi-informasi keuangan maupun non-keuangan yang penting untuk diketahui dan ditelaah, sehingga kondisi pelaksanaan APBD dapat dimengerti dengan lebih komprehensif.

Hal-hal tersebut adalah:

1. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah dimulai sejak tahun 2014. Dikarenakan dana kapitasi JKN dikelola secara langsung oleh entitas tanpa melalui mekanisme APBD, maka untuk meningkatkan kualitas dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan diperlukan koordinasi dan rekonsiliasi data yang intensif antara FKTP sebagai penyelenggara dan Dinas Kesehatan sebagai entitas akuntansi.
2. Pemerintah Kota Malang menetapkan sistem pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) melalui Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/248/35.73.112/2018 tentang Penetapan Persetujuan Pola Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dan 2 (dua) Pusat Kesehatan Masyarakat, dengan ketentuan tersebut maka 3 satuan unit kerja yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang, Puskesmas Janti dan Puskesmas Dinoyo menerapkan pengelolaan keuangan BLUD dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kepuasan masyarakat.
3. Pengelolaan Dana Bosnas yang merupakan penggunaan langsung oleh sekolah memerlukan perhatian dan penanganan secara khusus oleh pihak penanggung jawab penggunaan dana dan SDM yang terlibat dalam pengelolaan dana baik dalam hal perencanaan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan keuangan Dana BOS sehingga diharapkan dapat dilakukan pengelolaan dana dengan baik sesuai target dan rencana yang diharapkan serta dapat menyajikan pelaporan keuangan dana BOS secara tertib dan tepat waktu sesuai ketentuan.
4. Penyerahan aset yang berasal dari pihak swasta kepada Pemerintah Kota Malang melalui kerjasama *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang terdiri dari 15 obyek, meliputi, 2 play ground, 2 ruang terbuka hijau, 2 kawasan pedestrian, dan 9 taman. Aset tersebut tidak dapat diverifikasi dan dimasukkan dalam Laporan Barang Milik Daerah Kota Malang dikarenakan data yang terdapat dalam Berita Acara Serah Terima belum dilengkapi dengan nilai perolehan dari masing-masing unit barang.
5. Perubahan struktur organisasi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada akhir tahun 2019 menjadi tantangan tersendiri dikarenakan adanya pisah gabung perangkat daerah yang menyebabkan banyaknya ASN yang berpindah jabatan sehingga proses penyusunan laporan keuangan menemui banyak hambatan yaitu :



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

- a. Restrukturisasi kepegawaian terhadap penugasan pejabat struktural yang memiliki tugas pokok dan fungsi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Penatausahaan Barang Milik Pengguna (PPBMP) yang bertanggungjawab terhadap akuntansi SKPD, Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
 - b. Proses restrukturisasi berakibat terhadap proses penyusunan LKPD Pemerintah Kota Malang mengalami permasalahan di tingkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) didalam mengkoordinasikan pejabat dan pelaksana yang sudah berpindah tempat tugasnya, maupun didalam penyajian dokumen administratif.
6. Dinas Pendidikan Kota Malang menerima bantuan Pemerintah Pusat untuk biaya pengembangan keprofesian berkelanjutan melalui peningkatan kompetensi pembelajaran berbasis zonasi dengan nilai total sebesar Rp2.213.944.000 yang ditransfer ke rekening tabungan BRI Dinas Pendidikan Kota Malang Nomor 1771-01-001575-53-1. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada tahun 2019 dan pada rekening tersisa Rp510.555 yang merupakan saldo awal pembukaan rekening dan bunga bank.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2019

BAB VII
PENUTUP

Berdasarkan penjelasan pada Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kota Malang secara teknis telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Pelaporan Pelaksanaan Anggaran pada Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Pemerintah Kota Malang melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berusaha melaksanakan secara konsisten peraturan perundang-undangan dalam bidang keuangan untuk memenuhi amanat pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Namun tidak dapat dihindari terdapat permasalahan-permasalahan yang mengikutinya, yaitu kesiapan sumber daya manusia yang mampu melaksanakan proses penyesuaian dan stabilisasi sistem keuangan yang berbeda-beda terutama dengan diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual mulai tahun 2015.
4. Sesuai Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/1/35.73.112/2018 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota Malang selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2019 yang berpengaruh terhadap penambahan jumlah entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan tersebut.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2019 ini disusun untuk memberikan informasi lebih komprehensif dan informatif untuk menerjemahkan poin-poin dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas pada Pemerintah Kota Malang, semoga dapat bermanfaat untuk pengguna Laporan Keuangan sebagai salah satu bahan pertimbangan pengambilan keputusan/kebijakan dan sebagai alat ukur kinerja Pemerintah Kota Malang secara keseluruhan serta sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kota Malang pada tahun-tahun berikutnya.

